



GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/11 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B UNIT 5 DAN 6 (2 X  
1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Bhumi Jati Power telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2016;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Pembangunan Dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 77);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan Izin Lingkungan Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah :

1. Nama Pemrakarsa : PT. Bhumi Jati Power
2. Penanggungjawab
  - a. Nama : Satoshi Matsui
  - b. Jabatan : Direktur
3. Alamat Kantor : Summitmas I Lt.15  
Jl. Jenderal Sudirman  
Kav. 61-62 Jakarta 12190

4. Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan Pembangkit Kegiatan Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5. Skala/Besaran Usaha : dan/atau Kegiatan
  - a. Pembangunan dan pengoperasian PLTU kapasitas (2 X 1.070 MW)
  - b. Pembangunan dermaga dengan bentuk konstruksi *open pile* panjang 2.260 meter dan luas 42.450 m<sup>2</sup>
  - c. Pengerukan pengairan dengan *capital dredging* volume 2.901.000 m<sup>3</sup>
  - d. Penempatan hasil keruk di laut volume 2.601.000 m<sup>3</sup> dan luas 222,57 Ha
  - e. Penataan dan pengurugan lahan dengan volume 1.300.000 m<sup>3</sup>
  - f. Pembangunan bangunan gedung dengan luas lahan 89,8 Ha dan luas bangunan 127.000 m<sup>2</sup>
6. Lokasi Kegiatan : Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup seluruh kegiatan sebagaimana tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : PT. Bhumi Jati Power sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memiliki :

- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri atas :
  - 1) Izin Pembuangan Limbah Cair;
  - 2) Izin Pemanfaatan Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
  - 3) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  - 4) Izin Pemanfaatan Limbah B3;
  - 5) Izin Penimbunan Limbah B3;
  - 6) Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut;
  - 7) Izin *Dumping*;
  - 8) Izin *Venting*; dan
- b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : PT. Bhumi Jati Power sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 Dan 6 (2 X 1.070 MW) Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

KELIMA : PT. Bhumi Jati Power sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

†

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bupati Jepara, up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara; dan
- c. Instansi lain penerima laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, PT. Bhumi Jati Power wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

KETUJUH

: PT. Bhumi Jati Power sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila :

- a. dalam pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2 X 1.070 MW) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
  - 1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - 3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
    - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    - b) penambahan kapasitas produksi;
    - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
    - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis

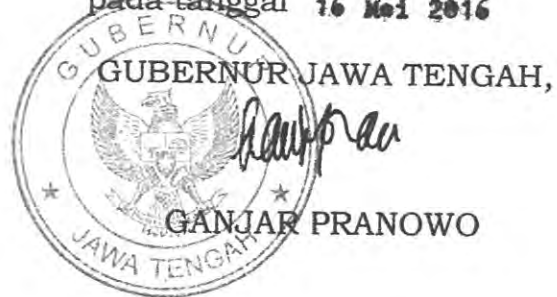
risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Mei 2016



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Jepara;
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
12. Direktur PT. Bhumi Jati Power.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 660.1/11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN  
 PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 DAN 6 (2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN  
 JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)  
 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 DAN 6 (2 X 1.070 MW)  
 DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dikelola Berdasarkan Hasil Arahan Pada Andal							
I. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
I.A. Penyediaan Lahan							
I.A.1	Gangguan Proscs Sosial	Pembebasan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan.</li> <li>Berkurangnya kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.</li> <li>Tercapai kesepakatan harga jual dan/atau sewa tanah dengan warga pemilik tanah yang diwujudkan dalam bentuk transaksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>Proses penentuan harga lahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.</li> <li>Pengukuran luas lahan dan batas-batas kepemilikan lahan dilakukan secara</li> </ol>	Desa Tubanan Kecamatan Kembang atau lokasi lain yang disepakati para pihak.	Selama proses pembebasan lahan berlangsung.	Instansi Pclaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>BPN atau Kantor Pertanahan Jepara</li> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.</li> </ol>

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				bersama antara pemilik lahan dengan Instansi terkait. 4. Pembayaran harga lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan di saksikan oleh notaris/ petugas PPAT.			
I.A.2	Perubahan Persepsi dan sikap Masyarakat	Pembebasan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW).</li> <li>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi.</li> <li>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat yang lahannya terkena poyek pembangunan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW) dengan tercapainya kesepakatan harga jual lahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan dan jujur tentang kebutuhan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW) dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung.</li> <li>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> </ol>	Desa terkena dampak atau lokasi lain yang disepakati para pihak meliputi: Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Selama proses pembebasan lahan berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
I.B.	Penerimaan Tenaga Kerja						
I.B.1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan rekrutmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi.</li> <li>2. Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap konstruksi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan rekrutmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi, dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Melakukan proses rekrutmen secara objektif dan transparan.</li> <li>3. Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek yang memenuhi kualifikasi dan bersedia mematuhi peraturan kerja untuk dapat menjadi tenaga kerja tahap konstruksi.</li> <li>4. Mengadakan program pelatihan kepada pekerja lokal sebelum bekerja pada proyek agar memenuhi kualifikasi dan/atau meningkatkan keterampilan tenaga kerja.</li> </ol>	Desa Tubanan, desa Balong, desa Kaliaman, desa Kancilan (Kecamatan Kembang) ;, Desa Wedelan desa Jerukwangi, desa Bondo, desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara	Pada saat proses rekrutmen berlangsung pada tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>3. Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.</li> </ol>
I.B.2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upah minimum yang diterima minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).</li> <li>2. Pendapatan masyarakat terdampak yang bekerja pada proyek meningkat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengupahan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan melalui mekanisme yang transparan.</li> <li>2. Memberi pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja yang telah terseleksi khusus bagi warga masyarakat terdampak langsung sehingga dapat bekerja pada tahap</li> </ol>	Desa Tubanan, desa Balong, desa Kaliaman, desa Kancilan (Kecamatan Kembang) ;, Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara.	Selama tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>3. Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> </ol>



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				konstruksi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6.			2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
I.B.3	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi.</li> <li>Minimal 90% keluhan, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi.</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi, dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek dalam wilayah terdampak untuk dapat menjadi tenaga kerja konstruksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.</li> <li>Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung.</li> </ol>	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara.	Selama tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.</li> </ol>
<b>II. TAHAP KONSTRUKSI</b>							
<b>II.A. Mobilisasi - Demobilisasi Peralatan/Material</b>							
II.A.1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kegiatan Mobilisasi/demobilisasi peralatan/material pada tahap konstruksi.	Tingkat konsentrasi debu, CO dan NO <sub>2</sub> tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>debu ≤ 230 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>CO ≤ 10.000 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>NO<sub>2</sub> ≤ 150 µg/Nm<sup>3</sup></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bak kendaraan pengangkut yang membawa material yang dimungkinkan akan jatuh diberikan penutup yang rapat pada saat pengangkutan material untuk mencegah terjadinya ceceran di jalan.</li> <li>Segera membersihkan ceceran material yang jatuh dari kendaraan pengangkut.</li> <li>Melakukan pembersihan terhadap roda kendaraan pengangkut yang keluar dari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dari quarry sampai pembongkaran di lokasi proyek</li> <li>Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek).</li> <li>Sebelum pintu keluar tapak proyek.</li> </ol>	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi untuk semua jenis pengelolaan.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>Dishubkominfo Kabupaten Jepara</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>tapak proyek</p> <p>4. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek)</p> <p>5. Menggunakan kendaraan pengangkut peralatan berat yang dilengkapi hasil uji emisi.</p>	<p>4. Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek).</p> <p>5. Kendaraan pengangkut</p>		<p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.</p>
II.A.2	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan mobilisasi-demobilisasi peralatan/material	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996, sebesar 55 + 3 dBA	Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material dengan pemasangan rambu lalu lintas pembatasan kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam	Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek)	Selama kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan/material	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.</li> </ol>
II.A.3	Peningkatan Kepadatan Lalu lintas	Kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan/material yang akan meningkatkan volume lalu lintas.	Terkendalinya volume lalu lintas dengan nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) $\leq 1$ dan tundaan simpang $\leq 30$ smp/detik (MKJI, 1997)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi proyek untuk tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam-jam sibuk (<i>peak hour</i>).</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Memasang rambu-rambu lalu lintas tambahan.</li> <li>4. Memberikan <i>Defensive Safety Driving</i> kepada sopir truk pengangkut alat dan bahan untuk tetap memperhatikan</li> </ol>	Jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan - PLTU)	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material di tahap konstruksi.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara</li> <li>4. Polres Jepara</li> <li>5. DBMP ESDM Kabupaten Jepara</li> <li>6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> </ol>

1.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				keselamatan lalu lintas saat melakukan kegiatan pengangkutan.			2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
II.A.4	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/material	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material</li> <li>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi.</li> <li>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait gangguan kualitas udara dan kebisingan, gangguan lalu lintas dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material</li> <li>4. Jika terjadi kerugian fisik dan material dapat tercapai kesepakatan penggantian kepada warga terdampak sesuai peraturan/hukum yang berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>4. Apabila terjadi kerugian fisik dan material yang ditimbulkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material maka proses dan mekanisme penyelesaiannya akan dilakukan melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang</li> </ol>	Desa di sekitar jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – Tubanan – Kaliaman – Kancilan - PLTU)	Selama masa mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, dan</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			
II.A.5	Gangguan Kesehatan	Peningkatan debu dari adanya Kegiatan mobilisasi - Demobilisasi Peralatan/material	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis pada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur transportasi untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penutupan truk pengangkut material dengan terpal untuk mengurangi penyebaran debu ketika mobilisasi material.</li> <li>2. Pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman tumpukan material secara berkala khususnya saat musim kemarau.</li> <li>3. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan pengangkut material,</li> <li>2. Lokasi penumpukan material.</li> <li>3. Masyarakat yang tinggal di permukiman Desa terkena dampak meliputi: Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.</li> </ol>	Dilakukan selama masa mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol>
<b>II.B. Pemanfaatan Area Lay Down</b>							
II.B.1	Peningkatan Kebisingan	Pemanfaatan Area Lay Down	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996, sebesar 55 + 3 dBA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasang pagar penutup proyek di lokasi Area Lay Down yang berdekatan dengan pemukiman warga.</li> <li>2. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan (penggunaan mesin las, gerinda, mesin potong, dan bor) dilaksanakan pada pukul 07.00-19.00 WIB. Jika diperlukan kegiatan diatas jam 19.00 WIB maka PT. Bhumi Jati Power akan berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar</li> </ol>	Di lokasi rencana Lay Down	Selama kegiatan pemanfaatan Area Lay Down tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol>
<b>II.C. Pengerukan (Dredging)</b>							
II.C.1	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengerukan untuk rencana Jetty, kolam labuh,	Konsentrasi TSS, Kecerahan dan lapisan minyak pada area dengan	1. Pelaksanaan dredging bergantung pada kondisi sedimen dasar perairan yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di lokasi area Dredging</li> <li>2. Area dredging</li> </ol>	Selama kegiatan pengerukan (Dredging) pada	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<i>Water Intake, Outfall, Unloading Ramp, dan Temporary Jetty.</i>	radius 50 m dari lokasi dredging tidak melebihi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk Pelabuhan: TSS < 80 mg/l Kecerahan > 3 m Lapisan minyak - nihil	akan dikeruk. <i>Dredging</i> menggunakan <i>Cutter Suction Dredger</i> untuk material berlumpur dan <i>Grabdredger</i> untuk material berbatu. 2. Alat angkut hasil keruk menggunakan <i>Hopper Barge</i> tipe <i>Bottom Door</i> . 3. Apabila terjadi ceceran minyak yang berasal dari peralatan segera menambahkan <i>oil absorbent</i> .	3. Area dredging	tahap konstruksi pembangkit	1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara 4. Dinas Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Jepara 5. Dinas Kelautan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.2	Gangguan Biota Perairan	Pengerukan ( <i>Dredging</i> )	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal. a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi =	1. Pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Dredging</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air. 2. Melaksanakan studi kelayakan untuk penentuan pemasangan rumah ikan ( <i>fish apartment</i> ), apabila terjadi perubahan struktur komunitas biota laut.	1. Tapak proyek 2. Di area perairan terdampak diluar area perairan terminal khusus.	Selama kegiatan pengerukan ( <i>Dredging</i> ) pada tahap konstruksi pembangkit.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8				
II.C.3	Perubahan Pendapatan Masyarakat Nelayan	Pengerukan ( <i>Dredging</i> )	1. Tidak ada penurunan jumlah produksi perikanan (besarnya CPUE) setelah adanya kegiatan <i>dredging</i> dan sebelum adanya kegiatan <i>dredging</i> 2. Tidak ada penurunan tingkat pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) setelah adanya kegiatan <i>dredging</i> dan sebelum adanya kegiatan <i>dredging</i> .	1. Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak untuk meningkatkan diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. 2. Memberikan bantuan teknis berupa permodalan atau peralatan, pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat nelayan terdampak. Pemberian bantuan teknis didasarkan pada kesepakatan antara pemrakarsa dengan para pemangku kepentingan terkait.	Desa terdampak yaitu : Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama pengerukan ( <i>Dredging</i> ).	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.4	Gangguan Proses Sosial	Pengerukan ( <i>dredging</i> )	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan ( <i>Dredging</i> ) 2. Hilangnya kekhawatiran/keresahan akan berkurangnya hasil tangkapan ikan dan pekerjaan	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan ( <i>dredging</i> ), dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui pembentukan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak pengerukan ( <i>Dredging</i> ) yang tinggal di Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama pengerukan ( <i>Dredging</i> ).	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pemangku kepentingan yang terkait (pemrakasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p> <p>3. Memfasilitasi nelayan tangkap agar tetap dapat mencari ikan di area tangkapan yang lain</p>			
II.C.5	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengerukan ( <i>Dredging</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan <i>dredging</i> pada pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW)</li> <li>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi.</li> <li>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait proses pengerukan (<i>dredging</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan <i>dredging</i> pada pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW) dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakasa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakasa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> </ol>	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak pengerukan ( <i>Dredging</i> ) yang tinggal di: Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama pengerukan ( <i>Dredging</i> ).	<p>Instansi Pelaksana: PT Rumi Inti Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.D.	<i>Dumping</i>						
II.D.1	Penurunan Kualitas Air Laut (Konsentrasi TSS, kecerahan, lapisan minyak)	<i>Dumping</i>	Konsentrasi TSS, Kecerahan dan lapisan minyak pada area sekitar lokasi <i>Dumping</i> dengan radius 50 m tidak melebihi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk Pelabuhan: TSS ≤ 80 mg/l Kecerahan > 3 m Lapisan minyak = nihil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan <i>Dumping</i> menggunakan <i>Hopper Barge</i> tipe <i>Bottom Door</i>.</li> <li>2. Pemasangan <i>Silt Screen</i> akan dilakukan di sekeliling kapal <i>Hopper Barge</i> saat kadar TSS pada lokasi dengan radius 50 m dari lokasi <i>Dumping</i> melebihi baku mutu dan diakibatkan oleh aktivitas <i>Dumping</i>.</li> <li>3. Ceceran minyak di perairan segera ditangani dengan penambahan <i>oil absorbent</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di lokasi <i>Dumping</i></li> <li>2. Lokasi <i>Dumping</i> pada radius 50 m sesuai arah arus.</li> <li>3. Kapal <i>Hopper Barge</i></li> </ol>	Selama kegiatan <i>Dumping</i> tahap konstruksi pembangkit	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara.</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.D.2	Gangguan Biota Perairan	<i>Dumping</i>	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Plankton               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,839</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,204</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,822</li> <li>• Jumlah Individu = 47</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul> </li> <li>b. Bentos               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,242</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,333</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,896</li> <li>• Jumlah Individu = 8</li> <li>• Jumlah Jenis = 4</li> </ul> </li> <li>c. Nekton</li> </ol>	Pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Dumping</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air.	Di sekitar lokasi <i>dumping</i>	Selama kegiatan <i>Dumping</i> tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,438</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,075</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,971</li> <li>• Jumlah Individu = 20</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul>				
II.D.3	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<i>Dumping.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan <i>Dumping</i>,</li> <li>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi.</li> <li>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan <i>dumping</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> </ol>	Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama selama Kegiatan <i>Dumping</i> .	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.E.	Pematangan Lahan						
II.E.1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pematangan Lahan	Konsentrasi debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyiraman secara berkala</li> <li>2. Memasang pagar penutup proyek.</li> <li>3. Membersihkan roda alat berat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi pematangan lahan di tapak proyek.</li> <li>2. Permulkiman yang berdekatan dengan tapak proyek,</li> </ol>	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			No. 8 tahun 2001, sebesar debu $\leq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , $\text{PM}_{10} \leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ $\text{PM}_{2,5} \leq 65 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$	pada saat keluar dari tapak proyek	3. Sebelum keluar pintu tapak proyek		2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.2	Peningkatan Kebisingan	Pematangan Lahan	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar $55 + 3 \text{ dB}$	1. Memasang pagar penutup proyek di lokasi pematangan lahan yang berdekatan dengan pemukiman warga 2. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan (penggunaan alat-alat berat) dilakukan pada pukul 07:00 - 19:00 WIB. Jika diperlukan kegiatan di atas jam 19:00 maka PT. Bhumi Jati Power akan berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar.	Lokasi pematangan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan pada tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.3	Peningkatan Run Off	Pematangan Lahan	Tidak terjadinya genangan di pemukiman warga akibat kegiatan pematangan lahan	Membuat kolam penampung (detensi) di hilir saluran drainase sebelum masuk ke sungai	Di hilir saluran drainase sebelum masuk ke sungai pada lokasi pematangan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.4	Penurunan Kualitas Air Permukaan (kadar TSS)	Pematangan Lahan	Kadar TSS memenuhi baku mutu kualitas air permukaan sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas III, yaitu kadar TSS $\leq 400 \text{ mg/l}$ .	1. Melakukan pengendapan sedimen di kolam penampung 2. Membersihkan kotoran/sampah/sedimen yang berada di dalam kolam penampung secara berkala.	1. Kolam detensi, 2. Saluran menuju kolam detensi	1. Selama kegiatan pematangan lahan 2. Sekali tiap bulan atau ditambah jika musim hujan.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.5	Gangguan Flora dan Fauna Darat	Pematangan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas total area</li> <li>2. Minimal ada 5 jenis tanaman pantai yang ditanam di lahan RTH selain rumput-rumputan seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Casuarina equisetifolia</i></li> <li>b. <i>Barringtonia</i></li> </ol> </li> <li>3. 90% tanaman di RTH terawat dengan baik</li> <li>4. Dijumpainya burung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Hubulcus ibis</i>, atau</li> <li>b. <i>Egretta garzetta</i>, atau</li> <li>c. <i>Ardea alba</i></li> </ol> </li> <li>5. Terdapat tanaman dengan ukuran pohon yang dapat digunakan sebagai tempat hinggap burung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penghijauan pada lahan terbuka di sekitar lokasi proyek</li> <li>2. Melakukan perawatan terhadap tanaman di RTH</li> <li>3. Menanam pohon yang dapat tumbuh tinggi</li> </ol>	Tapak proyek dan dapat diperluas disekitar lokasi proyek	Sebelum kegiatan konstruksi berakhir dan diperpanjang selama tahap operasi.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.E.6	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pematangan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan</li> <li>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terkait (pemrakarsa) ditanggapi.</li> <li>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait pematangan lahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan penangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang</li> </ol>	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p>			
II.E.7	Gangguan Kesehatan	Pematangan Lahan	<p>Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pematangan lahan (Desa Tubanan) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau.</li> <li>Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pematangan lahan untuk menggunakan masker dust.</li> <li>Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi tapak proyek yang dibuka saat pematangan lahan</li> <li>Penduduk terdampak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang</li> </ol>	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.F.	Pembangunan <i>Jetty</i>						
II.F.1	Penurunan Kualitas Air Laut	Pembangunan <i>Jetty</i>	<p>Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu kualitas air laut KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk pelabuhan, sebesar (TSS ≤ 80 mg/l).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan <i>Jetty</i> dilakukan secara cermat dengan menggunakan <i>precast element</i> dan/atau <i>shuttering forms</i> untuk meminimalisasi cecceran semen.</li> <li>Pembangunan <i>jetty</i> secara <i>open pile</i> dan pada saat pemasangan <i>open pile</i> menggunakan <i>hammer pile</i>.</li> </ol>	Di lokasi pembangunan <i>Jetty</i> .	Selama kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.F.2	Gangguan Biota Perairan	Pembangunan <i>Jetty</i>	<p>Struktur komunitas biota air laut bentos setara dengan kondisi awal, yaitu:</p> <p>a. Plankton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,839</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,204</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,822</li> <li>• Jumlah Individu = 47</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul> <p>b. Bentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,242</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,333</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,896</li> <li>• Jumlah Individu = 8</li> <li>• Jumlah Jenis = 4</li> </ul> <p>c. Nekton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,438</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,075</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,971</li> <li>• Jumlah Individu = 20</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul>	Pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pembangunan <i>jetty</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air.	Di lokasi pembangunan <i>Jetty</i>	Selama kegiatan konstruksi <i>Jetty</i> berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.F.3	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pembangunan <i>Jetty</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i>.</li> <li>2. Minimal 90% saran,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan</li> </ol>	Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi (pembangunan <i>Jetty</i> )	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan <i>jetty</i> .	antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
<b>II.G. Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i></b>							
II.G.	Penurunan Kualitas Air Laut (kadar TSS)	Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu kualitas air laut KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk kategori pelabuhan, untuk TSS ≤ 80 mg/l)	Memilih peralatan untuk pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> yang ramah lingkungan, yaitu dengan memasang pipa kanal ( <i>channel water intake</i> dengan menurunkan pipa per <i>section</i> menggunakan <i>crane barge</i> .	Di lokasi pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	Sekali pada saat pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.G.2	Gangguan Biota Perairan	Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal, yaitu:	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pembangunan <i>water intake</i> dan <i>outfall</i> dengan melakukan	Di lokasi pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	Selama pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan

1

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			a. Plankton <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,839</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,204</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,822</li> <li>• Jumlah Individu = 47</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul> b. Bentos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,242</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,333</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,896</li> <li>• Jumlah Individu = 8</li> <li>• Jumlah Jenis = 4</li> </ul> c. Nekton <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,438</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,075</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,971</li> <li>• Jumlah Individu = 20</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul>	pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air.			Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.G.3	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	1. Intensitas dan efektifitas sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> .	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk	Desa terdampak yaitu Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi (pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> )	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</p> <p>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p>			melalui BLH Jawa Tengah
<b>II.H. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya</b>							
II.H.1	Penurunan Kualitas Udara Ambien.	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Kadar debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 µg/Nm <sup>3</sup> , PM <sub>10</sub> ≤ 150 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>2,5</sub> ≤ 65 µg/Nm <sup>3</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi pembangunan bangunan utama PLTU secara berkala</li> <li>Memasang pagar penutup proyek pada lokasi Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya yang berdekatan dengan pemukiman warga.</li> </ol>	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>
II.H.2	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB dan batas untuk proyek (industri) adalah sebesar 70 dB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya yang berdekatan dengan pemukiman warga.</li> <li>Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (pemancangan) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00 WIB. Apabila diperlukan melakukan pemancangan di atas pukul 19:00, maka berkoordinasi dengan petinggi atau</li> </ol>	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya dalam pemasangan tiang pancang	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																																										
II.H.3	Peningkatan Getaran	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Tingkat getaran memenuhi baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan sesuai Kepmen LH No. 49 Tahun 1996, sebagai berikut:  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekuensi (Hz)</th> <th>Tingkat Getaran (Mikrons)</th> <th>Getaran puncak (mm/dt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>&lt; 100</td><td>&lt; 12</td></tr> <tr><td>5</td><td>&lt; 60</td><td>&lt; 7,5</td></tr> <tr><td>6,3</td><td>&lt; 70</td><td>&lt; 7</td></tr> <tr><td>8</td><td>&lt; 50</td><td>&lt; 6</td></tr> <tr><td>10</td><td>&lt; 37</td><td>&lt; 5,2</td></tr> <tr><td>12,5</td><td>&lt; 32</td><td>&lt; 4,8</td></tr> <tr><td>16</td><td>&lt; 25</td><td>&lt; 4</td></tr> <tr><td>20</td><td>&lt; 20</td><td>&lt; 3,8</td></tr> <tr><td>25</td><td>&lt; 17</td><td>&lt; 3,2</td></tr> <tr><td>31,5</td><td>&lt; 12</td><td>&lt; 3</td></tr> <tr><td>40</td><td>&lt; 9</td><td>&lt; 2</td></tr> <tr><td>50</td><td>&lt; 8</td><td>&lt; 1</td></tr> <tr><td>63</td><td>&lt; 6</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Mikrons)	Getaran puncak (mm/dt)	4	< 100	< 12	5	< 60	< 7,5	6,3	< 70	< 7	8	< 50	< 6	10	< 37	< 5,2	12,5	< 32	< 4,8	16	< 25	< 4	20	< 20	< 3,8	25	< 17	< 3,2	31,5	< 12	< 3	40	< 9	< 2	50	< 8	< 1	63	< 6	-	Membuat parit di sekeliling area pemancangan terutama pada arah pemukiman	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Mikrons)	Getaran puncak (mm/dt)																																															
4	< 100	< 12																																															
5	< 60	< 7,5																																															
6,3	< 70	< 7																																															
8	< 50	< 6																																															
10	< 37	< 5,2																																															
12,5	< 32	< 4,8																																															
16	< 25	< 4																																															
20	< 20	< 3,8																																															
25	< 17	< 3,2																																															
31,5	< 12	< 3																																															
40	< 9	< 2																																															
50	< 8	< 1																																															
63	< 6	-																																															
II.H.4	Peningkatan Timbulan Limbah B3 - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	1. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 2. Penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. 3. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 4. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3	1. Lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya. 2. Tempat Penyimpanan Limbah B3 3. Tempat Penyimpanan Limbah B3 4. Kantor PLTU Unit 5&6	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan																																										
II.H.5	Terciptanya Peluang Usaha	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung berlangsung.	1. Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya. 2. Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja,																																										

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya.</p> <p>3. Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan telminkewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat.</p>			<p>dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>
II.H.6	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	<p>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung</p> <p>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya ditanggapi</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya</p>	<p>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p> <p>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</p> <p>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p>	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>
II.H.7	Gangguan	Pembangunan	Tidak ada peningkatan	1. Pemagaran sementara dengan	1. Lokasi tapak proyek.	Selama kegiatan	InstansiPelaksana:

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Kesehatan	Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya.	angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung (Wilayah Kecamatan Kembang) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rapat batas area proyek, dimaksudkan agar aktivitas yang ada di dalam lokasi proyek tidak bersinggungan (berpengaruh) langsung terhadap lingkungan sekitarnya.</li> <li>2. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi dengan tetap mempertahankan keberadaan pohon, semak dan rumput.</li> <li>3. Mengembalikan atau mengganti vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa/vegetasi yang dapat mengurangi penyebaran debu.</li> <li>4. Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau.</li> <li>5. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya untuk menggunakan masker <i>dust</i>.</li> <li>6. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan</li> </ol>	2. Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya masyarakat di, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang.	pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.			
II.H.8	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Adanya limbah padat maupun cair dari pekerja akibat Aktivitas Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	<p>1. Untuk limbah padat: tersedianya Tempat sampah/TPS, tidak ada bau tidak sedap dari sampah, Tidak adanya vektor penyakit (lalat, kecoa dan tikus) dari limbah pekerja yang melebihi baku mutu vector penyakit ((KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002):</p> <p>a. Indeks lalat : maksimal 8 ekor/fly grill (100 x 100 cm) dalam pengukuran 30 menit;</p> <p>b. Indeks kecoa : maksimal 2 ekor/plate (20 x 20 cm) dalam pengukuran 24 jam;</p> <p>c. Indeks nyamuk tidak melebihi 5%.</p> <p>2. Untuk limbah cair: ada tidaknya sarana sanitasi (MCK) memadai (sesuai dengan rasio jumlah pekerja), adanya SPAL sehingga limbah cair tidak tercecceer sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja.</p>	<p>1. Menjaga kebersihan areal proyek dan menerapkan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan.</p> <p>2. Memanfaatkan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau membangun sederhana/semmentara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir.</p> <p>3. Menyediakan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak</p> <p>4. Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah.</p> <p>5. Melakukan pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin.</p>	Di lokasi proyek yaitu: <p>1. Di lokasi SPAL dan MCK.</p> <p>2. Di lokasi tempat/bak sampah Saluran air (drainase).</p> <p>3. Di lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah.</p>	Dikelola setiap hari selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:  <p>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:  <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p> </p></p>
II.I.	Pembangunan Bangunan Non Teknis						
II.I.1	Penurunan Kualitas Udara Ambien.	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Kadar debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep.	1. Memasang pagar penutup proyek dengan rapat pada lokasi pembangunan bangunan Non - Teknis yang	Lokasi pembangunan bangunan Non - Teknis (Power Block)	Selama kegiatan pembangunan bangunan non - teknis.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																																										
			Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu $\leq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , $\text{PM}_{10} \leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , $\text{PM}_{2,5} \leq 65 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$	berdekatan dengan pemukiman warga. 2. Melakukan penyiraman secara berkala di sekitar lokasi pembangunan bangunan Non - Teknis yang berdekatan dengan lokasi pemukiman.			Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah																																										
II.1.2	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar $55 + 3 \text{ dB}$ kurang dari $70 \text{ dB}$ di wilayah proyek (industri)	1. Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan Bangunan Non - Teknis yang berdekatan dengan pemukiman warga 2. Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (pemancangan) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00. Apabila diperlukan pemancangan di atas jam 19:00, berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar.	Lokasi Pembangunan Bangunan Non Teknis	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah																																										
II.1.3	Peningkatan Getaran	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tingkat getaran memenuhi baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan sesuai Kepmen LH No. 49 Tahun 1996, sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="742 1068 1041 1323"> <thead> <tr> <th>Frekuensi (Hz)</th> <th>Tingkat Getaran (Microns)</th> <th>Getaran puncak (mm/dt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>&lt; 100</td><td>&lt; 12</td></tr> <tr><td>5</td><td>&lt; 80</td><td>&lt; 7,5</td></tr> <tr><td>6,3</td><td>&lt; 70</td><td>&lt; 7</td></tr> <tr><td>8</td><td>&lt; 50</td><td>&lt; 6</td></tr> <tr><td>10</td><td>&lt; 37</td><td>&lt; 5,2</td></tr> <tr><td>12,5</td><td>&lt; 32</td><td>&lt; 4,8</td></tr> <tr><td>16</td><td>&lt; 25</td><td>&lt; 4</td></tr> <tr><td>20</td><td>&lt; 20</td><td>&lt; 3,6</td></tr> <tr><td>25</td><td>&lt; 17</td><td>&lt; 3,2</td></tr> <tr><td>31,5</td><td>&lt; 12</td><td>&lt; 3</td></tr> <tr><td>40</td><td>&lt; 9</td><td>&lt; 2</td></tr> <tr><td>50</td><td>&lt; 8</td><td>&lt; 1</td></tr> <tr><td>63</td><td>&lt; 6</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Microns)	Getaran puncak (mm/dt)	4	< 100	< 12	5	< 80	< 7,5	6,3	< 70	< 7	8	< 50	< 6	10	< 37	< 5,2	12,5	< 32	< 4,8	16	< 25	< 4	20	< 20	< 3,6	25	< 17	< 3,2	31,5	< 12	< 3	40	< 9	< 2	50	< 8	< 1	63	< 6	-	Membuat parit di sekeliling area pemancangan terutama pada arah pemukiman	Lokasi Pembangunan Bangunan Non Teknis	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Microns)	Getaran puncak (mm/dt)																																															
4	< 100	< 12																																															
5	< 80	< 7,5																																															
6,3	< 70	< 7																																															
8	< 50	< 6																																															
10	< 37	< 5,2																																															
12,5	< 32	< 4,8																																															
16	< 25	< 4																																															
20	< 20	< 3,6																																															
25	< 17	< 3,2																																															
31,5	< 12	< 3																																															
40	< 9	< 2																																															
50	< 8	< 1																																															
63	< 6	-																																															

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.I.4	Peningkatan Timbulan Limbah B3 - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	1. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014. 2. Penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. 3. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014. 4. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3	1. Lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya. 2. Tempat Penyimpanan Limbah B3 3. Tempat Penyimpanan Limbah B3 4. Tempat Penyimpanan Limbah B3	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.I.5	Terciptanya Peluang Usaha	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis berlangsung.	1. Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pembangunan Bangunan Non-Teknis 2. Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pembangunan Bangunan Non-Teknis 3. Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat.	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan Bangunan Non Teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.6	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis ditanggapi</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis</p>	<p>terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p> <p>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</p> <p>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p>			<p>Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>
II.1.7	Gangguan Kesehatan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi aktivitas pembangunan bangunan non teknis (Wilayah Kecamatan Kembang) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	<p>1. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi.</p> <p>2. Mengembalikan atau mengganti vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa.</p> <p>3. Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau.</p> <p>4. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan</p>	<p>1. Lokasi pembangunan Bangunan Non – Teknis.</p> <p>2. Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya khususnya masyarakat di, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang.</p>	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	<p>InstansiPelaksana:</p> <p>PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>

f

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>teknis untuk menggunakan masker <i>dust</i>.</p> <p>5. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu</p>			
II.1.8	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	<p>1. Untuk limbah padat: tersedianya Tempat sampah/TPS, tidak ada bau tidak sedap dari sampah, tidak adanya vektor penyakit (lalat, kecoa dan tikus) dari limbah pekerja yang melebihi baku mutu vector penyakit ((KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002):</p> <p>a. Indeks lalat : maksimal 8 ekor/fly gill (100 x 100 cm) dalam pengukuran 30 menit;</p> <p>b. Indeks kecoa : maksimal 2 ekor/plate (20 x 20 cm) dalam pengukuran 24 jam;</p> <p>c. Indeks nyamuk tidak melebihi 5%.</p> <p>2. Untuk limbah cair: ada tidaknya sarana sanitasi (MCK) memadai (sesuai dengan rasio jumlah pekerja) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 261 /MENKES/SK/II/19 98 tentang Persyaratan</p>	<p>1. Menjaga kebersihan areal proyek dan menerapkan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan.</p> <p>2. Memanfaatkan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau membangun sederhana/ sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir.</p> <p>3. Menyediakan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak.</p> <p>4. Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah.</p> <p>5. Melakukan pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin.</p>	<p>1. Area tapak proyek</p> <p>2. Sarana sanitasi (MCK)</p> <p>3. Di lokasi tempat/bak sampah.</p> <p>4. Area tapak proyek</p> <p>5. Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah.</p>	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Kesehatan Lingkungan Kerja.				
II.J.	Pembangunan Area Penimbunan Abu						
II.J.1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	Kadar debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 µg/Nm <sup>3</sup> , PM <sub>10</sub> ≤ 150 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>2,5</sub> ≤ 65 µg/Nm <sup>3</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memasang pagar penutup proyek pada sekitar lokasi pembangunan area penimbunan abu.</li> <li>Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi pembangunan area penimbunan abu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pembangunan area penimbunan abu.</li> <li>Lokasi penimbunan abu.</li> </ol>	Selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.J.2	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu 55 + 3 dB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan area penimbunan abu yang berdekatan dengan pemukiman warga</li> <li>Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (penggunaan generator, bulldoser, dumptruck) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00. Apabila diperlukan kegiatan yang menimbulkan bising di atas pukul 19:00, berkoordinasi dengan petinggi atau warga.</li> </ol>	Lokasi Pembangunan area penimbunan abu	Selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.J.3	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu.</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu ditanggapi.</li> <li>Peningkatan persepsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>Menyediakan prosedur alir</li> </ol>	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah.</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> </ol>

f

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu.	komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung. 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
<b>II.K. Commissioning</b>							
II.K.1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kegiatan <i>Commissioning</i>	Tingkat konsentrasi gas memenuhi: 1. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak Per Men LH No. 21 Tahun 2008, yaitu: a. Total partikel $\leq 100$ mg/Nm <sup>3</sup> b. SO <sub>2</sub> $\leq 750$ mg/Nm <sup>3</sup> c. NO <sub>2</sub> $\leq 750$ mg/Nm <sup>3</sup> d. Opasitas $\leq 20\%$ 2. Baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : a. debu $\leq 230$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup> b. SO <sub>2</sub> $\leq 365$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup> c. NO <sub>2</sub> $\leq 150$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup> d. PM 10 $\leq 150$ $\mu$ g/m <sup>3</sup> e. PM 2,5 $\leq 65$ $\mu$ g/m <sup>3</sup>	1. Mengoperasikan Fasilitas <i>Electrostatic Precipitator</i> (EP) 2. Mengoperasikan Fasilitas <i>Flue Gas Desulfurization</i> 3. Mengoperasikan Fasilitas <i>Low NOx Burner</i> 4. Desain cerobong dibangun dengan ketinggian 240 meter 5. Melakukan perawatan secara berkala pada seluruh peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat.	1. Unit EP 2. Unit FGD 3. Unit Boiler 4. Lokasi <i>Power Block</i> 5. Unit Boiler, Cerobong, EP dan FGD	Selama kegiatan <i>Commissioning</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.K.2	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan <i>Commissioning</i>	1. Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukaan sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 sebesar 55 + 3 dB	1. Memasang <i>silencer</i> pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (seperti: turbin, generator, pulverizer, dan boiler). 2. Menanam dan merawat tanaman-tanaman yang	1. Fasilitas turbin, generator, pulverizer dan boiler 2. Sekeliling area PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 terutama yang berdekatan dengan	1. Sebelum kegiatan <i>Commissioning</i> 2. Melakukan penanaman sebelum kegiatan <i>Commissioning</i> dan merawat	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			3. Tingkat kebisingan siang malam (Lsm) di dalam wilayah PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 lebih rendah dari baku tingkat kebisingan di wilayah industri sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 70 dB.	dapat mengurangi bising di sekeliling Unit 5&6	pemukiman.	setiap hari mulai dari <i>Commissioning</i> sampai dengan operasi.	Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.K.3	Penurunan Kualitas Air Laut.	1. Kegiatan <i>comissioning</i> dan (limbah cair dari kondensor).	Kualitas limbah air bahang memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal, untuk Air Bahang yang dihasilkan dari kondensor, meliputi : - Suhu $\leq 40$ °C - Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> ) $\leq 0,5$	1. Melakukan pengelolaan dengan mengalirkan air bahang dari kondensor ke Kolam Aerasi, dan selanjutnya ke Kanal sesuai dengan prosedur. 2. Pemeliharaan (berkala) pada Kondenser, Kolam Aerasi dan saluran buangan air bahang (kanal) 3. Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan pembuangan air bahang	1. Lokasi Kolam Aerasi 2. Lokasi Kondenser, Kolam Aerasi dan Kanal 3. Pipa sepanjang saluran effluent limbah cair	Selama kegiatan <i>comissioning</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																												
		2. Kegiatan <i>comissioning</i> (penanganan limbah cair).	<p>Kualitas <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal.</p> <p>1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi</p> <table border="1" data-bbox="747 568 1046 698"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>TSS</td><td>100 mg/L</td></tr> <tr><td>Minyak dan lemak</td><td>10 mg/L</td></tr> <tr><td>Residu klorin<sup>as</sup></td><td>0.5 mg/L</td></tr> <tr><td>Total Cr</td><td>0.5 mg/L</td></tr> <tr><td>Cu</td><td>1 mg/L</td></tr> <tr><td>Fe</td><td>3 mg/L</td></tr> <tr><td>Zn</td><td>1 mg/L</td></tr> </table> <p>2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber)<sup>as</sup></p> <table border="1" data-bbox="747 714 1046 844"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>SO<sub>2</sub></td><td>Maksimum penangkapan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.</td></tr> </table> <p>3. Coal Stockpile<sup>as</sup></p> <table border="1" data-bbox="747 860 1046 925"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>TSS</td><td>200 mg/L</td></tr> <tr><td>Fe</td><td>5 mg/L</td></tr> <tr><td>Mn</td><td>2 mg/L</td></tr> </table> <p>Kualitas <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Perda Jateng No. 5 tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah (Golongan I) untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperature ≤ 38 °C</li> <li>- TSS ≤ 100 mg/l</li> <li>- pH = 6 - 9</li> <li>- Fe ≤ 5 mg/l</li> </ul>	pH	6 - 9	TSS	100 mg/L	Minyak dan lemak	10 mg/L	Residu klorin <sup>as</sup>	0.5 mg/L	Total Cr	0.5 mg/L	Cu	1 mg/L	Fe	3 mg/L	Zn	1 mg/L	pH	6 - 9	SO <sub>2</sub>	Maksimum penangkapan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.	pH	6 - 9	TSS	200 mg/L	Fe	5 mg/L	Mn	2 mg/L	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelolaan limbah cair dengan WWTP <i>Power plant</i>, STP (limbah cair domestik), WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i>, WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i>, FGD <i>Aeration Basin</i>, dan <i>Outfall Channel</i>.</li> <li>2. Pemeliharaan (berkala) pada WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal)</li> <li>3. Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan WWTP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi WWTP <i>Power Plant</i>, STP, WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i>, WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i>, FGD <i>Aeration Basin</i> dan <i>Outfall Channel</i></li> <li>2. WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal)</li> <li>3. Sistem perpipaan WWTP</li> </ol>		
pH	6 - 9																																		
TSS	100 mg/L																																		
Minyak dan lemak	10 mg/L																																		
Residu klorin <sup>as</sup>	0.5 mg/L																																		
Total Cr	0.5 mg/L																																		
Cu	1 mg/L																																		
Fe	3 mg/L																																		
Zn	1 mg/L																																		
pH	6 - 9																																		
SO <sub>2</sub>	Maksimum penangkapan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.																																		
pH	6 - 9																																		
TSS	200 mg/L																																		
Fe	5 mg/L																																		
Mn	2 mg/L																																		

F.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup										
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mn ≤ 2 mg/l</li> <li>- Cu ≤ 2 mg/l</li> <li>- Zn ≤ 5 mg/l</li> <li>- Cr ≤ 0,05 mg/l</li> <li>- Cd ≤ 0,05 mg/l</li> <li>- Hg ≤ 0,002 mg/l</li> <li>- Pb ≤ 0,1 mg/l</li> <li>- As ≤ 0,1 mg/l</li> <li>- Cl<sub>2</sub> ≤ 1 mg/l</li> <li>- Minyak mineral &lt; 10 mg/l</li> </ul> <p>Kualitas air limbah STP memenuhi baku mutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan domestik sesuai permen LH No. 05 Tahun 2014 yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="750 711 1049 813"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Kadar paling tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>6 - 9</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>100 mg/L</td> </tr> <tr> <td>TSS</td> <td>100 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Minyak &amp; Lemak</td> <td>10 mg/L</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kualitas air laut memenuhi Baku mutu air laut sesuai Kep Men LH No. 51 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air laut untuk kategori Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Temperatur ≤ +2°C</li> <li>- TSS ≤ 80 mg/l</li> <li>- pH = 6,5 - 8,5</li> <li>- Salinitas &lt; +5</li> <li>- Cu ≤ 0,05 mg/l</li> <li>- Zn ≤ 0,1 mg/l</li> </ul>	Parameter	Kadar paling tinggi	pH	6 - 9	BOD	100 mg/L	TSS	100 mg/L	Minyak & Lemak	10 mg/L				
Parameter	Kadar paling tinggi																
pH	6 - 9																
BOD	100 mg/L																
TSS	100 mg/L																
Minyak & Lemak	10 mg/L																

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cd <math>\leq</math> 0,01 mg/l</li> <li>- Hg <math>\leq</math> 0,003 mg/l</li> <li>- Pb <math>\leq</math> 0,05 mg/l</li> <li>- Minyak lemak <math>\leq</math> 5 mg/l</li> <li>- Radioaktif: <math>^{210}\text{Pb}</math>, <math>^{226}\text{Ra}</math>, <math>^{228}\text{Ra}</math>, <math>^{228}\text{Th}</math>, <math>^{230}\text{Th}</math>, <math>^{234}\text{Th}</math> <math>\leq</math> 1 bq/gr.</li> </ul>				
II.K.4	Gangguan Biota Peairan	Kegiatan <i>Commissioning</i>	<p>Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal, yaitu:</p> <p>a. Plankton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,839</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,204</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,822</li> <li>• Jumlah Individu = 47</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul> <p>b. Bentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,242</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,333</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,896</li> <li>• Jumlah Individu = 8</li> <li>• Jumlah Jenis = 4</li> </ul> <p>c. Nekton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,438</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,075</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,971</li> <li>• Jumlah Individu = 20</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul>	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Commissioning</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air.	Lokasi masing-masing WWTP	Selama kegiatan <i>Commissioning</i>	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

7.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>II.L. Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi</b>							
II.L.1	Penurunan Kesempatan Kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana pelepasan tenaga kerja</li> <li>2. Tenaga kerja terkena PHK yang memenuhi kualifikasi mengikuti seleksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Melakukan pemutusan hubungan kerja tenaga kerja tahap konstruksi sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku</li> <li>3. Memberi kesempatan tenaga kerja yang terkena PHK yang memenuhi kualifikasi, mengikuti seleksi tenaga kerja tahap operasi</li> </ol>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.L.2	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kerja dari warga masyarakat yang terkena PHK mendapatkan pesangon sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Tenaga kerja yang terkena PHK dan tidak memenuhi kualifikasi mendapatkan bantuan teknis kewirausahaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi pesangon sesuai ketentuan perundangan yang berlaku</li> <li>2. Memberi bantuan teknis (antara lain pelatihan kewirausahaan) melalui program pemberdayaan masyarakat terdampak, khususnya pada masyarakat tenaga kerja yang terkena PHK yang tidak</li> </ol>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.L.3	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi</li> <li>2. Minimal 90% saran,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan</li> </ol>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi ditanggapi</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pelepasan tenaga kerja tahap konstruksi</p>	<p>antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p> <p>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</p> <p>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p>	Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,		<p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>
<b>II.M. Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi</b>							
II.M.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	<p>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Operasi</p> <p>2. Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap operasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.</p>	<p>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p> <p>2. Melakukan proses rekrutmen secara objektif dan transparan.</p> <p>3. Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek yang memenuhi kualifikasi (dan bersedia mematuhi peraturan kerja) untuk dapat menjadi tenaga kerja tahap operasi.</p>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Berkelanjutan selama proses rekrutmen pekerja tahap operasi berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.M.1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Upah terendah yang diterima tenaga kerja minimum sama dengan UMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengupahan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan melalui mekanisme yang transparan</li> <li>2. Memberi pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja yang telah terseleksi khusus bagi warga masyarakat terdampak langsung sehingga dapat bekerja pada tahap operasi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&amp;6.</li> </ol>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama proses rekrutmen pekerja tahap operasi berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dupati Jepara melalui Dadan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.M.2	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi penerimaan tenaga kerja tahap operasi</li> <li>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi ditanggapi</li> <li>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja tahap operasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan penerimaan tenaga kerja tahap operasi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah</li> </ol>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama rekrutmen berlangsung selama Tahap Operasi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III. TAHAP OPERASI							
III.A. Pengoperasian Jetty							
III.A.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengoperasian Jetty pada saat proses Unloading.	Kadar TSS memenuhi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 tahun 2004 kategori pelabuhan, yaitu TSS $\leq$ 80 mg/l.	Pelaksanaan operasional jetty pada saat proses Unloading perlu mempertimbangkan kondisi kecepatan angin untuk mencegah ceceran batubara.	Lokasi Unloading Jetty	Selama tahap pengoperasian Jetty.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.A.	Gangguan Biota Perairan	Pengoperasian Jetty	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pengoperasian jetty dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut.	Lokasi Unloading Jetty	Selama kegiatan operasi Jetty berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			c. Nekton <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,438</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,075</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,971</li> <li>• Jumlah Individu = 20</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul>				
III.A.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Pengoperasian <i>Jetty</i> menyebabkan berubahnya lokasi <i>fishing ground</i> nelayan terdampak langsung .	Tingkat pendapatan nelayan tangkap terdampak langsung pengoperasian <i>jetty</i> tidak mengalami penurunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak untuk meningkatkan diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan.</li> <li>2. Memberikan bantuan teknis kepada nelayan terdampak langsung untuk beralih ke <i>fishing ground</i> yang lain, berkoordinasi dengan instansi terkait.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi kepada nelayan dan memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian <i>jetty</i>.</li> <li>4. Memberikan bantuan teknis berupa permodalan atau peralatan, pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat nelayan terdampak. Pemberian bantuan teknis didasarkan pada kesepakatan antara pemrakarsa dengan para pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelanjutan selama pengoperasian <i>Jetty</i></li> <li>2. Berkelanjutan selama pengoperasian <i>jetty</i></li> <li>3. Berkelanjutan sebelum pengoperasian <i>jetty</i></li> </ol>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
III.A.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian <i>Jetty</i> menyebabkan berubahnya lokasi <i>fishing ground</i> nelayan terdampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau</li> </ol>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper,	Berkelanjutan selama pengoperasian <i>Jetty</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pengoperasian <i>Jetty</i> Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian <i>Jetty</i> ditanggapi</li> <li>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> </ul>	yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.		<ul style="list-style-type: none"> <li>dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ul> Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ul>
<b>III.B. Peroperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu</b>							
III.B.	Gangguan Biota Perairan	Penyedotan air baku menggunakan pipa <i>Intake</i> melalui WTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur komunitas biota air laut plankton dan nekton setara dengan kondisi awal.               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Plankton                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,839</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,204</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,822</li> <li>• Jumlah Individu = 47</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desain <i>Intake</i> menggunakan <i>Bar Screen</i> dengan jarak 10cm.</li> <li>2. Membuat rekaman produksi biowaste berdasarkan jenis biotanya.</li> <li>3. Bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk melakukan kajian pemanfaatan biowaste yang berasal dari kegiatan sistem Water intake.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Intake Head</i>.</li> <li>2. Sekitar <i>Intake Head</i>.</li> <li>3. Kantor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sekali sebelum operasional</li> <li>2. Setiap hari.</li> <li>3. Sekali selama operasional dan dapat ditambah jika diperlukan..</li> </ul>	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ul> Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			b. Bentos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,242</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,333</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,896</li> <li>• Jumlah Individu = 8</li> <li>• Jumlah Jenis = 4</li> </ul> c. Nekton <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,438</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,075</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,971</li> <li>• Jumlah Individu = 20</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul> 2. Biowaste yang tidak dikelola berkurang minimal 50% dari data rata-rata yang terjadi di Unit 1&2 dan 3&4.				Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																																		
III.C	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair																																								
III.C.	Penurunan Kualitas Air laut	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair dari WWTP, FGD Kolam Aerasi, Coal Run-Off WWTP, Ash Run-Off WWTP, Outfall Kanal dan STP Outlet	<p>Parameter <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>6 - 9</td> </tr> <tr> <td>TSS</td> <td>100 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Minyak dan lemak</td> <td>10 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Residu <i>chlorine</i><sup>1</sup></td> <td>0.5 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Total Cr</td> <td>0.5 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Cu</td> <td>1 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>3 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Zn</td> <td>1 mg/L</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber)<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>6 - 9</td> </tr> <tr> <td>SO<sub>2</sub><sup>2</sup></td> <td>Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">3. Coal Stockpile<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>6 - 9</td> </tr> <tr> <td>TSS</td> <td>200 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Fe</td> <td>5 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Mn</td> <td>2 mg/L</td> </tr> </table> <p>Parameter <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Perda Jateng No. 5 tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah (Golongan I) untuk usaha dan/ atau</p>	1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi		pH	6 - 9	TSS	100 mg/L	Minyak dan lemak	10 mg/L	Residu <i>chlorine</i> <sup>1</sup>	0.5 mg/L	Total Cr	0.5 mg/L	Cu	1 mg/L	Fe	3 mg/L	Zn	1 mg/L	2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber) <sup>2</sup>		pH	6 - 9	SO <sub>2</sub> <sup>2</sup>	Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.	3. Coal Stockpile <sup>3</sup>		pH	6 - 9	TSS	200 mg/L	Fe	5 mg/L	Mn	2 mg/L	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan limbah cair dengan WWTP <i>Power plant</i>, STP (limbah cair domestik), WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i>, WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i>, FGD <i>Aeration Basin</i> dan <i>Outfall Channel</i>.</li> <li>Pemeliharaan (berkala) pada WWTP dan saluran huanan limbah cair (kanal)</li> <li>Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan WWTP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi WWTP, STP, WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i>, WTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i>, FGD <i>Aeration Basin</i> dan <i>Outfall Kanal</i></li> <li>Lokasi WWTP, <i>Aeration Basin</i> dan Kanal</li> <li>Perpipaan sepanjang saluran <i>effluent</i> limbah cair</li> </ol>	Selama operasional PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> <li>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi																																									
pH	6 - 9																																								
TSS	100 mg/L																																								
Minyak dan lemak	10 mg/L																																								
Residu <i>chlorine</i> <sup>1</sup>	0.5 mg/L																																								
Total Cr	0.5 mg/L																																								
Cu	1 mg/L																																								
Fe	3 mg/L																																								
Zn	1 mg/L																																								
2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber) <sup>2</sup>																																									
pH	6 - 9																																								
SO <sub>2</sub> <sup>2</sup>	Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.																																								
3. Coal Stockpile <sup>3</sup>																																									
pH	6 - 9																																								
TSS	200 mg/L																																								
Fe	5 mg/L																																								
Mn	2 mg/L																																								

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup										
			<p>kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperature <math>\leq 38</math> °C</li> <li>- TSS <math>\leq 100</math> mg/l</li> <li>- pH = 6 - 9</li> <li>- Fe <math>\leq 5</math> mg/l</li> <li>- Mn <math>\leq 2</math> mg/l</li> <li>- Cu <math>\leq 2</math> <math>\mu</math>g/l</li> <li>- Zn <math>\leq 5</math> mg/l</li> <li>- Cr <math>\leq 0,05</math> mg/l</li> <li>- Cd <math>\leq 0,05</math> mg/l</li> <li>- Hg <math>\leq 0,002</math> mg/l</li> <li>- Pb <math>\leq 0,1</math> mg/l</li> <li>- As <math>\leq 0,1</math> mg/l</li> <li>- Cl<sub>2</sub> <math>\leq 1</math> mg/l</li> <li>- Minyak mineral <math>\leq 10</math> mg/l</li> </ul> <p>Parameter air limbah STP memenuhi bakumutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan domestic sesuai permen LH No. 05 Tahun 2014 yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="747 909 1059 1031"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Kadar paling tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>6 - 9</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>100 mg/L</td> </tr> <tr> <td>TSS</td> <td>100 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Minyak lemak</td> <td>10 mg/L</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kualitas air laut memenuhi Baku mutu air laut sesuai Kep Men LH No. 51 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air laut untuk kategori Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan temperatur <math>\leq +2</math>°C</li> <li>- TSS <math>\leq 80</math> mg/l</li> <li>- pH = 6,5 - 8,5</li> </ul>	Parameter	Kadar paling tinggi	pH	6 - 9	BOD	100 mg/L	TSS	100 mg/L	Minyak lemak	10 mg/L				
Parameter	Kadar paling tinggi																
pH	6 - 9																
BOD	100 mg/L																
TSS	100 mg/L																
Minyak lemak	10 mg/L																

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinitas &lt; +5</li> <li>- Cu ≤ 0,05 mg/l</li> <li>- Zn ≤ 0,1 mg/l</li> <li>- Cd ≤ 0,01 mg/l</li> <li>- Hg ≤ 0,003 mg/l</li> <li>- Pb ≤ 0,05 mg/l</li> <li>- Minyak lemak ≤ 5 mg/l</li> <li>- Radioaktif: <sup>210</sup>Pb, <sup>226</sup>Ra, <sup>228</sup>Ra, <sup>228</sup>Th, <sup>230</sup>Th, <sup>234</sup>Th.</li> </ul>				
III.C.	Gangguan Biota Perairan	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	<p>Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu:</p> <p>d. Plankton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,839</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,204</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,822</li> <li>• Jumlah Individu = 47</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul> <p>e. Bentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,242</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,333</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,896</li> <li>• Jumlah Individu = 8</li> <li>• Jumlah Jenis = 4</li> </ul> <p>f. Nekton</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keanekaragaman = 1,438</li> <li>• Indeks Dominansi = 0,075</li> <li>• Indeks Kemerataan = 0,971</li> <li>• Jumlah Individu = 20</li> <li>• Jumlah Jenis = 8</li> </ul>	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pengoperasian <i>jetty</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut.	Lokasi condenser, WWTP, & STP	Selama tahap operasional dimulai sejak commissioning	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
III.C.	Gangguan Produksi	Pengoperasian	Tidak terjadinya penurunan	1. Bekerjasama dengan	Di area perairan	Selama	Instansi Pelaksana:



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Perikanan	sistem penanganan limbah cair.	yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan akibat pelepasan limbah cair ke laut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>kelompok nelayan terdampak dalam rangka menjaga tingkat produksi perikanan nelayan tangkap terdampak.</li> <li>Pemasangan rumah ikan (<i>fish apartment</i>), apabila terjadi penurunan hasil tangkap atas dasar studi kelayakan.</li> </ol>	terdampak diluar area. perairan terminal khusus	pengoperasian sistem penanganan limbah cair berlangsung.	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jcpara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
III.C.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair ditanggapi</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah cair</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan</li> </ol>	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Selama kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

f

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				yang terkait (pemrakasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			
<b>III.D Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat</b>							
III.D.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Konsentrasi debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , CO dan NO <sub>2</sub> tidak melebihi baku mutu 1. kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : a. debu ≤ 230 µg/Nm <sup>3</sup> b. CO ≤ 10.000 µg/Nm <sup>3</sup> c. NO <sub>2</sub> ≤ 150 µg/Nm <sup>3</sup> d. PM <sub>10</sub> ≤ 150 µg/Nm <sup>3</sup> e. PM <sub>2,5</sub> ≤ 65 µg/Nm <sup>3</sup>	1. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 2. Menggunakan kendaraan pengangkut yang dilengkapi hasil uji emisi	1. Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 2. Kendaraan pengangkut	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.D.	Peningkatan Kebisingan	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut <i>Fly Ash/ Bottom Ash</i> maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) yang berada di dalam batas wilayah studi.	Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.D.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ada kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakasa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakasa, masyarakat, dan pemerintah daerah	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			3. padat ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat	2. setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			melalui BLH Jawa Tengah
<b>III.E Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap</b>							
III.E.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	1. Parameter kualitas udara emisi cerobong memenuhi baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak sesuai baku mutu Per Men LH No. 21 Tahun 2008, yaitu: a. Total partikel $\leq 100$ mg/Nm <sup>3</sup> b. SO <sub>2</sub> $\leq 750$ mg/Nm <sup>3</sup> c. NO <sub>2</sub> $\leq 750$ mg/Nm <sup>3</sup> d. Opaasitas $\leq 20\%$ 2. Parameter kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001 yaitu: a. SO <sub>2</sub> $\leq 365$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup> b. NO <sub>2</sub> $\leq 150$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup> c. debu $\leq 230$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup> d. PM <sub>10</sub> $\leq 150$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup> e. PM <sub>2,5</sub> $\leq 65$ $\mu$ g/Nm <sup>3</sup>	1. Desain cerobong dibangun dengan ketinggian 240 meter 2. Mengoperasikan fasilitas <i>Electrostatic Precipitator</i> (EP) 3. Mengoperasikan fasilitas <i>Flue Gas Desulfurization</i> (FGD) 4. Mengoperasikan fasilitas <i>Low NOx Burner</i> . 5. Melakukan pemeliharaan secara berkala pada seluruh peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat	1. Lokasi cerobong Unit 5&6 2. Fasilitas EP 3. Fasilitas FGD 4. Unit Boiler 5. Lokasi cerobong Unit 5&6 dan Lokasi <i>Power Block</i>	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III.E.	Peningkatan	Pengoperasian dan	Tingkat kebisingan lebih	1. Memasang <i>silencer</i> pada	1. Fasilitas-fasilitas	1. Selama kegiatan	Instansi Pelaksana:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Kebisingan	pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap	kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	<p>fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (Boiler, generator, pompa-pompa, Power House, Pulverizer, dan Konveyor).</p> <p>2. Menanam dan merawat tanaman-tanaman yang dapat mengurangi bising di sekeliling Unit 5&amp;6</p>	<p>yang menimbulkan bising.</p> <p>2. Di dalam batas wilayah PLTU Tanjung Jati B Unit 5&amp;6</p>	<p>pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.</p> <p>2. Penanaman sekali sebelum operasi dan dapat ditambah jika diperlukan. Perawatan dilakukan setiap hari</p>	<p>PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
III.E.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengoperasian Pemeliharaan Pembangkit Utama dan pelengkap	<p>Kualitas air bahang memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal, untuk Air Limbah yang dihasilkan dari kondensor, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu <math>\leq 40</math> °C</li> <li>- Klorin bebas (Cl<sub>2</sub>) <math>\leq 0,5</math></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelolaan limbah bahang dengan mengalirkan limbah bahang dari kondensor ke <i>Aeration Basin</i>, dan selanjutnya ke kanal.</li> <li>2. Pemeliharaan berkala pada Kolam Aerasi dan kanal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Kolam Aerasi dan Kanal</li> <li>2. Lokasi Kolam Aerasi dan Kanal</li> </ol>	Selama kegiatan operasional PLTU Unit 5&6.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <p>PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> <li>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> <li>3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
III.E.	Peningkatan Kepadatan Lalu Lintas	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkendalinya volume lalu lintas dengan nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) <math>\leq 1</math> dan tundaan simpang rata-rata <math>\leq 30</math> smp/menit (MKJI, 1997)</li> <li>2. Terciptanya koordinasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi proyek untuk tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam-jam sibuk (<i>peak hour</i>)</li> <li>2. Melakukan koordinasi</li> </ol>	Jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan - PLTU)	Satu kali Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <p>PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			antara pemrakarsa dan instansi terkait dalam pemeliharaan infrastruktur jalan 3. Rendahnya tingkat kecelakaan akibat kesalahan sopir truk pengangkut	dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memberikan <i>Defensive Safety Driving</i> kepada sopir truk pengangkut alat dan bahan untuk tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas saat melakukan kegiatan pengangkutan			3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Polres Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah,
III.E.	Terciptanya Peluang Usaha	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	1. Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. 2. Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. 3. Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat.	Desa Tubanan Kecamatan Kembang,	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Selama kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap ditanggapi</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.</p>	<p>yang terkait (pemerakrsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p> <p>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</p> <p>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemerakrsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemerakrsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p>			<p>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>
III.E.	Gangguan Kesehatan	Peningkatan TSP, NO <sub>2</sub> , dan SO <sub>2</sub> akibat Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, dan penyakit <i>pneumokoniosis</i> pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangkit utama dan pelengkap (wilayah studi meliputi Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara)	<p>1. Pengoperasian secara optimal alat pengendali emisi, seperti ESP, FGD, dan Low NOx Burner.</p> <p>2. Meminimalisasi penebangan vegetasi/pohon dengan mempertahankan pohon yang telah ada, khususnya di area yang tidak terkena bangunan</p> <p>3. Bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu</p> <p>4. Bekerja sama dengan Puskesmas untuk</p>	<p>1. Lokasi tapak proyek</p> <p>2. Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak yang tinggal di: Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,</p>	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				melakukan deteksi dini dan pemeriksaan ISPA serta upaya pencegahan penyakit <i>pneumokoniosis</i> akibat debu batubara yang ditimbulkan oleh kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap serta kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan			
DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA							
(PENGELOLAAN LINGKUNGANNYA TELAH DIRENCANAKAN SEJAK AWAL SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA KEGIATAN ATAU MENGACU SOP, PANDUAN PEMERINTAH, DAN LAIN-LAIN)							
<b>I. TAHAP KONSTRUKSI</b>							
I.1.	Terciptanya Peluang Berusaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi</li> <li>Penerimaan tenaga kerja operasi</li> </ol>	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja.	Memberikan bantuan teknis (antara lain pelatihan wirausaha) bagi masyarakat terdampak, khususnya masyarakat yang terganggu akibat kegiatan tahap konstruksi	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang	Selama tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
I.2.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya</li> <li>Pembangunan bangunan Non - Teknis</li> </ol>	Ketinggian muka air tanah di sumur warga tidak menurun secara drastis	Menggunakan air tanah dalam dengan kedalaman sumur 120 – 135 m	Lokasi sumur pada saat konstruksi	Selama konstruksi bangunan utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya serta Bangunan Non-Teknis	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, dan ESDM Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.3.	Kondisi Fisik Jalan (Kerusakan Jalan)	1. Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan – Material 2. <i>Commissioning</i>	Minimnya kerusakan jalan akibat aktivitas mobilisasi pengangkutan alat dan material pembangunan PLTU unit 5 dan 6	1. Pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut 2. Melewatkan kendaraan pengangkutan sesuai kelas jalan yang ditentukan dan hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	Saat kegiatan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas Institusi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.  Institusi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.4.	Timbulan Limbah B3 : a. sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) b. Sumber spesifik : - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sludge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Kegiatan <i>Commissioning</i>	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	1. Sumber tidak spesifik : a. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Sumber spesifik : a. Menyediakan Silo sebagai	- Tempat penyimpanan limbah B3, - Silo Fly ash dan Bottom ash - <i>Sludge bunker</i>	Selama tahap <i>Commissioning</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat penyimpanan fly ash dan bottom ash, serta <i>sludge bunker</i> untuk penyimpanan <i>sludge</i> IPAL</li> <li>b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari</li> <li>c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014.</li> <li>d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</li> </ul>			
I.5.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Aktivitas pembangunan <i>Jetty</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i></li> <li>2. Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut karena pembangunan <i>Jetty</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (tanda peringatan bahwa di kawasan tersebut ada kegiatan pembangunan) di sepanjang <i>Jetty</i></li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan</li> </ul>	Daerah perairan di sekitar lokasi kegiatan	Selama kegiatan konstruksi <i>Jetty</i> berlangsung	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara</li> <li>3. BLH Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> Institusi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				koordinasi bersama nelayan serta melibatkan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian jetty			
I.6.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Lay Down Area</li> <li>Commissioning</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi terhadap akibat kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Lay Down Area</li> <li>Commissioning</li> </ol> </li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Lay Down Area.</li> <li>Commissioning</li> </ol> </li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Lay Down Area.</li> <li>Commissioning</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pemanfaatan Laydown area, Commissioning dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</li> <li>Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>Melakukan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak dari semua</li> </ol>	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Selama kegiatan berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dampak teknis yang muncul dari kegiatan			
I.7.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Jalan Akses.</li> <li>2. Pengerukan (<i>Dredging</i>).</li> <li>3. Dumping.</li> <li>4. Pembangunan Jetty.</li> <li>5. Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>.</li> <li>6. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya</li> <li>7. Pembangunan bangunan Non - Teknis.</li> <li>8. Pembangunan Ash Disposal Area.</li> <li>9. <i>Commissioning</i></li> </ol>	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan.</li> <li>2. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan.</li> <li>3. Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya.</li> <li>4. Menyediakan fasilitas P3K kit.</li> <li>5. Menyediakan pos kesehatan.</li> <li>6. Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan.</li> <li>7. Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)</li> <li>8. Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada safety induction (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU).</li> <li>9. Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan.</li> <li>10. Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan.</li> <li>11. Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan.</li> </ol>	Lokasi tapak proyek dan seluruh pekerja.	<p>Dilakukan selama masa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Jalan Akses.</li> <li>2. Pengerukan (<i>Dredging</i>).</li> <li>3. <i>Dumping</i>.</li> <li>4. Pembangunan Jetty.</li> <li>5. Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>.</li> <li>6. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya.</li> <li>7. Pembangunan bangunan Non - Teknis.</li> <li>8. Pembangunan Ash Disposal Area.</li> <li>9. <i>Commissioning</i></li> </ol>	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
I.8.	Perubahan sedimentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivitas <i>Dredging</i></li> </ol>	Kondisi bathimetri bagian dasar perairan tidak	Penggunaan teknologi ramah lingkungan antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi <i>Dredging</i>. a. Kolam labuh</li> </ol>	Selama tahap	InstansiPelaksana: PT. Bumi Jati Power

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	ikawasan perairan Tanjung Jati terkait faktor oseanografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aktivitas <i>Dumping</i></li> <li>3. Aktivitas Pembangunan <i>Jetty</i></li> <li>4. Aktivitas pembangunan <i>water intake</i> dan <i>outfall</i></li> </ol>	mengalami perubahan secara signifikan baik yang mengalami pendangkalan maupun yang tererosi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan <i>dredging</i> akan dilakukan dengan mengoperasikan <i>cutter suction dredger</i> selama kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan material sedimen dasar perairan untuk meminimalisir penyebaran TSS.</li> <li>2. Kegiatan <i>dumping (pembuangan)</i> akan menggunakan kapal-kapal pengangkut material <i>dumping Hopper</i> tipe <i>Bottom Door</i> selama kegiatan pembuangan, untuk meminimalisir penyebaran TSS. Pemasangan silt screen akan dilakukan di sekeliling hopper barge saat konsentrasi TSS pada radius 50 m dari lokasi pelaksanaan <i>dumping</i> melebihi baku mutu yang diakibatkan oleh pelaksanaan <i>Dumping</i>.</li> <li>3. Pembangunan <i>jetty</i> telah didesain ramah lingkungan dengan menggunakan <i>open pile</i> dimana pada saat pemasangan <i>open pile</i> menggunakan <i>hammer pile</i> diperkirakan tidak akan mempengaruhi pola pergerakan arus, gelombang dan tidak mengaduk dasar perairan.</li> <li>4. Pembangunan <i>water intake</i> akan dilakukan dengan memasang pipa <i>water intake</i> dengan menurunkan pipa per <i>section</i> menggunakan <i>crane barge</i>, sehingga diperkirakan tidak akan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. <i>Jetty</i></li> <li>c. <i>Temporary Jetty</i> untuk konstruksi <i>Jetty</i></li> <li>d. <i>Temporary Jetty</i> untuk konstruksi <i>Water Intake</i></li> <li>e. <i>Outfall</i></li> <li>f. <i>Area Intake</i></li> <li>g. <i>Unloading ramp</i></li> <li>2. Lokasi <i>Dumping</i> Laut</li> <li>3. Lokasi Pembangunan <i>Jetty</i></li> <li>4. Lokasi Pembangunan <i>Jetty</i> Lokasi Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i></li> </ol>	konstruksi.	<p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Kabupaten Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				menyebabkan perubahan sedimentasi di area sekitar pembangunan <i>water intake</i> . Bangunan <i>water intake</i> di bawah dasar laut sudah merupakan bangunan terbaik (alternatif teknologi terbaik)			
<b>II. TAHAP OPERASI</b>							
II.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	Tingkat konsentrasi debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , CO dan NO <sub>2</sub> tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : 1. debu ≤ 230 µg/Nm <sup>3</sup> 2. CO ≤ 10.000 µg/Nm <sup>3</sup> 3. NO <sub>2</sub> ≤ 150 µg/Nm <sup>3</sup> 4. PM <sub>10</sub> ≤ 150 µg/m <sup>3</sup> 5. PM <sub>2,5</sub> ≤ 65 µg/m <sup>3</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan dan pengoperasian <i>Water Cannon Dust Suppression System</i> di <i>Coal Yard</i> dengan prosedur sesuai SOP yang berlaku</li> <li>2. <i>Coal Yard</i> dilengkapi dengan barrier, untuk mencegah kelongsoran partikel batu bara</li> <li>3. <i>Belt Conveyor</i> akan dilengkapi dengan cover / penutup.</li> <li>4. Meletakkan sludge dari <i>Coal Run Off</i> pada bagian atas tumpukan agar kadar air (<i>moisture content</i>) batubara meningkat</li> <li>5. Penanaman tanaman pada batas <i>coal yard</i> dan permukiman penduduk, sehingga dapat mengurangi sebaran debu batu bara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Coal yard</i></li> <li>2. <i>Coal Yard</i></li> <li>3. <i>Conveyor</i></li> <li>4. <i>Coal Yard</i></li> <li>5. <i>Area batas coal yard</i></li> </ol>	Sekali sebelum operasional PLTU	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.2.	Meningkatnya kebauan	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	Tidak timbulnya bau yang diakibatkan oleh self combustion	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pencegahan terhadap <i>self combustion</i> batubara sesuai SOP</li> <li>2. Pengoperasian <i>Water Cannon Dust Suppression System</i> di <i>Coal Yard</i></li> </ol>	Di lokasi <i>Coal Yard</i>	Selama tahap operasi PLTU	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.3.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Penanganan batubara yaitu pada saat penumpukan batubara	Kualitas air tanah memenuhi Baku Mutu sesuai dengan PerMenKes No. Kep.416/MENKES/Per/IX/90 untuk parameter : 1. TDS $\leq$ 1.500 mg/l 2. Kekeruhan $\leq$ 25 NTU 3. pH = 6,5 - 9,0 4. Fe $\leq$ 1 mg/l 5. Mn $\leq$ 0,5 mg/l 6. Klorida $\leq$ 600 mg/l 7. Keadahan $\leq$ 500 mg/l	1. Pengoperasian Kolam penampung ( <i>Coal Run Off Pond</i> ) 2. Lapisan dasar coal Yard memenuhi nilai permeabilitas $\leq 10^{-7}$ , sehingga leachate tidak menembus lapisan bawah tanah yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah sekitar PLTU TJB. 3. Pengoperasian sistem pembuangan leachate menuju drainase dari Coal Yard menuju WWTP Coal Run Off Water 4. Perawatan secara berkala pada tempat penimbunan, kolam penampungan dan saluran pembuangan	1. Lokasi <i>Coal Yard</i> 2. Lokasi <i>Coal Yard</i> 3. Lokasi <i>Coal Yard</i> dan WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i> 4. Lokasi <i>Coal Yard</i>	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan bahan bakar berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 6. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.4.	Kualitas udara ambien	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat (terhadap sisa <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> yang tidak tertampung di Silo).	Konsentrasi debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : 1. debu $\leq$ 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 2. PM <sub>10</sub> $\leq$ 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 3. PM <sub>2,5</sub> $\leq$ 65 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	1. Melakukan penyiraman dan pemadatan limbah padat ( <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> ) yang dibuang ke <i>Ash Yard</i> 2. Pembuatan pagar penutup <i>Ash Yard</i> dilengkapi dengan barrier	1. Lokasi <i>Ash yard</i> 2. Lokasi <i>Ash Yard</i>	Selama operasional PLTU	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.5.	Penurunan kualitas air tanah	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat	Parameter kualitas air tanah memenuhi baku mutu kualitas air tanah berdasarkan Permenkes sesuai Kep.416/MENKES/Per/IX/90, yaitu : 1. TDS $\leq$ 1.500 mg/l 2. Kekeruhan $\leq$ 25 NTU 3. pH = 6,5 - 9,0	1. Desain konstruksi fasilitas <i>Landfill</i> untuk <i>Ash Disposol</i> area akan mengacu pada KepKa Bapedal Nomor KEP 04/BAPEDAL/09/ 1995 2. Dilengkapi dengan sumur pemantau kebocoran ( <i>leak detection well</i> )	1. Lokasi <i>Landfill</i> 2. Sumur pantau	Sekali sebelum operasional <i>Ash Yard</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			4. Fe ≤ 1 mg/l 5. Mn ≤ 0,5 mg/l 6. Klorida ≤ 600 mg/l 7. Kesadahan ≤ 500 mg/l				Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.6.	Kondisi jalan (kerusakan jalan)	1. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Dahan Pembantu 2. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Minimnya kerusakan jalan akibat aktivitas operasional PLTU unit 5 dan 6	1. Pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut 2. Melewatkan kendaraan pengangkutan sesuai kelas jalan yang ditentukan dan hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	selama kegiatan operasional	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas Institusi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah. Institusi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.7.	Timbulan Limbah B3 : c. sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) d. Sumber spesifik : - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sludge IPAL	Pengoperasian Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	1. Sumber tidak spesifik : a. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014. b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Sumber spesifik : a. Menyediakan Silo sebagai	1. Tempat penyimpanan limbah B3 2. Silo Fly Ash dan Bottom Ash 3. Sludge Bunker penyimpanan sludge IPAL	Selama tahap operasi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat penyimpanan fly ash dan bottom ash</li> <li>b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari.</li> <li>c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014.</li> <li>d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</li> </ul>			
II.8.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Pengoperasian Jetty	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pengoperasian Jetty</li> <li>2. Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut akibat pengoperasian Jetty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara transparan rencana kegiatan pengoperasian Jetty dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</li> <li>2. Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (tanda peringatan bahwa di kawasan tersebut ada kegiatan operasional) di sepanjang Jetty</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama nelayan serta melibatkan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pemberitahuan</li> </ul>	Daerah perairan Tanjung Jati sesuai batas izin terminal khusus.	Selama Pengoperasian Jetty berlangsung	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> Institusi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ul>



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian jetty			
II.9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoperasian Jetty.</li> <li>2. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu.</li> <li>3. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar.</li> <li>4. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair.</li> <li>5. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat.</li> <li>6. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap.</li> </ol>	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan.</li> <li>2. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan</li> <li>3. Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya.</li> <li>4. Menyediakan fasilitas P3K Ibt.</li> <li>5. Menyediakan pos kesehatan.</li> <li>6. Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan.</li> <li>7. Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan hari tua dan dana pensiun).</li> <li>8. Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada safety induction (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU).</li> <li>9. Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan.</li> <li>10. Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan.</li> <li>11. Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan.</li> </ol>	Lokasi tapak proyek dan seluruh pekerja.	Selama masa operasi PLTU.	Institusi Pelaksana PT. Bhumi Jati Power Institusi Pengawas <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Jepara</li> <li>2. BLH Kabupaten Jepara</li> <li>3. BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol> Institusi Penerima Laporan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.10.	Perubahan garis pantai (abrasi dan	Pengoperasian Jetty	1. Terhambatnya laju abrasi ataupun akresi.	1. Struktur jetty dengan menggunakan tiang pancang	1. Lokasi pembangunan Jetty	1. Pada saat konstruksi Jetty	InstansiPelaksana: PT. Bhumi Jati Power

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	akresi)		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak adanya perubahan garis pantai minimal pada daerah-daerah yang belum terabrasi.</li> <li>3. Bangunan yang berada ditepi daratan maupun kawasan daratan yang berdekatan dengan garis pantai tidak mengalami pengikisan.</li> <li>4. Tidak terjadi erosi akibat refraksi energi muka gelombang.</li> </ol>	<p>(<i>open pile</i>) tidak akan mengganggu pola pergerakan arus dan gelombang. Dengan demikian, struktur <i>jetty</i> diperkirakan hanya akan mengubah pola sedimentasi secara lokal di sekitar area <i>jetty</i> ataupun tiang pancang (<i>open pile</i>), tanpa merubah pola arus ataupun gelombang dikarenakan bangunan berupa <i>open pile</i> mengakibatkan arus dan gelombang masih bisa masuk.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan studi potensi dan penanggulangan abrasi.</li> <li>3. Melakukan penanganan terhadap abrasi/erosi sesuai hasil studi potensi dan penanganan abrasi pada point (2) di atas. Antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekayasa teknik contohnya pembuatan slope protection, breakwater, sea wall, groin, dan/atau</li> <li>b. Perlindungan alami contohnya penanaman mangrove, penanaman Pandanus sp (Pandan Laut), dan/atau Calophyllum sp (Nyamplung)</li> </ol> </li> <li>4. Melakukan pemasangan Bench Mark (BM) masing-masing sebanyak 4 titik pada sisi kiri dan kanan PLTU Tanjung Jati yang masing-masing berjarak ±150 m dan sepanjang garis pantai yang diketahui koordinat dan elevasinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pantai dan perairan Tanjung Jati</li> <li>3. Pantai dan perairan Tanjung Jati</li> <li>4. Pada 4 titik pada sisi kiri dan kanan PLTU Tanjung Jati yang masing-masing berjarak ±150 m dan sepanjang garis pantai yang diketahui koordinat dan elevasinya: untuk pemasangan BM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sekali pada saat operasi dan dapat ditambah jika diperlukan.</li> <li>3. Sekali pada saat operasi dan dapat ditambah jika diperlukan.</li> <li>4. Sekali sebelum Jetty selesai dibangun.</li> </ol>	<p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Kabupaten Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

## B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
<b>DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU BERDASARKAN HASIL ARAHAN PENGELOLAAN PADA ANDAL</b>									
<b>I. TAHAP PRAKONSTRUKSI</b>									
<b>I.A. Penyediaan Lahan</b>									
I.A.1.	Gangguan Proses Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan.</li> <li>Berkurangnya kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan</li> <li>Tercapai kesepakatan harga jual dan/atau sewa tanah dengan warga pemilik tanah yang diwujudkan dalam bentuk transaksi</li> </ol>	Pembebasan lahan	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap pemilik lahan yang dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar tanah yang sudah dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power</li> <li>Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</li> </ol> </li> </ol>	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang atau lokasi lain yang disepakati para pihak.	Enam bulan sekali pada saat pembebasan lahan berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BPN atau Kantor Pertanahan Jepara</li> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
I.A.2.	Perubahan Persepsi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan</li> </ol>	Pembebasan lahan	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan</li> </ol>	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang atau lokasi lain yang disepakati para pihak.	Enam bulan sekali pada pembebasan	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		<p>memahami sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW).</p> <p>5. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi</p> <p>6. Peningkatan persepsi positif masyarakat yang lahannya terkena poyek pembangunan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW) dengan tercapainya kesepakatan harga jual lahan</p>		<p>metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap pemilik lahan yang dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa :</p> <p>a. Daftar tanah yang sudah dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power</p> <p>b. Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</p> <p>Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data . Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan</p>		lahan berlangsung		<p>Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Jepara</p> <p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
I.B.	PENERIMAAN TENAGA KERJA								
I.B.1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan rekrutmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga	Penerimaan tenaga kerja Konstruksi	Metode : Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima.	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara	Enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		2. kerja tahap konstruksi Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap konstruksi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.		Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.				3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	
I.B.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	1. Upah terendah yang diterima minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). 2. Pendapatan masyarakat terdampak yang bekerja pada proyek meningkat	Penerimaan tenaga kerja Konstruksi	Metode : Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi . Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan pendapatan sebelum adanya kegiatan.	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo) Kabupaten Jepara.	Enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
I.B.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami	Penerimaan tenaga kerja konstruksi	Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan Desa Jerukwangi,	Enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power,	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan														
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan												
		<p>sosialisasi kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi</p> <p>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi</p>		<p>dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima.</p> <p>Alat : Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa data keluhan yang masuk dalam kotak saran</p>	Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo) Kabupaten Jepara.			<p>Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>												
II. TAHAP KONSTRUKSI																					
II.A. MOBILISASI – DEMOBILISASI PERALATAN/MATERIAL																					
II.A.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien.	Parameter Debu, CO dan NO <sub>2</sub> .	Kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material pada tahap konstruksi	<p>1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan:</p> <p>a. Penutupan bak kendaraan pengangkut material,</p> <p>b. Pembersihan ceceran material,</p> <p>c. Pembersihan roda kendaraan pengangkut yang keluar dari tapak</p>	<p>1. Di jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek.</p> <p>2. Diujung jalan Tubanan-Wedelan</p> <p>3. Kantor PLTU Tanjung Jati</p> <p>4. Titik pantau sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QU6</td> <td>110°45'00,0"</td> <td>06°28'25,8"</td> </tr> <tr> <td>QU7</td> <td>110°46'54,2"</td> <td>06°30'46,0"</td> </tr> <tr> <td>QU12</td> <td>110°44'25,4"</td> <td>06°27'04,0"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QU6	110°45'00,0"	06°28'25,8"	QU7	110°46'54,2"	06°30'46,0"	QU12	110°44'25,4"	06°27'04,0"	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
KODE	BT	LS																			
QU6	110°45'00,0"	06°28'25,8"																			
QU7	110°46'54,2"	06°30'46,0"																			
QU12	110°44'25,4"	06°27'04,0"																			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan														
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan												
				proyek, 2. Pemasangan rambu lalu lintas pembatasan kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 3. Pemeriksaan dokumen hasil uji emisi. 4. Pengukuran kualitas udara ambien: Metode: Sampling dan analisis kualitas udara ambien sesuai SNI, yaitu debu (SNI 19-79119.3:2005), CO (SNI 19-7119.10-2011), dan NO <sub>2</sub> (SNI 19-7119.10-2011). Durasi pengumpulan data: 24 jam	Ket: a. Kode QU6 : Dk. Kalibedah, Ds. Kaliaman RT. 01/RW. 03, Kec. Kembang b. Kode QU7 : Lokasi pada ±200 dari pertigaan Wedelan Jin. Raya PLTU Ds. Wedelan, Kec. Bangsri c. Kode QU12 : Di depan Main Gate, Dukuh Sekuping																
II.A.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang – malam (Lsm) di pemukiman	Kegiatan mobilisasi-demobilisasi peralatan/material	1. Pengamatan langsung terhadap pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut sebesar maksimal 40 km/jam dan adanya rambu lalu lintas maksimum 40 km/jam 2. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di	1. Di jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek. 2. Pengukuran di lokasi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-04</td> <td>110° 44' 34,2"</td> <td>6° 27' 01,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-06</td> <td>110° 45' 00,0"</td> <td>6° 28' 25,6"</td> </tr> <tr> <td>BIS-07</td> <td>110° 46' 57,2"</td> <td>6° 30' 53,5"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"	BIS-06	110° 45' 00,0"	6° 28' 25,6"	BIS-07	110° 46' 57,2"	6° 30' 53,5"	Enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan/material	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																			
BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"																			
BIS-06	110° 45' 00,0"	6° 28' 25,6"																			
BIS-07	110° 46' 57,2"	6° 30' 53,5"																			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>permutkiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan.</p> <p>Alat: Sound Level Meter</p> <p>Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7</p> <p>Analisa data: <math>L_{EM} = 10 \log 1/24</math> <math>( 16.10^{0,115} + \dots + 8.10^{0,116} ) \text{ dB (A)}</math></p>					
II.A.3.	Peningkatan Kepadatan Lalu lintas	Nilai Derajat Kejenuhan (DS), (V/C rasio) dan tundaan simpang rata-rata	Kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan/material yang akan meningkatkan volume lalu lintas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengatur kendaraan dan rambu-rambu</li> <li>Waktu pengangkutan alat berat dan pengangkutan material</li> <li>Pelaksanaan <i>Defensive Safety Driving</i></li> </ol> </li> <li>Pengukuran kepadatan lalu lintas: Metode : <i>Survey traffic counting</i> (pencacahan arus lalu lintas) Alat : <ol style="list-style-type: none"> <li>form bentuk pengelolaan yang akan dilakukan</li> <li>Form survey traffic counting</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pengamatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Jalan akses keluar masuk PLTU</li> <li>Simpang Wedelan – PLTU)</li> <li>Kantor</li> </ol> </li> <li>Lokasi pengukuran kepadatan lalu lintas: <ol style="list-style-type: none"> <li>ruas Jalan Lokal Wedelan – Tubanan (PLTU)</li> <li>simpang tak bersinyal Kaliaman</li> <li>simpang tak bersinyal Tubanan</li> <li>simpang tak bersinyal Wedelan</li> </ol> </li> </ol>	Enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan/material	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Polres Jepara</li> <li>DBMP ESDM Kabupaten Jepara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>Teknik Sampling: Observasi dan pencatatan kendaraan pada jam-jam sibuk masyarakat</p> <p>Analisis Data : Hasil deskriptif dan kuantitatif mengenai tingkat kepadatan lalu lintas dengan penentuan volume kendaraan dan kapasitas jalan</p>					
II.A.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material dengan memanfaatkan media komunikasi, terutama dalam pertemuan PT. Bhumi Jati Power dan pemangku kepentingan yang terkait</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak akibat kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan dan material ditanggapi</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait gangguan kualitas udara dan</li> </ol>	Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/Material	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima.</li> </ol> <p>Alat : Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data sekunder berupa : Data keluhan yang</li> </ol>	Desa di sekitar jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – Tubanan – Kaliaman – Kancilan - PLTU)	Enam bulan sekali selama Mobilisasi demobilisasi Peralatan/Material	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah,</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		kebisingan, gangguan lalu lintas dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material. 4. Jika terjadi kerugian fisik dan material dapat tercapai kesepakatan penggantian kepada warga terdampak sesuai peraturan/hukum yang berlaku.		masuk dalam kotak saran					
II.A.5.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian Penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas.	Peningkatan debu dari adanya Kegiatan Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/material	Metode : 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) . 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan Alat : 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling : Purposive random sampling Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan	1. Puskesmas Kecamatan kembang, Puskesmas Kecamatan Bangsri, Puskesmas Kecamatan Mlonggo, 2. masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek, 3. titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara 4. Lokasi proyek	Enam bulan sekali selama mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati JeparamelaluiBLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melaluiBLH Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan</p> <p>3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajangan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan</p> <p>4. Pengamatan langsung terhadap;</p> <p>a) pelaksanaan penutupan truk pengangkut material dengan terpal untuk mengurangi penyebaran debu ketika mobilisasi material</p> <p>b) Pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman tumpukan material secara berkala khususnya saat musim kemarau.</p> <p>c) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang ventilasi rumah yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan											
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan									
				mencegah debu														
<b>II.B.</b>	<b>PEMANFAATAN AREA LAY DOWN</b>																	
II.B.1.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang-malam (Lsm) di permukiman	Pemanfaatan area <i>Lay Down</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap : Fungsi dan keberadaan pagar penutup</li> <li>Waktu pelaksanaan kegiatan menimbulkan bising</li> <li>Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: <math>L_{SM} = 10 \log 1/24 (16.10^{0.115} + \dots + 8.10^{0.115}) \text{ dB (A)}</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan dilakukan di: a. Sekeliling area Lay down b. Area Lay Down</li> <li>Pengukuran dilakukan di:  <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-02</td> <td>110° 45' 24,9"</td> <td>6° 26' 57,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-01</td> <td>110° 44' 48,7"</td> <td>6° 27' 09,8"</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	KODE	BT	LH	BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"	BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,8"	Waktu pagi, siang, sore dan malam (sesuai KepMen LH 48 Tahun 1996) dengan frekuensi enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LH																
BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"																
BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,8"																
<b>II.C.</b>	<b>PENGERUKAN (DREDGING)</b>																	
II.C.1.	Kualitas air laut	Konsentrasi TSS, kecerahan dan lapisan minyak pada area dengan radius 50 m dari lokasi pelaksanaan <i>dredging</i> .	Pengerukan untuk rencana Jetty, kolam labuh, <i>Water Intake</i> , <i>Outfall</i> , <i>Unloading Ramp</i> , dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Penggunaan alat keruk sesuai kondisi sedimen b. Penggunaan alat angkut untuk mengangkut hasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan di lokasi <i>dredging</i> dan area sekitar pelaksanaan <i>dredging</i></li> <li>Titik pantau kualitas air pada lokasi : Area di luar lokasi pelaksanaan <i>dredging</i> pada radius 50 m sesuai arah arus (2 titik).</li> </ol>	Enam bulan sekali selama kegiatan <i>dredging</i> .	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Kelautan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>									

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan																							
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																					
			<i>Temporary Jetty.</i>	keruk c. Penambahan <i>oil absorbent</i> pada saat terjadi ceceran minyak pada perairan dari peralatan 2. Sampling kualitas air laut dengan: Metode pengambilan sampel dan analisis data Kecerahan menggunakan Secchi Disk, TSS menggunakan SNI 06-6989.3-2004; Lapisan minyak menggunakan SNI 06-6989.10-2004.				dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 5. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara																						
II.C.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas plankton, benthos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Pengerukan ( <i>dredging</i> )	1. Pengukuran struktur komunitas plankton, benthos, dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton. 2) Pengambilan sampel benthos. 3) Pengambilan sampel nekton. Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm. 2) Ekman grab. 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan. Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton	1. Pengukuran struktur komunitas plankton, benthos dan nekton di: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB-04</td> <td>110°43' 11,48"</td> <td>6°25'59,69"</td> </tr> <tr> <td>PB-05</td> <td>110°43' 48,4"</td> <td>6°26'25,5"</td> </tr> <tr> <td>PB-07</td> <td>110°44' 45,13"</td> <td>6°25'58,36"</td> </tr> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'35,5"</td> <td>06°25'22,4"</td> </tr> <tr> <td>NEC06</td> <td>110°42'14,3"</td> <td>06°24'35,1"</td> </tr> <tr> <td>NEC07</td> <td>110°45'11,6"</td> <td>06°23'12,9"</td> </tr> </tbody> </table> 2. Lokasi <i>fish apartement</i> . 3. Lokasi <i>fish apartement</i>	KODE	BT	LS	PB-04	110°43' 11,48"	6°25'59,69"	PB-05	110°43' 48,4"	6°26'25,5"	PB-07	110°44' 45,13"	6°25'58,36"	NEC05	110°42'35,5"	06°25'22,4"	NEC06	110°42'14,3"	06°24'35,1"	NEC07	110°45'11,6"	06°23'12,9"	enam bulan sekali selama tahap konstruksi pasca dredging yang mewakili musim timur dan musim barat	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																												
PB-04	110°43' 11,48"	6°25'59,69"																												
PB-05	110°43' 48,4"	6°26'25,5"																												
PB-07	110°44' 45,13"	6°25'58,36"																												
NEC05	110°42'35,5"	06°25'22,4"																												
NEC06	110°42'14,3"	06°24'35,1"																												
NEC07	110°45'11,6"	06°23'12,9"																												

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>dan bentos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan</p> <p>2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan</p> <p>2. Pengukuran struktur komunitas nekton dengan: Metode: Pengambilan sampel nekton. Alat: Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan. Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan</p> <p>3. Pengamatan kondisi fisik <i>fish apartment</i>: a. Keutuhan</p>					

11

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				konstruksi b. Adanya sampah yang tersangkut					
II.C.3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat Nelayan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produksi perikanan (besarnya <i>Catch Per Unit Effort</i>),</li> <li>Tingkat pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) nelayan tangkap.</li> </ol>	Pengerukan ( <i>Dredging</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil studi kelayakan untuk penentuan pemasangan rumah ikan (<i>fish apartment</i>)</li> <li>Pelaksanaan kerjasama dengan kelompok nelayan terdampak.</li> </ol> </li> <li>Survei sosial ekonomi masyarakat nelayan terdampak dengan: <p>Metode : Membandingkan Jumlah produksi perikanan dan tingkat pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) sebelum dan sesudah kegiatan</p> <p>Alat : Kuesioner dan wawancara serta data sekunder dari TPI terdekat</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling</p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pengambilan data primer TPI yang terdapat di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang dan Desa Bondo, Kecamatan Bangsri.</li> <li>Lokasi pengambilan data sekunder di BPS, dan DKP Kabupaten Jepara.</li> </ol>	Enam bulan sekali selama Pengerukan ( <i>Dredging</i> ) berlan gsung	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan LingkunganHidup Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Menganalisa data pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan dengan indikator perubahan CPUE (Catch Per Unit Effort).					
II.C.4.	Gangguan Proses Sosial/ keresahan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan (Dredging)</li> <li>Hilangnya kekhawatiran/ keresahan akan berkurangnya hasil tangkapan ikan dan pekerjaan</li> </ol>	Pengerukan (Dredging)	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung.</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar perolehan hasil tangkapan ikan</li> <li>Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</li> </ol> </li> </ol> <p>Alat : Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Dredging</p>	Desa Tubanan dan Desa Balong Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri.	Enam bulan sekali selama Pengerukan (Dredging) berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.C.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan <i>Dredging</i> pada pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 &amp; 6 (2 x 1.070 MW)</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan pengerukan (<i>Dredging</i>) ditanggapi</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan pengerukan (<i>Dredging</i>)</li> </ol>	Pengerukan ( <i>Dredging</i> )	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung.</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa : Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</li> </ol> <p>Alat :</p> <p>Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan <i>Dredging</i></p>	Desa Tubanan dan Desa Balong Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri.	Enam bulan sekali selama Pengerukan ( <i>Dredging</i> )berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.D.	<b>DUMPING</b>								
II.D.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Konsentrasi TSS, Kecerahan, dan Lapisan minyak.	<i>Dumping</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan peralatan <i>dumping</i></li> <li>Penambahan <i>oil absorbent</i> pada saat terjadi ceceran minyak pada perairan dari peralatan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan di lokasi pelaksanaan <i>Dumping</i></li> <li>Titik pantau kualitas air laut pada lokasi: Area di luar pelaksanaan <i>dumping</i> pada radius 50 m di sebelah utara, Timur, Selatan dan Barat (4 titik)</li> </ol>	Enam bulan sekali selama kegiatan <i>dumping</i>	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara.</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
II.D.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks pemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Dumping	2. Sampling kualitas air laut dengan: Metode pengambilan sampel dan analisis data Kecerahan menggunakan mcnggunakan Secchi Disk, TSS menggunakan SNI 06-6989.3-2004; Lapisan minyak menggunakan SNI 06-6989.10-2004.	1. Lokasi Dumping 2. Pengukuran/sampling komunitas plankton, bentos dan nekton di lokasi sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>GT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD-12</td> <td>110°43'38,08"</td> <td>6°23'55,82"</td> </tr> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'36,5"</td> <td>06°25'22,4"</td> </tr> <tr> <td>NEC06</td> <td>110°42'14,3"</td> <td>06°24'35,1"</td> </tr> <tr> <td>NEC07</td> <td>110°45'11,6"</td> <td>06°23'12,9"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	GT	LS	FD-12	110°43'38,08"	6°23'55,82"	NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"	NEC06	110°42'14,3"	06°24'35,1"	NEC07	110°45'11,6"	06°23'12,9"	Enam bulan sekali selama dilaksanakan <i>dumping</i> dan pasca <i>dumping</i> selama tahap konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	GT	LS																						
FD-12	110°43'38,08"	6°23'55,82"																						
NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"																						
NEC06	110°42'14,3"	06°24'35,1"																						
NEC07	110°45'11,6"	06°23'12,9"																						
				1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut akibat kegiatan dumping. 2. Melakukan analisis struktur komunitas plankton, bentos dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton. 2) Pengambilan sampel bentos. 3) Pengambilan sampel nekton. Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm. 2) Ekman grab.																				

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan. Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan					
II.D.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan <i>Dumping</i> . 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan	<i>Dumping</i>	Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data	Pemukiman warga di Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Enam bulan sekali selama kegiatan dumping berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan								
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan						
		masyarakat terdampak pada kegiatan <i>Dumping</i> ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan <i>Dumping</i>		sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 401 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan <i>Dumping</i>											
II.E.	PEMATANGAN LAHAN														
II.E.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Konsentrasi debu, PM <sub>10</sub> , dan PM <sub>2,5</sub>	Pematangan lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyiraman secara berkala,</li> <li>Pemasangan pagar penutup proyek,</li> <li>Pembersihan roda kendaraan pengangkut yang keluar dari tapak proyek,</li> </ol> </li> <li>Pengukuran kualitas udara ambien: Metode: Sampling kualitas udara ambien sesuai SNI, untuk parameter Debu (SNI 19-79119.3-2005), PM<sub>10</sub> mengacu SNI 19-7119.6-2005,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Di lokasi pematangan lahan.</li> <li>Titik pantau di depan Main Gate, Dukuh Sekuping</li> </ol> <table border="1"> <tr> <td>KODE</td> <td>BT</td> <td>LS</td> </tr> <tr> <td>QUI2</td> <td>110°44'25,4"</td> <td>06°27'04,0"</td> </tr> </table>	KODE	BT	LS	QUI2	110°44'25,4"	06°27'04,0"	Enam bulan sekali selama pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LS													
QUI2	110°44'25,4"	06°27'04,0"													

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan																										
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																								
				dan PM <sub>2,5</sub> mengacu pada SNI 19-7117.3-2005 Waktu pengukuran : 24 jam.																													
II.E.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang - malam (L <sub>SM</sub> ) di permukiman	Pematangan lahan	<p>1. Pengamatan langsung terhadap:</p> <p>a. Fungsi dan keberadaan pagar penutup,</p> <p>b. Waktu pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan bising.</p> <p>2. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: <math>L_{SM} = 10 \log 1/24 (16.10^{0.115} + \dots + 8.10^{0.115})</math> dB (A)</p>	<p>1. Pengamatan dilakukan di:</p> <p>a. Sekeliling area yang dilakukan pematangan lahan.</p> <p>b. Lokasi pematangan lahan.</p> <p>2. Pengukuran dilakukan di:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>UT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-01</td> <td>110° 44' 46,7"</td> <td>6° 27' 09,0"</td> </tr> <tr> <td>BIS-02</td> <td>110° 45' 24,9"</td> <td>6° 26' 57,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-03</td> <td>110° 45' 36,4"</td> <td>6° 26' 25,7"</td> </tr> <tr> <td>BIS-04</td> <td>110° 44' 34,2"</td> <td>6° 27' 01,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-05</td> <td>110° 44' 18,5"</td> <td>6° 27' 01,9"</td> </tr> <tr> <td>BIS-09</td> <td>110° 43' 43,3"</td> <td>6° 27' 06,0"</td> </tr> <tr> <td>BIS-08</td> <td>110° 46' 00,6"</td> <td>6° 27' 25,17"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	UT	LS	BIS-01	110° 44' 46,7"	6° 27' 09,0"	BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"	BIS-03	110° 45' 36,4"	6° 26' 25,7"	BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"	BIS-05	110° 44' 18,5"	6° 27' 01,9"	BIS-09	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"	BIS-08	110° 46' 00,6"	6° 27' 25,17"	enam bulan sekali selama kegiatan pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
KODE	UT	LS																															
BIS-01	110° 44' 46,7"	6° 27' 09,0"																															
BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"																															
BIS-03	110° 45' 36,4"	6° 26' 25,7"																															
BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"																															
BIS-05	110° 44' 18,5"	6° 27' 01,9"																															
BIS-09	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"																															
BIS-08	110° 46' 00,6"	6° 27' 25,17"																															
II.E.3.	Peningkatan Run Off	Luas genangan yang timbul di permukiman	Pematangan lahan	<p>1. Pengamatan langsung terhadap</p>	<p>1. Lokasi tapak proyek</p> <p>2. Lokasi pemantauan pada</p>	Enam bulan sekali selama	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara	1. Bupati Jepara Melalui BLH																								

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan											
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan									
		warga akibat kegiatan pematangan lahan		pembuatan kolam detensi 2. Pengamatan luas genangan dengan : Metode: Observasi tinggi muka air dan inventarisasi kejadian banjir Alat. Alat ukur (meteran) Teknik sampling: Area sampling Analisa data: Menganalisa secara deskriptif kualitatif terhadap data kejadian banjir dan ketinggian muka air sungai	Sungai Ngarengan dan Sungai Banjaran	pematangan lahan		2. BLH Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah									
II.E.4.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kadar TSS	Pematangan lahan	1. Pengamatan langsung pada : a. Pelaksanaan pengendapan sedimen di kolam penampung b. Pelaksanaan pembersihan kotoran/sampah/sedimen secara berkala 2. Pengukuran kualitas TSS dengan : Metode pengambilan contoh dan analisa data mengacu pada SNI 06-6989.57:2008.	1. Kolam detensi dan salurannya 2. Titik pemantauan kadar TSS pada: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAP-01</td> <td>110° 43' 52"</td> <td>6° 26' 47"</td> </tr> <tr> <td>QAP-02</td> <td>110° 45' 31"</td> <td>6° 26' 40"</td> </tr> </tbody> </table> Kct : QAP-01: Hilir Sungai Banjaran QAP-02: Hilir Sungai Ngarengan	KODE	BT	LS	QAP-01	110° 43' 52"	6° 26' 47"	QAP-02	110° 45' 31"	6° 26' 40"	Enam bulan sekali selama pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																
QAP-01	110° 43' 52"	6° 26' 47"																
QAP-02	110° 45' 31"	6° 26' 40"																
II.E.5.	Gangguan Flora dan Fauna Darat	1. Persentase luasan RTH 2. Jenis tanaman yang ditanam di	Pematangan lahan	1. Menghitung luas RTH 2. Melakukan pengamatan	1. Lokasi RTH 2. Lokasi RTH 3. Pengamatan langsung terhadap keterjumpaan	Enam bulan sekali selama konstruksi dan setahun sekali	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara									

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instilusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
		RTH 3. Kondisi tanaman di RTH 4. Keterjumpaan burung : a. <i>Bubulcus ibis</i> b. <i>Egretta garzetta</i> c. <i>Ardea alba</i> 5. Jenis pohon yang dapat tumbuh tinggi.		langsung kondisi tanaman di RTH 3. Pengamatan langsung terhadap keterjumpaan burung: a. <i>Bubulcus ibis</i> b. <i>Egretta garzetta</i> c. <i>Ardea alba</i> 4. Pengamatan langsung terhadap keterdapatn jenis pohon yang dapat tumbuh tinggi	burung pada: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AV-1</td> <td>110°45'45,96"</td> <td>06°26'37,81"</td> </tr> <tr> <td>AV-2</td> <td>110°45'26,20"</td> <td>06°27'25,60"</td> </tr> <tr> <td>AV-3</td> <td>110°44'00,30"</td> <td>06°27'05,92"</td> </tr> <tr> <td>AV-4</td> <td>110°42'55,63"</td> <td>06°28'52,78"</td> </tr> </tbody> </table> 4. Lokasi RTH	KODE	BT	LS	AV-1	110°45'45,96"	06°26'37,81"	AV-2	110°45'26,20"	06°27'25,60"	AV-3	110°44'00,30"	06°27'05,92"	AV-4	110°42'55,63"	06°28'52,78"	selama tahap operasi			2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																						
AV-1	110°45'45,96"	06°26'37,81"																						
AV-2	110°45'26,20"	06°27'25,60"																						
AV-3	110°44'00,30"	06°27'05,92"																						
AV-4	110°42'55,63"	06°28'52,78"																						
II.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pematangan Lahan ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pematangan Lahan	Pematangan lahan	Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa : Data keluhan yang masuk dalam kotak saran. Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pematangan lahan	Desa Tubanan, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang	Enam bulan sekali selama Pematangan Lahan	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jcpara 3. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah															

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.E.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan.	pematangan lahan	Metode : 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas, dan angka kematian (mortalitas) 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesener, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan pematangan lahan 4. Pengamatan langsung terhadap: a) Pembuatan pagar di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman penduduk untuk mengurangi penyebaran debu saat pematangan lahan	1. Puskesmas Kecamatan Kembang 2. Masyarakat terkena dampak yang bermukim di dekat lokasi pematangan lahan 3. Titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara	Enam bulan sekali selama pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah.	1. Bupati melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

f.



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				b) Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau c) Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pematangan lahan untuk menggunakan masker <i>dust</i> . d) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat,					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan											
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan									
				penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu  Alat : 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling : Purposive random sampling Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan														
<b>II.F.</b>	<b>PEMBANGUNAN JETTY</b>																	
II.F.1.	Penurunan Kualitas Air	Konsentrasi TSS	Aktivitas Pembangunan jetty	1. Pengamatan langsung pada saat pembangunan Jetty yaitu: a. dengan menggunakan precast element dan/atau <i>Shuttering forms</i> untuk meminimalisi ceceran semen. b. Penggunaan hammer pile pada pembangunan Jetty secara <i>Open Pile</i> .  2. Pengukuran parameter TSS dengan : Metode pengambilan contoh dan analisa data mengacu pada SNI 06-6989.3-	1. Lokasi pembangunan Jetty 2. Titik pantau pada : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAL-1</td> <td>110°43'11,48"</td> <td>6°25'59,69"</td> </tr> <tr> <td>QAL-2</td> <td>110°45'24,31"</td> <td>6°26'57,34"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QAL-1	110°43'11,48"	6°25'59,69"	QAL-2	110°45'24,31"	6°26'57,34"	Enam bulan sekali selama pembangunan jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																
QAL-1	110°43'11,48"	6°25'59,69"																
QAL-2	110°45'24,31"	6°26'57,34"																

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
II.F.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur dan komunitas plankton, benthos dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks pemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Pembangunan jetty	2004. 1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air akibat kegiatan pembangunan jetty 2. Pengambilan sampling/pengukuran terhadap struktur dan komunitas plankton, benthos dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton 2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton	1. Lokasi pembangunan jetty 2. Pengambilan sampling komunitas biota perairan sebagai berikut: 1) Plankton dan benthos: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAL-1</td> <td>110°43'11,48"</td> <td>6°25'59,69"</td> </tr> <tr> <td>QAL-6</td> <td>110°43'40,4"</td> <td>6°26'25,5"</td> </tr> </tbody> </table> 2) Nekton : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'36,5"</td> <td>06°25'22,4"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QAL-1	110°43'11,48"	6°25'59,69"	QAL-6	110°43'40,4"	6°26'25,5"	KODE	BT	LS	NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"	Enam bulan sekali selama dilaksanakan pembangunan Jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																						
QAL-1	110°43'11,48"	6°25'59,69"																						
QAL-6	110°43'40,4"	6°26'25,5"																						
KODE	BT	LS																						
NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"																						

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan</p> <p>2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan</p>					
II.F.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i>.</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> ditanggapi</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan pembangunan</li> </ol>	Pembangunan <i>Jetty</i>	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung.</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa : Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</li> </ol> <p>Alat : Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum</p>	Desa terdampak, yaitu: Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Dondo (Kecamatan Bangsri).	Enam bulan sekali selama Pembangunan <i>jetty</i>	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
		Jetty		30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan jetty																				
II.G. PEMBANGUNAN WATER INTAKE DAN OUTFALL																								
II.G.1.	Penurunan Kualitas Air laut	Konsentrasi TSS	Pembangunan Water Intake dan Outfall	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung pada saat pelaksanaan pembangunan Water Intake dan Outfall dengan peralatan yang ramah lingkungan.</li> <li>Metode pengambilan contoh TSS dan analisa data mengacu pada SNI 06-6989.3-2004.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pembangunan water intake dan outfall:</li> <li>Titik pantau pada : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAL-2</td> <td>110°45' 24,31"</td> <td>6° 26' 57,34"</td> </tr> <tr> <td>QAL-9</td> <td>110°44' 27,83"</td> <td>6° 26' 17,13"</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	KODE	BT	LS	QAL-2	110°45' 24,31"	6° 26' 57,34"	QAL-9	110°44' 27,83"	6° 26' 17,13"	Enam bulan sekali selama pembangunan water intake dan outfall	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>						
KODE	BT	LS																						
QAL-2	110°45' 24,31"	6° 26' 57,34"																						
QAL-9	110°44' 27,83"	6° 26' 17,13"																						
II.G.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks keanekaragaman</li> <li>Indeks kemerataan</li> <li>Indeks dominansi</li> <li>Jumlah individu</li> <li>Jumlah jenis</li> </ol>	Pembangunan Water Intake dan Outfall	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut akibat kegiatan pembangunan Water Intake dan Outfall.</li> <li>Pengukuran/sampling struktur komunitas biota air laut plankton, bentos dan nekton dilakukan dengan Metode: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan sampel plankton</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pembangunan water intake dan outfall</li> <li>Pengukuran/sampling komunitas biota air di lokasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Plankton dan bentos: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB-07</td> <td>110°44' 27,83"</td> <td>6° 26' 17,13"</td> </tr> <tr> <td>PB-08</td> <td>110°45' 24,31"</td> <td>6° 26' 57,34"</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Nekton: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'56,5"</td> <td>06°25'22,4"</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> </li> </ol>	KODE	BT	LS	PB-07	110°44' 27,83"	6° 26' 17,13"	PB-08	110°45' 24,31"	6° 26' 57,34"	KODE	BT	LS	NEC05	110°42'56,5"	06°25'22,4"	Enam bulan sekali selama dilaksanakan pembangunan water intake dan outfall	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LS																						
PB-07	110°44' 27,83"	6° 26' 17,13"																						
PB-08	110°45' 24,31"	6° 26' 57,34"																						
KODE	BT	LS																						
NEC05	110°42'56,5"	06°25'22,4"																						

7.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan					
II.G.3.	Perubahan	1. Masyarakat	Pembanguna	Metode :	Desa Tubanan Kecamatan	enam bulan	PT. Bhumi	1. Dinas Sosial,	1. Bupati Jepara

f

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
	Persepsi dan Sikap Masyarakat	<p>mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>.</p> <p>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i> ditanggapi</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i></p>	n <i>Water Intake dan Outfall</i>	<p>1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa : Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</p> <p>Alat : Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i></p>	Kembang	sekali selama Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>	Jati Power	<p>Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p>	<p>melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui RT.H .Inwn Tengah</p>															
II.H.	PEMBANGUNAN BANGUNAN UTAMA PLTU DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA																							
II.H.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kadar debu, PM <sub>10</sub> dan PM <sub>2,5</sub>	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	<p>1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan:</p> <p>a. Penyiraman secara berkala,</p> <p>b. Pemasangan pagar penutup proyek,</p> <p>2. Metode: pengukuran kualitas udara ambien untuk Debu mengacu SNI 19-7119.3-2005,</p>	<p>1. Lokasi tapak proyek</p> <p>2. Titik pantau pada :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QU-9</td> <td>110° 44' 47,6"</td> <td>6° 27' 11,8"</td> </tr> <tr> <td>QU-10</td> <td>110° 45' 36,1"</td> <td>6° 26' 25,6"</td> </tr> <tr> <td>QU-11</td> <td>110° 43' 43,3"</td> <td>6° 27' 06,0"</td> </tr> <tr> <td>QU-12</td> <td>110° 44' 25,4"</td> <td>6° 27' 04,0"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QU-9	110° 44' 47,6"	6° 27' 11,8"	QU-10	110° 45' 36,1"	6° 26' 25,6"	QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"	QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"	Enam bulan sekali selama pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas Pendukung	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
KODE	BT	LS																						
QU-9	110° 44' 47,6"	6° 27' 11,8"																						
QU-10	110° 45' 36,1"	6° 26' 25,6"																						
QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"																						
QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"																						

f

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																										
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																								
II.H.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang-malam di permukiman	Pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap fungsi dan keberadaan pagar penutup proyek.</li> <li>Pengamatan langsung terhadap waktu pelaksanaan pemancangan.</li> <li>Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: <math>L_{SM} = 10 \log 1/24 (16.10^{0.115} + \dots + 8.10^{0.115})</math> dB (A).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pagar penutup proyek dilakukan di sekeliling lokasi proyek</li> <li>Pengamatan terhadap waktu pelaksanaan pemancangan dilakukan di lokasi proyek.</li> <li>Pengukuran tingkat kebisingan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan Fasilitas pendukungnya yaitu : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-01</td> <td>110° 44' 48,7"</td> <td>6° 27' 09,8"</td> </tr> <tr> <td>BIS-02</td> <td>110° 45' 24,9"</td> <td>6° 26' 57,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-03</td> <td>110° 45' 36,4"</td> <td>6° 26' 25,7"</td> </tr> <tr> <td>BIS-04</td> <td>110° 44' 34,2"</td> <td>6° 27' 01,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-05</td> <td>110° 44' 18,5"</td> <td>6° 27' 01,9"</td> </tr> <tr> <td>BIS-09</td> <td>110° 43' 43,3"</td> <td>6° 27' 06,0"</td> </tr> <tr> <td>BIS-08</td> <td>110° 46' 00,6"</td> <td>6° 27' 25,1"</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	KODE	BT	LS	BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,8"	BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"	BIS-03	110° 45' 36,4"	6° 26' 25,7"	BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"	BIS-05	110° 44' 18,5"	6° 27' 01,9"	BIS-09	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"	BIS-08	110° 46' 00,6"	6° 27' 25,1"	enam bulan sekali selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LS																															
BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,8"																															
BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"																															
BIS-03	110° 45' 36,4"	6° 26' 25,7"																															
BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"																															
BIS-05	110° 44' 18,5"	6° 27' 01,9"																															
BIS-09	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"																															
BIS-08	110° 46' 00,6"	6° 27' 25,1"																															
II.H.3.	Peningkatan Getaran	Baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta tingkat getaran untuk getaran	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap keberadaan dan fungsi parit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung di sekitar lokasi pemancangan.</li> <li>Pengukuran tingkat</li> </ol>	Enam bulan sekali selama pembangunan bangunan	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> </ol>																								



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
		mekanik	bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	<p>2. Pengukuran tingkat getaran dengan: Metode: Pengukuran tingkat getaran di pemukiman Alat: Seismometer Teknik sampling: Mengacu pada KepMen LH No 49 Tahun 1996 Analisa data: Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai simpangan, kecepatan dan frekuensi getaran dengan baku tingkat getaran menurut Kep-49/MENLH/11/1996 dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan pemancangan</p>	<p>getaran di Lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan Fasilitas pendukungnya yaitu :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>DT</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GET-01</td> <td>110°44' 58,54"</td> <td>6° 27' 6,53"</td> </tr> <tr> <td>GET-02</td> <td>110°45' 24,31"</td> <td>6° 26' 57,34"</td> </tr> <tr> <td>GET-03</td> <td>110°45' 35,02"</td> <td>6° 26' 30,48"</td> </tr> <tr> <td>GET-04</td> <td>110°44' 38,65"</td> <td>6° 27' 47,44"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	DT	L	GET-01	110°44' 58,54"	6° 27' 6,53"	GET-02	110°45' 24,31"	6° 26' 57,34"	GET-03	110°45' 35,02"	6° 26' 30,48"	GET-04	110°44' 38,65"	6° 27' 47,44"	utama PLTU dan fasilitas Pendukung			<p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
KODE	DT	L																						
GET-01	110°44' 58,54"	6° 27' 6,53"																						
GET-02	110°45' 24,31"	6° 26' 57,34"																						
GET-03	110°45' 35,02"	6° 26' 30,48"																						
GET-04	110°44' 38,65"	6° 27' 47,44"																						
II.H.4.	<p>Timbulan Limbah B3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minyak pelumas bekas (B105d)</li> <li>- Kain majun bekas (B110d)</li> <li>- Aki/baterai bekas</li> </ul>	<p>1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3</p>	Pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	<p>1. Pengamatan langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan tempat penyimpanan Limbah B3</li> <li>b. Waktu penyimpanan Limbah B3</li> <li>c. Pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam penanganan</li> </ol>	<p>1. Lokasi Penyimpanan limbah B3 2. Lokasi penyimpanan limbah B3</p>	Enam bulan sekali selama pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas Pendukung	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>															

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	(A102d) - Limbah elektronik/lampuk/TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)			<p>Limbah B3</p> <p>d. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan :</p> <p>Metode: Observasi dan pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log book limbah B3, dan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga</p> <p>Teknik sampling: Random sampling</p> <p>Analisa data: Membandingkan hasil pemantauan dengan kondisi awal.</p>					
II.H.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Jumlah kegiatan usaha masyarakat yang difasilitasi pada saat kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	<p>Metode : Metode pengamatan dan wawancara mendalam terhadap usaha baru</p> <p>Alat :</p> <p>Kamera dan panduan pertanyaan</p> <p>Teknik Sampling : Pendokumentasian</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif verbal</p>	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	<p>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara</p> <p>4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten</p>	<p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Dentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
								6. Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	
II.H.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya ditanggapi.</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya</li> </ol>	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung.</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</li> </ol> <p>Alat :</p> <p>Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya</p>	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</li> </ol>
II.H.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan.	Pembangunan bangunan utama PLTU dan Fasilitas pendukungnya	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Puskesmas Kecamatan Kembang</li> <li>Masyarakat terkena dampak yang bermulim di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas</li> </ol>	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				(morbiditas, dan angka kematian (mortalitas) 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesener, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya 4. Pengamatan langsung terhadap: a) Pemagaran sementara dengan rapat batas area proyek, dimaksudkan agar aktivitas yang ada di dalam lokasi proyek tidak bersinggungan (berpengaruh) langsung terhadap lingkungan sekitarnya. b) Terjadinya	pendukungnya 3. Titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara			Jawa Tengah	Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi dengan tetap mempertahankan keberadaan pohon, semak dan rumput.</p> <p>c) Penanaman vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan penanaman jenis vegetasi yang serupa/vegetasi yang dapat mengurangi penyebaran debu</p> <p>d) Penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau</p> <p>e) Penggunaan masker dust kepada masyarakat yang menjadi</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>tenaga kerja saat pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya</p> <p>a.</p> <p>f) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu</p> <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuesioner,</li> <li>2. Kamera</li> <li>3. Alat tulis</li> </ol> <p>Teknik Sampling : Purposive random sampling</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.H.8.	Penurunan Sanitasi Lingkungan	1. Keberadaan vektor penyakit tidak melebihi baku mutu (KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks lalat</li> <li>Indeks kecoa</li> <li>Indeks ayamuk</li> </ol> 2. Jumlah sarana MCK dan jumlah tempat sampah/TPS yang ada, kondisi SPAL	Pembangunan bangunan utama PLTU dan Fasilitas pendukungnya	Metode : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi kondisi sanitasi lingkungan di wilayah studi,</li> <li>Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan</li> <li>Pengambilan data keberadaan vektor penyakit kemudian dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.</li> <li>Pengamatan langsung terhadap:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebersihan areal proyek dan penerapan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan.</li> <li>Pemanfaatan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau</li> </ol> </li> </ol>	Di lokasi proyek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Di lokasi tempat/bak sampah.</li> <li>Di lokasi TPS</li> <li>Di lokasi saluran air/drainase</li> </ol>	Di pantau setiap enam bulan sekali selama berlangsungnya kegiatan pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>RI.H Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>adanya bangunan MCK sederhana/ sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir</p> <p>c) ketersediaan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak</p> <p>d) adanya pemasangan papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah</p> <p>e) Pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan pengangkutan ke TPS secara rutin..</p>					



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
				Alat : 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling : Purposive random sampling Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan																				
<b>II.I.</b>	<b>PEMBANGUNAN BANGUNAN NON TEKNIS</b>																							
II.I.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kadar debu, PM <sub>10</sub> dan PM <sub>2,5</sub>	Pembangunan Bangunan Non-Teknis	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Pemasangan pagar penutup proyek, b. Penyiraman secara berkala, 2. Metode sampling kualitas udara ambien untuk parameter debu mengacu SNI 19-7119.3-2005, PM <sub>10</sub> mengacu SNI 19-7119.6-2005, PM <sub>2,5</sub> mengacu pada SNI 19-7117.3-2005. Waktu pengukuran: 24 jam.	1. Lokasi pembangunan bangunan Non Teknis 2. Titik pengukuran <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QU-9</td> <td>110° 44' 47,6"</td> <td>6° 27' 11,8"</td> </tr> <tr> <td>QU-10</td> <td>110° 45' 36,1"</td> <td>6° 26' 25,6"</td> </tr> <tr> <td>QU-11</td> <td>110° 43' 43,3"</td> <td>6° 27' 06,0"</td> </tr> <tr> <td>QU-12</td> <td>110° 44' 25,4"</td> <td>6° 27' 04,0"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QU-9	110° 44' 47,6"	6° 27' 11,8"	QU-10	110° 45' 36,1"	6° 26' 25,6"	QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"	QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"	enam bulan sekali selama pembangunan bangunan non-teknis	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																						
QU-9	110° 44' 47,6"	6° 27' 11,8"																						
QU-10	110° 45' 36,1"	6° 26' 25,6"																						
QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"																						
QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"																						
II.I.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang – malam (L <sub>50</sub> ) di permukiman	Pembangunan bangunan non-teknis	1. Pengamatan langsung terhadap keberadaan, kondisi dan fungsi pagar penutup proyek. 2. Pengamatan	1. Pengamatan langsung dilakukan di sekeliling lokasi proyek. 2. Pengamatan langsung dilakukan di lokasi proyek.	enam bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Bangunan Non-Teknis	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui															

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																										
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																								
				langsung terhadap waktu pelaksanaan pemancangan. 3. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: $L_{SM} = 10 \log 1/24 (16.10^{0.115} + \dots + 8.10^{0.115}) \text{ dB (A)}$	3. Pengukuran dilakukan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan bangunan non-teknis pendukungnya yaitu : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>DT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-01</td> <td>110° 44' 48,7"</td> <td>6° 27' 09,8"</td> </tr> <tr> <td>BIS-02</td> <td>110° 45' 24,9"</td> <td>6° 26' 57,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-03</td> <td>110° 45' 36,4"</td> <td>6° 26' 35,7"</td> </tr> <tr> <td>BIS-04</td> <td>110° 44' 34,2"</td> <td>6° 27' 01,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-05</td> <td>110° 44' 18,5"</td> <td>6° 27' 01,9"</td> </tr> <tr> <td>BIS-09</td> <td>110° 43' 43,3"</td> <td>6° 27' 06,0"</td> </tr> <tr> <td>BIS-08</td> <td>110° 46' 00,6"</td> <td>6° 27' 25,1"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	DT	LS	BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,8"	BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"	BIS-03	110° 45' 36,4"	6° 26' 35,7"	BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"	BIS-05	110° 44' 18,5"	6° 27' 01,9"	BIS-09	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"	BIS-08	110° 46' 00,6"	6° 27' 25,1"				BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	DT	LS																															
BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,8"																															
BIS-02	110° 45' 24,9"	6° 26' 57,5"																															
BIS-03	110° 45' 36,4"	6° 26' 35,7"																															
BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"																															
BIS-05	110° 44' 18,5"	6° 27' 01,9"																															
BIS-09	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"																															
BIS-08	110° 46' 00,6"	6° 27' 25,1"																															
II.1.3.	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta tingkat getaran untuk getaran mekanik	Pembangunan bangunan non-teknis	1. Pengamatan langsung terhadap keberadaan parit 2. Pengukuran tingkat getaran dengan: Metode: Pengukuran tingkat getaran di permukiman Alat: Seismometer Teknik sampling: Mengacu pada KepMen LH No 49 Tahun 1996 Analisa data: Analisis data dilakukan dengan	1. Pengamatan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan 2. Pengukuran dilakukan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan bangunan non-teknis yaitu : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>DT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GET-01</td> <td>110° 44' 58,54"</td> <td>6° 27' 6,53"</td> </tr> <tr> <td>GET-02</td> <td>110° 45' 24,31"</td> <td>6° 26' 57,34"</td> </tr> <tr> <td>GET-03</td> <td>110° 45' 35,02"</td> <td>6° 26' 30,40"</td> </tr> <tr> <td>GET-04</td> <td>110° 44' 38,65"</td> <td>6° 27' 47,44"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	DT	LS	GET-01	110° 44' 58,54"	6° 27' 6,53"	GET-02	110° 45' 24,31"	6° 26' 57,34"	GET-03	110° 45' 35,02"	6° 26' 30,40"	GET-04	110° 44' 38,65"	6° 27' 47,44"	enam bulan sekali selama pembangunan bangunan non-teknis	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah									
KODE	DT	LS																															
GET-01	110° 44' 58,54"	6° 27' 6,53"																															
GET-02	110° 45' 24,31"	6° 26' 57,34"																															
GET-03	110° 45' 35,02"	6° 26' 30,40"																															
GET-04	110° 44' 38,65"	6° 27' 47,44"																															

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				membandingkan hasil pengukuran nilai simpangan dan kecepatan getaran dengan baku tingkat getaran menurut Kep-49/MENLH/11/1996 dan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan sebelum adanya proyek.					
II.1.4.	Timbulan Limbah B3 : - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3	Pembangunan bangunan non teknis	1. Pengamatan langsung : a. Penyediaan tempat penyimpanan Limbah B3 b. Waktu penyimpanan Limbah B3 c. Pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam penanganan limbah B3. d. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan : Metode: Observasi dan pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log	1. Lokasi Penyimpanan limbah B3 2. Lokasi penyimpanan limbah B3	enam bulan sekali selama pembangunan bangunan non-teknis	PT. Bhumi Jati Power	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.1.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Jumlah kegiatan usaha masyarakat yang muncul yang difasilitasi pada saat kegiatan pembangunan Bangunan Non Teknisberlangsung	Pembangunan Bangunan Non Teknis	<p>Metode : Metode observasi/pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/interview terhadap masyarakat</p> <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuesioner, wawancara dan atau dengar pendapat dengan masyarakat.</li> <li>2. Memasang kotak saran pada lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat</li> </ol> <p>Teknik Sampling : Purposive random sampling</p> <p>Analisis Data : Analisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis</p>	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Non Teknis	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara</li> <li>3. BLH Kabupaten Jepara</li> <li>4. BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
II.1.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan	Pembangunan Bangunan Non Teknis	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian menggunakan</li> </ol>	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Masyarakat	<p>memahami sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis</p> <p>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis ditanggapi</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis</p>		<p>metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak lingkungan</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa : Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</p> <p>Alat : Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis</p>		Bangunan Non Teknis		<p>Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
II.1.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan.	Pembangunan Bangunan Non Teknis	<p>Metode :</p> <p>1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas, dan angka kematian (mortalitas).</p> <p>2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan</p>	<p>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Di puskesmas Kecamatan Kembang</p> <p>3. Titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara</p> <p>4. Area Proyek</p> <p>5. Masyarakat terkena dampak yang bermukim di dekat lokasi pemabngunan bangunan non teknis</p>	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Non Teknis	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
				<p>observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan</p> <p>3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan pembangunan bangunan non teknis.</p> <p>4. Pengamatan langsung terhadap:</p> <p>a) Keberadaan pagar sementara pada batas area proyek, dimaksudkan agar aktivitas yang ada di dalam lokasi proyek tidak bersinggungan (berpengaruh) langsung terhadap lingkungan sekitarnya.</p> <p>b) Pencegahan kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu</p>						

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				kegiatan konstruksi c) Penanaman vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa. d) Penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau e) Penggunaan masker dust kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan teknis. f) Kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu  Alat : 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling : Purposive random sampling Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan					
II.1.8.	Penurunan Sanitasi Lingkungan	1. keberadaan vektor penyakit tidak melebihi baku mutu (KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002) a. Indeks lalat b. Indeks kecoa c. Indeks nyamuk. 2. Jumlah sarana MCK dan jumlah tempat sampah/TPS yang ada, kondisi SPAL	Pembangunan bangunan non teknis	Metode : 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi kondisi sanitasi di wilayah studi, dan vektor penyakit 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data keberadaan vektor penyakit kemudian dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. 4. Pengamatan	Di lokasi proyek yaitu: 1. Di lokasi tempat/bak sampah. 2. Di lokasi TPS 3. Di lokasi saluran air/drainase	Enam bulan sekali selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis	PT. Bumi Jati Power	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Blh Kabupaten Jepara 3. Blh Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>Langsung terhadap:</p> <p>a. Kebersihan areal proyek dan penerapan peraturan tenaga kerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan.</p> <p>b. Pemanfaatan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau pembangunan MCK sederhana/sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir</p> <p>c. Penyediaan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan								
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan						
				<p>d. Pemasangan papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah</p> <p>e. Pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan pengangkutan ke TPS secara rutin.</p> <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuesioner,</li> <li>2. Kamera</li> <li>3. Alat tulis</li> </ol> <p>Teknik Sampling : Purposive random sampling</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan</p>											
<b>II.J.</b>	<b>PEMBANGUNAN AREA PENIMBUNAN ABU</b>														
II.J.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kadar debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub>	Peinbangunan Area Penimbunan Abu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiraman secara berkala,</li> <li>b. Pemasangan pagar penutup proyek,</li> </ol> </li> <li>2. Pengukuran kualitas udara ambien: <p>Metode: Sampling kualitas udara</p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi pembangunan area penimbunan abu</li> <li>2. Titik Pengukuran pada: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>KODE</td> <td>BT</td> <td>LS</td> </tr> <tr> <td>QU-9</td> <td>110° 44' 47,6"</td> <td>6° 27' 11,8"</td> </tr> </table> </li> </ol>	KODE	BT	LS	QU-9	110° 44' 47,6"	6° 27' 11,8"	enam bulan sekali selama pembangunan area penimbunan abu	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BLH Kabupaten Jepara</li> <li>2. BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LS													
QU-9	110° 44' 47,6"	6° 27' 11,8"													

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan								
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan						
				ambien parameter Debumengacu SNI 19-7119.3-2005, PM <sub>10</sub> mengacu SNI 19-7119.6-2005, PM <sub>2,5</sub> mengacu pada SNI 19-7117.3-2005. Waktu pengukuran:24 jam.											
II.J.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang - malam di permukiman	Pembangunan area penimbunan abu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap keberadaan, fungsi dan kondisi pagar penutup proyek.</li> <li>Pengamatan langsung terhadap waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan area penimbunan abu.</li> <li>Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan di sekeliling lokasi proyek.</li> <li>Pengamatan di lokasi proyek</li> <li>Pengukuran dilaksanakan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan area penimbunan abu.</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-01</td> <td>110° 44' 48,7"</td> <td>6° 27' 09,6"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,6"	enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LS													
BIS-01	110° 44' 48,7"	6° 27' 09,6"													

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				$L_{SM} = 10 \log 1/24 (16.10^{0,115} + \dots + 8.10^{0,115}) \text{ dB (A)}$					
II.J.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abuditanggapi</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu</li> </ol>	Pembangunan Area Penimbunan Abu	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung.</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</li> </ol> <p>Alat :</p> <p>Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu</p>	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan Area Penimbunan Abu	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
II.K.	<b>COMMISSIONING</b>								
II.K.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	<ol style="list-style-type: none"> <li>Parameter kualitas udara emisi: Total partikel, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Opasitas</li> <li>Parameter kualitas udara ambien: Debu, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, SO<sub>2</sub>, dan NO<sub>2</sub>.</li> </ol>	Comissioning	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian fasilitas <i>Electrostatic Precipitator</i>.</li> <li>Pengoperasian fasilitas <i>Flue Gas</i></li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi Cerobong dan area <i>Powerblock</i></li> <li>Titik pengukuran kualitas udara emisi pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Cerobong Unit 5</li> <li>Cerobong Unit 6</li> </ol> </li> </ol>	Enam bulan sekali selama <i>Comissioning</i>	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Menteri</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																																
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																														
				<p><i>Desulfurization (FGD)</i></p> <p>c. Pengoperasian fasilitas <i>Low NOx Burner</i>.</p> <p>d. Pemeliharaan pada peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat</p> <p>c. Kesesuaian desain cerobong</p> <p>2. Pengukuran kualitas udara emisi terhadap parameter Total Partikel, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, dan opasitas dengan Metode pengukuran: pengukuran kontinu menggunakan CEMS (<i>Continuous Emission Monitoring System</i>) secara <i>realtime</i>. Metode analisa: Sesuai SNI yaitu Total partikel (SNI 19-4840-1998); SO<sub>2</sub> (SNI 19-7119.7-2005); NO<sub>2</sub> (SNI 19-7119.2-2005).</p> <p>3. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode pengukuran dan analisa data</p>	<p>3. Titik pengukuran udara ambien pada:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP-01</td> <td>110°43'46.91"</td> <td>6°27'10.82"</td> </tr> <tr> <td>AP-02</td> <td>110°44'16.04"</td> <td>6°27'3.54"</td> </tr> <tr> <td>AP-03</td> <td>110°44'39.40"</td> <td>6°27'20.20"</td> </tr> <tr> <td>AP-04</td> <td>110°45'15.10"</td> <td>6°27'32.00"</td> </tr> <tr> <td>AP-05</td> <td>110°45'36.10"</td> <td>6°26'25.60"</td> </tr> <tr> <td>AP-06</td> <td>110°46'34.60"</td> <td>6°28'11.00"</td> </tr> <tr> <td>AP-07</td> <td>110°49'51.56"</td> <td>6°26'4.66"</td> </tr> <tr> <td>AP-08</td> <td>110°43'14.90"</td> <td>6°28'57.70"</td> </tr> <tr> <td>AP-09</td> <td>110°15'0.00"</td> <td>6°28'25.80"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	AP-01	110°43'46.91"	6°27'10.82"	AP-02	110°44'16.04"	6°27'3.54"	AP-03	110°44'39.40"	6°27'20.20"	AP-04	110°45'15.10"	6°27'32.00"	AP-05	110°45'36.10"	6°26'25.60"	AP-06	110°46'34.60"	6°28'11.00"	AP-07	110°49'51.56"	6°26'4.66"	AP-08	110°43'14.90"	6°28'57.70"	AP-09	110°15'0.00"	6°28'25.80"				Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE	BT	LS																																					
AP-01	110°43'46.91"	6°27'10.82"																																					
AP-02	110°44'16.04"	6°27'3.54"																																					
AP-03	110°44'39.40"	6°27'20.20"																																					
AP-04	110°45'15.10"	6°27'32.00"																																					
AP-05	110°45'36.10"	6°26'25.60"																																					
AP-06	110°46'34.60"	6°28'11.00"																																					
AP-07	110°49'51.56"	6°26'4.66"																																					
AP-08	110°43'14.90"	6°28'57.70"																																					
AP-09	110°15'0.00"	6°28'25.80"																																					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																										
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																								
				parameter Debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , SO <sub>2</sub> , dan NO <sub>2</sub> sesuai dengan SNI, yaitu Debu (19-7119.3-2005), PM <sub>10</sub> mengacu SNI 19-7119.6-2005, PM <sub>2.5</sub> mengacu pada SNI 19-7117.3 2005, SO <sub>2</sub> sesuai SNI 19-7119.7-2005 dan NO <sub>2</sub> dengan SNI 19-7119.2-2005 Teknik Sampling: 24 jam																													
II.K.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang - malam di permukiman dan di wilayah industri	Comissioning	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan terhadap keberadaan, fungsi dan kondisi silencer pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (seperti: turbin, generator, dan boiler).</li> <li>Pengamatan langsung terhadap keberadaan dan kondisi tanaman-tanaman yang ditanam untuk mengurangi tingkat kebisingan.</li> <li>Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung di fasilitas-fasilitas PLTU Tanjung Jati B Unit 5&amp;6 (Turbin, generator, boiler)</li> <li>Pengamatan di lokasi penanaman tanaman pengurang bising.</li> <li>Pengukuran tingkat kebisingan di. <ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pemukiman di sekitar lokasi PLTU yaitu : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-01</td> <td>110°44'48.70"</td> <td>6°27'9.80"</td> </tr> <tr> <td>BIS-02</td> <td>110°45'24.90"</td> <td>6°26'57.50"</td> </tr> <tr> <td>BIS-03</td> <td>110°44'18.50"</td> <td>6°27'1.90"</td> </tr> <tr> <td>BIS-04</td> <td>110°44'34.20"</td> <td>6°27'1.50"</td> </tr> <tr> <td>BIS-05</td> <td>110°44'18.50"</td> <td>6°27'1.90"</td> </tr> <tr> <td>BIS-08</td> <td>110°46'0.60"</td> <td>6°27'25.10"</td> </tr> <tr> <td>BIS-09</td> <td>110°43'43.30"</td> <td>6°27'6.00"</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Batas wilayah PLTU (pagar) yang dekat dengan pemukiman warga (Dukuh Sekuping, Dukuh Bayuran)</li> </ol> </li> </ol>	KODE	BT	LS	BIS-01	110°44'48.70"	6°27'9.80"	BIS-02	110°45'24.90"	6°26'57.50"	BIS-03	110°44'18.50"	6°27'1.90"	BIS-04	110°44'34.20"	6°27'1.50"	BIS-05	110°44'18.50"	6°27'1.90"	BIS-08	110°46'0.60"	6°27'25.10"	BIS-09	110°43'43.30"	6°27'6.00"	Dua kali selama Comissioning dan Start up	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui RI.H Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LS																															
BIS-01	110°44'48.70"	6°27'9.80"																															
BIS-02	110°45'24.90"	6°26'57.50"																															
BIS-03	110°44'18.50"	6°27'1.90"																															
BIS-04	110°44'34.20"	6°27'1.50"																															
BIS-05	110°44'18.50"	6°27'1.90"																															
BIS-08	110°46'0.60"	6°27'25.10"																															
BIS-09	110°43'43.30"	6°27'6.00"																															

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																																						
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																				
				<p>KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: <math>L_{AM} = 10 \log \frac{1}{24} (16 \cdot 10^{0,115} + \dots + 8 \cdot 10^{0,115})</math> dB (A)</p>																																									
II.K.3.	Penurunan Kualitas Air Laut	1. Parameter suhu dan klorin bebas (limbah cair dari kondensor)	a. <i>Commissioning</i> (limbah cair dari Kondensor)	<p>1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan:</p> <p>a. Pengelolaan air bahang dari kondensor.</p> <p>b. Pemeliharaan berkala kolam aerasi dan kanal</p> <p>c. Sistem perpipaan pembuangan air bahang</p> <p>2. Pengukuran:</p> <p>a. Kualitas limbah cair dari kondensor (air bahang)</p> <p>b. Kualitas air laut.</p> <p>1) meliputi pengukuran: menggunakan termometer dengan metode pengukuran dan analisa data sesuai SNI 06-6989.23-2005</p>	<p>1. Pengamatan dilakukan pada:</p> <p>a. Oultet Condensor</p> <p>b. Kolam Aerasi dan Kanal</p> <p>c. Perpipaan pembuangan air bahang.</p> <p>2. Titik pengukuran suhu dilakukan pada:</p> <p>a. Air limbah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LD-10</td> <td>110°45'3.70"</td> <td>6°26'34.45"</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Air laut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LB-01</td> <td>110°45'3.17"</td> <td>6°26'31.31"</td> </tr> <tr> <td>LB-02</td> <td>110°45'4.09"</td> <td>6°26'23.59"</td> </tr> <tr> <td>LB-03</td> <td>110°44'53.42"</td> <td>6°26'12.29"</td> </tr> <tr> <td>LB-04</td> <td>110°44'45.11"</td> <td>6°25'58.47"</td> </tr> <tr> <td>LB-05</td> <td>110°45'16.72"</td> <td>6°26'22.29"</td> </tr> <tr> <td>LB-06</td> <td>110°45'34.37"</td> <td>6°26'10.62"</td> </tr> <tr> <td>LB-07</td> <td>110°44'49.72"</td> <td>6°26'30.66"</td> </tr> <tr> <td>LB-08</td> <td>110°44'43.47"</td> <td>6°26'26.51"</td> </tr> <tr> <td>LB-09</td> <td>110°44'36.42"</td> <td>6°26'19.03"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	LD-10	110°45'3.70"	6°26'34.45"	KODE	BT	LS	LB-01	110°45'3.17"	6°26'31.31"	LB-02	110°45'4.09"	6°26'23.59"	LB-03	110°44'53.42"	6°26'12.29"	LB-04	110°44'45.11"	6°25'58.47"	LB-05	110°45'16.72"	6°26'22.29"	LB-06	110°45'34.37"	6°26'10.62"	LB-07	110°44'49.72"	6°26'30.66"	LB-08	110°44'43.47"	6°26'26.51"	LB-09	110°44'36.42"	6°26'19.03"	<p>1. Selama kegiatan <i>Commissioning</i></p> <p>2. Satu bulan sekali untuk kualitas air limbah</p> <p>3. Enam bulan sekali untuk kualitas air laut</p>	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>4. BLH Provinsi Jawa Tengah</p> <p>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
KODE	BT	LS																																											
LD-10	110°45'3.70"	6°26'34.45"																																											
KODE	BT	LS																																											
LB-01	110°45'3.17"	6°26'31.31"																																											
LB-02	110°45'4.09"	6°26'23.59"																																											
LB-03	110°44'53.42"	6°26'12.29"																																											
LB-04	110°44'45.11"	6°25'58.47"																																											
LB-05	110°45'16.72"	6°26'22.29"																																											
LB-06	110°45'34.37"	6°26'10.62"																																											
LB-07	110°44'49.72"	6°26'30.66"																																											
LB-08	110°44'43.47"	6°26'26.51"																																											
LB-09	110°44'36.42"	6°26'19.03"																																											

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																																																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																															
		<p>2. Parameter air limbah dari:</p> <p>a. WWTP: pH, TSS, Minyak dan Lemak, Klorin bebas, Cr total, Cu, Fe, Zn (permen LH 08 Tahun 2009)</p> <p>b. Kolam Aerasi FGD: SO<sub>4</sub>, pH, DO (permen LH 08 Tahun 2009)</p> <p>c. Coal Run-Off WWTP: pH, TSS, Fe, Mn (permen LH 08 Tahun 2009), Radionuklida: <sup>210</sup>Pb, <sup>226</sup>Ra, <sup>228</sup>Ra, <sup>228</sup>Th, <sup>230</sup>Th, <sup>234</sup>Th (Perka Bapeten No 09/1999).</p> <p>d. Outfall Kanal: Temperature, pH, TSS, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Hg, Pb, As, Cl<sub>2</sub>, Minyak mineral (Perda Jateng No 5/2012)</p> <p>e. STP outlet: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak (Permen LH</p>	Kegiatan Commissioning (pengoperasian sistem limbah cair)	<p>2) Klorin bebas dengan metode pengukuran dan analisa data sesuai menggunakan SNI 06-6989.17-2004</p> <p>1 Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan:</p> <p>a. Pengelolaan limbah cair pada WWTP Power Plant, Coal Run-off Pond, Kolam Aerasi FGD, Kanal Outfall, dan STP Plant</p> <p>b. Pemeliharaan berkala Unit WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal).</p> <p>c. Sistem perpipaan WWTP.</p> <p>2. Pengukuran parameter kualitas air limbah dengan metode sesuai SNI sebagai berikut:</p> <p>a. WWTP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>Minyak dan lemak (SNI 06-2502-1991)</li> <li>Klorin bebas (SNI 06.4824-1994)</li> </ul>	<p>1. Lokasi WWTP Power plant, Coal Run-Off Pond, Kolam aerasi FGD, Kanal Outfall dan STP Plant.</p> <p>2. Titik pengukuran kualitas air limbah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>outlet WWTP</td> <td>110°45'1.52"</td> <td>6°26'33.45"</td> </tr> <tr> <td>outlet kolam aerasi FGD</td> <td>110°45'3.86"</td> <td>6°26'33.37"</td> </tr> <tr> <td>outlet Coal run-off WWTP</td> <td>110°44'14.4"</td> <td>6°26'36.27"</td> </tr> <tr> <td>outlet outfall Kanal</td> <td>110°45'2.49"</td> <td>6°26'32.21"</td> </tr> <tr> <td>STP outlet</td> <td>110°45'1.42"</td> <td>6°26'32.95"</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Titik Pengukuran kualitas air ut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC-02</td> <td>110°45'4.86"</td> <td>6°26'29.56"</td> </tr> <tr> <td>LB-07</td> <td>110°44'49.72"</td> <td>6°26'30.66"</td> </tr> <tr> <td>LB-09</td> <td>110°44'36.42"</td> <td>6°26'19.03"</td> </tr> <tr> <td>LB-03</td> <td>110°44'53.42"</td> <td>6°26'12.29"</td> </tr> <tr> <td>LB-05</td> <td>110°45'16.72"</td> <td>6°26'22.29"</td> </tr> <tr> <td>LB-08</td> <td>110°44'43.47"</td> <td>6°26'26.51"</td> </tr> <tr> <td>LB-04</td> <td>110°44'45.11"</td> <td>6°25'58.47"</td> </tr> <tr> <td>LB-06</td> <td>110°45'34.37"</td> <td>6°26'10.62"</td> </tr> <tr> <td>LC-10</td> <td>110°44'10.39"</td> <td>6°26'24.32"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	outlet WWTP	110°45'1.52"	6°26'33.45"	outlet kolam aerasi FGD	110°45'3.86"	6°26'33.37"	outlet Coal run-off WWTP	110°44'14.4"	6°26'36.27"	outlet outfall Kanal	110°45'2.49"	6°26'32.21"	STP outlet	110°45'1.42"	6°26'32.95"	KODE	BT	LS	LC-02	110°45'4.86"	6°26'29.56"	LB-07	110°44'49.72"	6°26'30.66"	LB-09	110°44'36.42"	6°26'19.03"	LB-03	110°44'53.42"	6°26'12.29"	LB-05	110°45'16.72"	6°26'22.29"	LB-08	110°44'43.47"	6°26'26.51"	LB-04	110°44'45.11"	6°25'58.47"	LB-06	110°45'34.37"	6°26'10.62"	LC-10	110°44'10.39"	6°26'24.32"			
KODE	BT	LS																																																						
outlet WWTP	110°45'1.52"	6°26'33.45"																																																						
outlet kolam aerasi FGD	110°45'3.86"	6°26'33.37"																																																						
outlet Coal run-off WWTP	110°44'14.4"	6°26'36.27"																																																						
outlet outfall Kanal	110°45'2.49"	6°26'32.21"																																																						
STP outlet	110°45'1.42"	6°26'32.95"																																																						
KODE	BT	LS																																																						
LC-02	110°45'4.86"	6°26'29.56"																																																						
LB-07	110°44'49.72"	6°26'30.66"																																																						
LB-09	110°44'36.42"	6°26'19.03"																																																						
LB-03	110°44'53.42"	6°26'12.29"																																																						
LB-05	110°45'16.72"	6°26'22.29"																																																						
LB-08	110°44'43.47"	6°26'26.51"																																																						
LB-04	110°44'45.11"	6°25'58.47"																																																						
LB-06	110°45'34.37"	6°26'10.62"																																																						
LC-10	110°44'10.39"	6°26'24.32"																																																						



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
		No.05 Tahun 2014) 3. Parameter kualitas air laut: pH, TSS, Suhu, Minyak dan Lemak, Hg, As, Cd, Cu, Pb, Zn (permenLH No. 51/Tahun 2004) Radionuklida: $^{210}\text{Pb}$ , $^{226}\text{Ra}$ , $^{228}\text{Ra}$ , $^{228}\text{Th}$ , $^{230}\text{Th}$ , $^{234}\text{Th}$ . (Perka Bapeten No 09/1999)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cr (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>• Cu (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>• Fe (SNI 06-6989.4-2004)</li> <li>• Zn (SNI 6989.7:2009)</li> <li>b. Kolam Aerasi FGD:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• SO<sub>4</sub> (SNI 06-6989.20-2004)</li> <li>• pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>• DO (SNI 06-6989.14-2004)</li> </ul> </li> <li>c. Coal Run-Off WWTP:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>• TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>• Fe (SNI 06-6989.4-2004)</li> <li>• Mn (SNI 06-6989.9-2004)</li> <li>• <math>^{210}\text{Pb}</math> (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <math>^{226}\text{Ra}</math> (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <math>^{228}\text{Ra}</math> (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <math>^{228}\text{Th}</math> (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <math>^{230}\text{Th}</math> (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <math>^{234}\text{Th}</math> (Perka Bapeten No</li> </ul> </li> </ul>						

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				09/1999) d. Outfall Kanal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>• TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>• Fe (SNI 06-6989.4-2004)</li> <li>• Mn (SNI 06-6989.9-2004)</li> <li>• Cu (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>• Zn (SNI 6989.7:2009)</li> <li>• Cr (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>• Cd (SNI 06-6989.37-2005)</li> <li>• Hg (SNI 06-3605-1994)</li> <li>• Pb (SNI 06-6989.45-2005)</li> <li>• As (SNI 06-6989.54-2005)</li> <li>• Klorin bebas (SNI 06.4824-1994)</li> <li>• Minyak mineral (SNI 6989.10:2011)</li> </ul> e. STP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>• BOD (SNI 6989.72:2009)</li> <li>• TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>• Minyak dan lemak (SNI 06-2502-1991)</li> </ul> 3. Pengukuran parameter kualitas air laut dengan metode					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				sesuai SNI sebagai berikut: a. TSS (SNI 6964.8:2015) b. pH (SNI 06-6989.11-2004) c. Zn (SNI 6989.7:2009) d. Cu (SNI 6989.6:2009) e. Minyak dan Lemak (SNI 06-2502-1991) f. Pb (SNI 06-6989.45-2005) g. Cd (SNI 06-6989.37-2005) h. Hg (SNI 06-3605-1994) i. As (SNI 06-6989.54-2005) j. <sup>210</sup> Pb (Perka Bapeten No 09/1999) k. <sup>226</sup> Ra (Perka Bapeten No 09/1999) l. <sup>228</sup> Ra (Perka Bapeten No 09/1999) m. <sup>228</sup> Th (Perka Bapeten No 09/1999) n. <sup>230</sup> Th (Perka Bapeten No 09/1999) o. <sup>234</sup> Th (Perka Bapeten No 09/1999)					
II.K.4.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton,	Kegiatan <i>Commissioning</i>	Pengukuran/sampling komunitas biota air laut	Pengukuran/sampling dilakukan di lokasi perairan Tanjung Jati, yaitu:	Enam bulan sekali selama <i>Commissioning</i>	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																													
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																											
		bentos, dan nekton a. Indeks keanekaragaman b. Indeks pemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis		plankton, bentos dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton 2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB-03</td> <td>110°43' 43,52"</td> <td>6° 26' 34,42"</td> </tr> <tr> <td>PB-04</td> <td>110°43' 11,48"</td> <td>6° 25' 59,69"</td> </tr> <tr> <td>PB-05</td> <td>110°43' 48,4"</td> <td>6° 26' 25,5"</td> </tr> <tr> <td>PB-06</td> <td>110°44' 27,83"</td> <td>6° 26' 17,13"</td> </tr> <tr> <td>PB-07</td> <td>110°44' 45,13"</td> <td>6° 25' 58,36"</td> </tr> <tr> <td>PB-08</td> <td>110°45' 5,96"</td> <td>6° 26' 29,07"</td> </tr> <tr> <td>PB-15</td> <td>110°45' 50,55"</td> <td>6° 26' 27,29"</td> </tr> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'36.5"</td> <td>06°25'32.4"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	PB-03	110°43' 43,52"	6° 26' 34,42"	PB-04	110°43' 11,48"	6° 25' 59,69"	PB-05	110°43' 48,4"	6° 26' 25,5"	PB-06	110°44' 27,83"	6° 26' 17,13"	PB-07	110°44' 45,13"	6° 25' 58,36"	PB-08	110°45' 5,96"	6° 26' 29,07"	PB-15	110°45' 50,55"	6° 26' 27,29"	NEC05	110°42'36.5"	06°25'32.4"			2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. RI.H Provinsi Jawa Tengah	2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																																		
PB-03	110°43' 43,52"	6° 26' 34,42"																																		
PB-04	110°43' 11,48"	6° 25' 59,69"																																		
PB-05	110°43' 48,4"	6° 26' 25,5"																																		
PB-06	110°44' 27,83"	6° 26' 17,13"																																		
PB-07	110°44' 45,13"	6° 25' 58,36"																																		
PB-08	110°45' 5,96"	6° 26' 29,07"																																		
PB-15	110°45' 50,55"	6° 26' 27,29"																																		
NEC05	110°42'36.5"	06°25'32.4"																																		

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan					
<b>II.L.</b>	<b>PELEPASAN TENAGA KERJA TAHAP KONSTRUKSI</b>								
II.L.1.	Penurunan Kesempatan Kerja	<p>3. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana pelepasan tenaga kerja</p> <p>4. Tenaga kerja terkena PHK yang memenuhi kualifikasi mengikuti seleksi</p>	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Metode :</p> <p>1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data tenaga kerja lokal yang di PHK</p> <p>Alat : Kuesioner</p> <p>Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi</p>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Satu kali saat akhir masa konstruksi (pelepasan tenaga kerja)	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>
II.L.2.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	<p>1. Tenaga kerja dari warga masyarakat yang terkena PHK mendapatkan pesangon sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Tenaga kerja yang terkena PHK dan</p>	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Metode :</p> <p>1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang di lepasan</p>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Satu kali saat akhir masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Provinsi</p>	<p>1. Bupati Jepara melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Institusi Pemantauan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		tidak memenuhi kualifikasi mendapatkan bantuan teknis kewirausahaan.		<p>pada tahap konstruksi.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa:</p> <p>a. Data tenaga kerja lokal yang di PHK dan mendapatkan pesangon.</p> <p>b. Data tenaga kerja yang terkena PHK dan mendapatkan bantuan teknis kewirausahaan.</p> <p>Alat :</p> <p>Kuesioner Teknik</p> <p>Sampling :</p> <p>Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data :</p> <p>Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan pendapatan sebelum adanya kegiatan pelepasan tenaga kerja.</p>				Jawa Tengah	
II.L.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<p>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi.</p> <p>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi ditanggapi</p>	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Metode :</p> <p>1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa:</p> <p>a. Data tenaga kerja lokal yang di PHK</p>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Satu kali saat akhir masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi		<p>dan mendapatkan pesangon.</p> <p>b. Data tenaga kerja yang terkena PHK dan mendapatkan bantuan teknis kewirausahaan.</p> <p>Alat :</p> <p>Kuesioner Teknik Sampling :</p> <p>Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.</p>					
<b>II.M.</b>	<b>PENERIMAAN TENAGA KERJA TAHAP OPERASI</b>								
II.M.1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	<p>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi</p> <p>2. Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap operasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% sesuai kualifikasi yang</p>	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	<p>Metode :</p> <p>1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap operasi dan yang tidak diterima.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data tenaga kerja lokal yang di terima menjadi tenaga kerja pada tahap operasi.</p> <p>Alat :</p> <p>Kuesioner Teknik Sampling :</p>	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekala selama Tahap Operasi	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>3. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>

1.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Institusi Pemantauan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		dibutuhkan.		Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.					
II.M.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Upah minimum tenaga kerja sama dengan UMK	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Metode : Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap operasi. Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekali setelah selama tahap Operasi	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.M.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekali setelah selama tahap Operasi	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
		Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasiditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi		yang tidak diterima. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.																				
III. TAHAP OPERASI																								
III.A. PENGOPERASIAN JETTY																								
III.A.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Kadar TSS	Pengoperasian Jetty pada saat proses unloading	1. Pengukuran kecepatan angin sebelum proses unloading. 2. Pengukuran kualitas air laut (TSS)dengan metodepengambilan data dan analisis kualitas air laut untuk TSS sesuai SNI 6964.8:2015	1. Di lokasi <i>Unloading jetty</i> 2. Titik pengukuran TSS air laut di: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAL-5</td> <td>110°44' 57"</td> <td>6° 26' 28,8"</td> </tr> <tr> <td>QAL-1</td> <td>110°43' 11,48"</td> <td>6° 25' 59,69"</td> </tr> <tr> <td>QAL-6</td> <td>110° 43' 48,4"</td> <td>6° 26' 25,5"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QAL-5	110°44' 57"	6° 26' 28,8"	QAL-1	110°43' 11,48"	6° 25' 59,69"	QAL-6	110° 43' 48,4"	6° 26' 25,5"	Enam bulan sekali selama pengoperasian Jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah			
KODE	BT	LS																						
QAL-5	110°44' 57"	6° 26' 28,8"																						
QAL-1	110°43' 11,48"	6° 25' 59,69"																						
QAL-6	110° 43' 48,4"	6° 26' 25,5"																						
III.A.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nektonyaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi	Kegiatan Pengoperasian jetty	1. Pengamatan langsung terhadap pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut akibat kegiatan pengoperasian jetty. 2. Pengukuran/sampl	1. Lokasi <i>unloading jetty</i> 2. Pengukuran/sampling dilakukan di lokasi perairan Tanjung Jati, yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB-03</td> <td>110° 43' 48,4"</td> <td>6° 26' 25,5"</td> </tr> <tr> <td>PB-04</td> <td>110°43' 11,48"</td> <td>6° 25' 59,69"</td> </tr> <tr> <td>PB-05</td> <td>110°43' 48,4"</td> <td>6° 26' 25,5"</td> </tr> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'36,5"</td> <td>06°25'22,4"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	PB-03	110° 43' 48,4"	6° 26' 25,5"	PB-04	110°43' 11,48"	6° 25' 59,69"	PB-05	110°43' 48,4"	6° 26' 25,5"	NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"	enam bulan sekali selama pengoperasian Jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																						
PB-03	110° 43' 48,4"	6° 26' 25,5"																						
PB-04	110°43' 11,48"	6° 25' 59,69"																						
PB-05	110°43' 48,4"	6° 26' 25,5"																						
NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"																						

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		d. Jumlah individu e. Jumlah jenis		<p>ing struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton dilakukan dengan: Metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan sampel plankton</li> <li>2) Pengambilan sampel benthos</li> <li>3) Pengambilan sampel nekton</li> </ol> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm</li> <li>2) Ekman grab</li> <li>3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan</li> </ol> <p>Teknik sampling: Area Random Sampling</p> <p>Analisa data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan</li> <li>2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan</li> </ol>				4. Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan					
III.A.3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Tingkat pendapatan nelayan tangkap terdampak langsung pengoperasian jetty tidak mengalami penurunan	Pengoperasian Jetty	Metode : Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung. Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian Jetty	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekali selama pengoperasian Jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.A.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian Jetty. 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian	Pengoperasian Jetty	Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Enam bulan sekali selama pengoperasian Jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan														
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan												
		3. Jetty ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian Jetty		saran Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian Jetty																	
III.B. PEROPERASIAN SISTEM PENANGANAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU																					
III.B.1.	Gangguan Biota Perairan	1. Struktur komunitas biota air laut plankton dan nekton a. Indeks keanekaragaman b. Indeks pemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis 2. Jumlah biowaste yang tidak dikelola	Kegiatan pengoperasian sistem penanganan bahan baku dan bahan pembantu	1. Pengamatan terhadap kondisi fungsional Bar Screen. 2. Inventarisasi rekaman jumlah biowaste. 3. Pengukuran/sampling struktur komunitas biota air plankton, bentos, dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton 2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm	1. Bar Screen 2. Lokasi penimbunan biowaste 3. Pengukuran dilakukan di Lokasi perairan Tanjung Jati, sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>DT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB-07</td> <td>110°44' 45,13"</td> <td>6° 25' 58,36"</td> </tr> <tr> <td>PB-08</td> <td>110°45' 5,96"</td> <td>6° 26' 29,07"</td> </tr> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'36,5"</td> <td>06°25'22,4"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	DT	LS	PB-07	110°44' 45,13"	6° 25' 58,36"	PB-08	110°45' 5,96"	6° 26' 29,07"	NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"	1. Pada saat pelaksanaan pemeliharaan <i>water intake</i> 2. enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan bahan baku dan bahan pembantu	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	DT	LS																			
PB-07	110°44' 45,13"	6° 25' 58,36"																			
PB-08	110°45' 5,96"	6° 26' 29,07"																			
NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"																			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan											
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan									
				2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan														
<b>III.C.</b>	<b>PENGOPERASIAN SISTEM PENANGANAN LIMBAH CAIR</b>																	
III.C.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	1. Parameter air limbah: a. WWTP:pH, TSS, Minyak dan Lemak, Klorin bebas, Cr total, Cu, Fe, Zn (permen LH 08 Tahun 2009) b. KolamAerasiFGD : SO <sub>4</sub> , pH, DO (permen LH 08	Sistem penanganan limbah cair dari WWTP, FGD Kolam Aerasi, WWTP untuk <i>Coal Run- Off Pond</i> , WWTP untuk <i>Ash Run-OffPond</i> , <i>Outfall</i>	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Pengelolaan limbah cair pada WWTP ( <i>Power plant</i> ), WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i> , WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i> ,	1. WWTP <i>Power plant</i> , <i>Coal Run-Off Pond</i> , FGD <i>Aeration Basindan Outfall Kanal</i> , STP, kanal dan perpipaan. 2. Titik Pengukuran kualitas air limbah pada: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oulet WWTP</td> <td>110°45'1,52"</td> <td>6°26'33,45"</td> </tr> <tr> <td>oulet kolam aerasi FGD</td> <td>110°45'3,06"</td> <td>6°26'33,37"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	oulet WWTP	110°45'1,52"	6°26'33,45"	oulet kolam aerasi FGD	110°45'3,06"	6°26'33,37"	1. Satu bulan sekali untuk: a) Outlet WWTP b) Outlet kolam aerasi c) Oultet coal runoff WWTP	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE	BT	LS																
oulet WWTP	110°45'1,52"	6°26'33,45"																
oulet kolam aerasi FGD	110°45'3,06"	6°26'33,37"																

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																																
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																														
		Tahun 2009) c. CoalRun Off WWTP: pH, TSS, Fe, Mn (permen LH 08 Tahun 2009), Radionuklida: <sup>210</sup> Pb, <sup>226</sup> Ra, <sup>228</sup> Ra, <sup>228</sup> Th, <sup>230</sup> Th, <sup>234</sup> Th (Perka Bapeten No 09/1999). d. Outfall Kanal: Temperature, pH, TSS, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Hg, Pb, As, Cl <sub>2</sub> , Minyak mineral (perda Jateng No 5/2012) e. STPoutlet: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak (PermenLH No.05 Tahun 2014) 2. Parameter kualitas air laut: a. pH, TSS, Suhu, Lemak, Hg, As, Cd, Cu, Pb, Zn (permenLH No. 51/Tahun 2004) b. Radionuklida: <sup>210</sup> Pb, <sup>226</sup> Ra, <sup>228</sup> Ra, <sup>228</sup> Th, <sup>230</sup> Th, <sup>234</sup> Th. (Perka Bapeten No 09/1999)	Kanal, dan STP Outlet	FGD Kolam Aerasi, <i>Outfall Kanal dan STP</i> b. Pemeliharaan berkala Unit WWTP dan kanal c. Perpipa-an pemhuangan air limbah 2. Pengukuran kualitas air limbah dengan metode sesuai SNI: a. WWTP: <ul style="list-style-type: none"> <li>pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>Minyak dan lemak (SNI 06-2502-1991)</li> <li>Klorin bebas (SNI 06.4824-1994)</li> <li>Cr (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>Cu (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>Fe (SNI 06-6989.4-2004)</li> <li>Zn (SNI 6989.7:2009)</li> </ul> b. Kolam Aerasi FGD: <ul style="list-style-type: none"> <li>SO<sub>4</sub> (SNI 06-6989.20-2004)</li> <li>pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>DO (SNI 06-6989.14-2004)</li> </ul> c. Coal Run-Off WWTP:	outlet Coal runoff WWTP 110°44'14,4" 6°26'36,27" outlet outfall Kanal STP 110°45'2,49" 6°26'32,21" outlet STP 110°45'1,42" 6°26'32,95" 3. Titik Pengukuran kualitas air laut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODP</th> <th>IR</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC-02</td> <td>110°45'4,86"</td> <td>6°26'29,56"</td> </tr> <tr> <td>LB-07</td> <td>110°44'49,72"</td> <td>6°26'30,66"</td> </tr> <tr> <td>LD-09</td> <td>110°44'36,42"</td> <td>6°26'19,03"</td> </tr> <tr> <td>LB-03</td> <td>110°44'53,42"</td> <td>6°26'12,29"</td> </tr> <tr> <td>LB-05</td> <td>110°45'16,72"</td> <td>6°26'22,29"</td> </tr> <tr> <td>LB-08</td> <td>110°44'43,47"</td> <td>6°26'26,51"</td> </tr> <tr> <td>LB-04</td> <td>110°44'45,11"</td> <td>6°25'58,47"</td> </tr> <tr> <td>LB-06</td> <td>110°45'34,37"</td> <td>6°26'10,62"</td> </tr> <tr> <td>LC-10</td> <td>110°44'10,39"</td> <td>6°26'24,32"</td> </tr> </tbody> </table>	KODP	IR	LS	LC-02	110°45'4,86"	6°26'29,56"	LB-07	110°44'49,72"	6°26'30,66"	LD-09	110°44'36,42"	6°26'19,03"	LB-03	110°44'53,42"	6°26'12,29"	LB-05	110°45'16,72"	6°26'22,29"	LB-08	110°44'43,47"	6°26'26,51"	LB-04	110°44'45,11"	6°25'58,47"	LB-06	110°45'34,37"	6°26'10,62"	LC-10	110°44'10,39"	6°26'24,32"	d) Outlet Ash Run Off WWTP e) Outlet outfall kanal f) STP outlet 2. Enam bulan sekali untuk kualitas air laut 3. Selama pengoperasian sistem penanganan limbah cair untuk air laut		5. Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
KODP	IR	LS																																					
LC-02	110°45'4,86"	6°26'29,56"																																					
LB-07	110°44'49,72"	6°26'30,66"																																					
LD-09	110°44'36,42"	6°26'19,03"																																					
LB-03	110°44'53,42"	6°26'12,29"																																					
LB-05	110°45'16,72"	6°26'22,29"																																					
LB-08	110°44'43,47"	6°26'26,51"																																					
LB-04	110°44'45,11"	6°25'58,47"																																					
LB-06	110°45'34,37"	6°26'10,62"																																					
LC-10	110°44'10,39"	6°26'24,32"																																					

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>• TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>• Fe (SNI 06-6989.4-2004)</li> <li>• Mn (SNI 06-6989.9-2004)</li> <li>• <sup>210</sup>Pb (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <sup>226</sup>Ra (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <sup>228</sup>Ra (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <sup>228</sup>Th (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <sup>230</sup>Th (Perka Bapeten No 09/1999)</li> <li>• <sup>234</sup>Th (Perka Bapeten No 09/1999)</li> </ul> <p>d. Outfall Kanal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>• TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>• Fe (SNI 06-6989.4-2004)</li> <li>• Mn (SNI 06-6989.9-2004)</li> <li>• Cu (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>• Zn (SNI 6989.7:2009)</li> <li>• Cr (SNI 06-6989.17-2004)</li> <li>• Cd (SNI 06-6989.37-2005)</li> </ul>					

1.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hg (SNI 06-3605-1994)</li> <li>• Pb (SNI 06-6989.45-2005)</li> <li>• As (SNI 06-6989.54-2005)</li> <li>• Klorin bebas (SNI 06.4824-1994)</li> <li>• Minyak mineral (SNI 6989.10:2011)</li> </ul> <p>e. STP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>• BOD (SNI 6989.72:2009)</li> <li>• TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>• Minyak dan lemak (SNI 06-2502-1991)</li> </ul> <p>3. Pengukuran kualitas air laut dengan menggunakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TSS (SNI 6964.8:2015)</li> <li>b. pH (SNI 06-6989.11-2004)</li> <li>c. Zn (SNI 6989.7:2009)</li> <li>d. Cu (SNI 6989.6:2009)</li> <li>e. Minyak dan Lemak (SNI 06-2502-1991)</li> <li>f. Pb(SNI 06-6989.45-2005)</li> <li>g. Cd (SNI 06-6989.37-2005)</li> <li>h. Hg (SNI 06-3605-1994)</li> <li>i. As (SNI 06-</li> </ul>					

4.



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																													
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																											
				j. 6989.54-2005) Salinitas(SNI 06-6989.25-2005) k. <sup>210</sup> Pb (Perka Bapeten No 09/1999) l. <sup>226</sup> Ra (Perka Dapeten No 09/1999) m. <sup>228</sup> Ra (Perka Bapeten No 09/1999) n. <sup>228</sup> Th (Perka Bapeten No 09/1999) o. <sup>230</sup> Th (Perka Bapeten No 09/1999) p. <sup>234</sup> Th (Perka Bapeten No 09/1999)																																
III.C.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks pemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair	Pengukuran/sampling struktur komunitas plankton, bentos dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton 2) Pengambilan sampel bentos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang	Pengukuran/sampling dilakukan di lokasi perairan Tanjung Jati, yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PD-03</td> <td>110°43' 43,52"</td> <td>6° 26' 34,42"</td> </tr> <tr> <td>PB-04</td> <td>110°43' 11,40"</td> <td>6° 25' 59,69"</td> </tr> <tr> <td>PD-05</td> <td>110° 43' 40,4"</td> <td>6° 26' 25,5"</td> </tr> <tr> <td>PB-06</td> <td>110° 44'27,83"</td> <td>6° 26' 17,13"</td> </tr> <tr> <td>PB-07</td> <td>110° 44'45,13"</td> <td>6° 25' 50,36"</td> </tr> <tr> <td>PD-08</td> <td>110° 45' 5,96"</td> <td>6° 26' 29,07"</td> </tr> <tr> <td>PB-09</td> <td>110°45'24,19"</td> <td>6°26'22,16"</td> </tr> <tr> <td>NEC05</td> <td>110°42'36,5"</td> <td>06°25'22,4"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	PD-03	110°43' 43,52"	6° 26' 34,42"	PB-04	110°43' 11,40"	6° 25' 59,69"	PD-05	110° 43' 40,4"	6° 26' 25,5"	PB-06	110° 44'27,83"	6° 26' 17,13"	PB-07	110° 44'45,13"	6° 25' 50,36"	PD-08	110° 45' 5,96"	6° 26' 29,07"	PB-09	110°45'24,19"	6°26'22,16"	NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"	Enam bulan sekali selama dilaksanakan pengoperasian sistem penanganan limbah cair	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																																		
PD-03	110°43' 43,52"	6° 26' 34,42"																																		
PB-04	110°43' 11,40"	6° 25' 59,69"																																		
PD-05	110° 43' 40,4"	6° 26' 25,5"																																		
PB-06	110° 44'27,83"	6° 26' 17,13"																																		
PB-07	110° 44'45,13"	6° 25' 50,36"																																		
PD-08	110° 45' 5,96"	6° 26' 29,07"																																		
PB-09	110°45'24,19"	6°26'22,16"																																		
NEC05	110°42'36,5"	06°25'22,4"																																		

7.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan					
III.C.3.	Gangguan Produksi Perikanan	Nelayan merasa tidak terganggu adanya pembuangan limbah cair yang layak lingkungan dan tidak terjadi penurunan yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair	Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung. 2. Pengamatan hasil tangkapan ikan di sekitar rumah ikan. Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data :	Di lokasi penempatan rumpon dalam wilayah studi sosial	Enam bulan sekali	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair					
III.C.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair ditanggapi</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair</li> </ol>	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat terdampak langsung.</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran</li> </ol> <p>Alat :</p> <p>Kuesioner Teknik Sampling :</p> <p>Random sampling dengan kuota minimum 30 responden</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah cair</p>	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Enam bulan sekali selama Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
III.D.	PENGOPERASIAN SISTEM PENANGAN LIMBAH PADAT								
III.D.1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , CO, NO <sub>2</sub>	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan dengan pemasangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dk Sekuping Ds. Tubanan</li> <li>kantor PLTU</li> <li>Ds Wedelan ± 200m pertigaan Wedelan</li> </ol>	Enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan limbah padat	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan														
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan												
				rambu lalu lintas dengan kecepatan maksimal 40 km/jam 2. Pemeriksaan dokumen hasil uji emisi. 3. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode: Sampling kualitas udara ambien sesuai SNI, yaitu Debu (SNI 19-7119.3-2005), PM <sub>10</sub> (SNI 19-7119.6-2005), PM <sub>2.5</sub> (SNI 19-7119.3-2005), CO (SNI 19-7119.10-2011), dan NO <sub>2</sub> (SNI 19-7119.2-2005). Durasi pengumpulan data: 24 jam.					BLH Provinsi Jawa Tengah												
III.D.2	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang-malam di permukiman	Pengopcrasian sistem penanganan limbah padat	1. Pengamatan langsung terhadap pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut <i>Fly Ash/Bottom Ash</i> . 2. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan.	1. Di jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek. 2. Pengukuran dilakukan di: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-04</td> <td>110° 44' 34,2"</td> <td>6° 27' 01,5"</td> </tr> <tr> <td>BIS-06</td> <td>110° 45' 00,0"</td> <td>6° 28' 25,8"</td> </tr> <tr> <td>BIS-07</td> <td>110° 46' 57,2"</td> <td>6° 30' 53,5"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"	BIS-06	110° 45' 00,0"	6° 28' 25,8"	BIS-07	110° 46' 57,2"	6° 30' 53,5"	enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan/material	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																			
BIS-04	110° 44' 34,2"	6° 27' 01,5"																			
BIS-06	110° 45' 00,0"	6° 28' 25,8"																			
BIS-07	110° 46' 57,2"	6° 30' 53,5"																			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: $L_{SM} = 10 \log 1/24 (16.10^{0.115} + \dots + 8.10^{0.115}) \text{ dB (A)}$					
III.D.3	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat.</li> <li>Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat ditanggapi</li> <li>Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat</li> </ol>	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat	Metode : <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang diwawancarakan terhadap masyarakat terdampak langsung.                Alat :                Kuesioner                Teknik Sampling :                Random sampling dengan kuota minimum 30 responden                Analisis Data :                Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat</li> <li>Pengumpulan data sekunder berupa:                Data keluhan yang masuk dalam</li> </ol>	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Enam bulan sekali selama Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																																						
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																				
				kotak saran																																									
<b>III.E. PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT UTAMA DAN PELENGKAP</b>																																													
III.E.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	1. Parameter kualitas udara emisi meliputi : Total partikel, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> dan Opasitas 2. Parameter kualitas udara ambien meliputi: Debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub>	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Desain cerobong dengan tinggi 240 m b. Pengoperasian fasilitas <i>Electrostatic Precipitator (EP)</i> c. Pengoperasian fasilitas <i>Flue Gas Desulfurization (FGD)</i> d. Pengoperasian fasilitas <i>Low NOx Burner</i> . e. Pemeliharaan pada peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat. 2. Pengukuran kualitas udara emisi terhadap parameter Total partikel, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , Opasitas dengan : Metode: a. Pengukuran kontinyu menggunakan CEMS ( <i>Continuous Emission Monitoring System</i> ) secara time series b. Pengukuran secara manual dengan menggunakan	1. Lokasi Cerobong dan area <i>Power block</i> 2. Titik pengukuran kualitas udara emisi pada: a. Cerobong Unit 5 b. Cerobong Unit 6 3. Titik pengukuran kualitas udara ambien pada: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>UT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AP-01</td><td>110°43'46.91"</td><td>6°27'10.82"</td></tr> <tr><td>AP-02</td><td>110°44'16.04"</td><td>6°27'3.54"</td></tr> <tr><td>AP-03</td><td>110°44'39.40"</td><td>6°27'20.20"</td></tr> <tr><td>AP-04</td><td>110°45'15.10"</td><td>6°27'32.00"</td></tr> <tr><td>AP-05</td><td>110°45'36.10"</td><td>6°26'25.60"</td></tr> <tr><td>AP-06</td><td>110°46'34.60"</td><td>6°28'11.60"</td></tr> <tr><td>AP-07</td><td>110°49'51.56"</td><td>6°26'4.66"</td></tr> <tr><td>AP-08</td><td>110°43'14.90"</td><td>6°28'57.70"</td></tr> <tr><td>AP-09</td><td>110°45'0.00"</td><td>6°28'25.80"</td></tr> <tr><td>AP-10</td><td>110°46'51.69"</td><td>6°30'47.11"</td></tr> <tr><td>AP-11</td><td>110°49'19.60"</td><td>6°28'53.33"</td></tr> </tbody> </table>	KODE	UT	LS	AP-01	110°43'46.91"	6°27'10.82"	AP-02	110°44'16.04"	6°27'3.54"	AP-03	110°44'39.40"	6°27'20.20"	AP-04	110°45'15.10"	6°27'32.00"	AP-05	110°45'36.10"	6°26'25.60"	AP-06	110°46'34.60"	6°28'11.60"	AP-07	110°49'51.56"	6°26'4.66"	AP-08	110°43'14.90"	6°28'57.70"	AP-09	110°45'0.00"	6°28'25.80"	AP-10	110°46'51.69"	6°30'47.11"	AP-11	110°49'19.60"	6°28'53.33"	1. Pengamatan dilakukan : a. Sekali sebelum oprasional b. Enam bulan sekali c. Enam bulan sekali d. Enam bulan sekali e. Dua tahun sekali 2. Pengukuran kualitas udara emisi: a. Setiap saat b. Enam bulan sekali 3. Enambulan sekali	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE	UT	LS																																											
AP-01	110°43'46.91"	6°27'10.82"																																											
AP-02	110°44'16.04"	6°27'3.54"																																											
AP-03	110°44'39.40"	6°27'20.20"																																											
AP-04	110°45'15.10"	6°27'32.00"																																											
AP-05	110°45'36.10"	6°26'25.60"																																											
AP-06	110°46'34.60"	6°28'11.60"																																											
AP-07	110°49'51.56"	6°26'4.66"																																											
AP-08	110°43'14.90"	6°28'57.70"																																											
AP-09	110°45'0.00"	6°28'25.80"																																											
AP-10	110°46'51.69"	6°30'47.11"																																											
AP-11	110°49'19.60"	6°28'53.33"																																											

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>Metode pengumpulan data dan analisa Total partikel (SNI 19-4840-1998); SO2 (SNI 19-7117.7-2005); NO2 (SNI 19-7117.5-2005), opasitas (SNI 19.7117.11.2005)</p> <p>3. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode: Sampling kualitas udara ambien parameter sesuai dengan SNI, yaitu Debu (SNI 19-7119.3-2005), PM 10 SNI 19-7119.6-2005, PM 2,5 SNI 19.7119.3-2005, SO<sub>2</sub> : SNI 19-7119.7-2005; NO<sub>2</sub> : SNI 19-7119.2 2005 Teknik Sampling: 24 jam</p>					
III.E.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang – malam di permukiman	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan terhadap keberadaan, fungsi dan kondisi silencer pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (seperti: turbin, generator, dan boiler).</li> <li>Pengamatan langsung terhadap keberadaan dan kondisi tanaman-tanaman yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung di fasilitas-fasilitas PLTU Tanjung Jati B Unit 5&amp;6 (Boiler, generator, turbin, pulverizer, pompa-pompa, Power House, konveyor)</li> <li>Pengamatan di lokasi penanaman tanaman pengurang bising.</li> <li>Pengukuran tingkat kebisingan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pemukiman di sekitar lokasi PLTU yaitu :</li> </ol> </li> </ol>	enam bulan sekali selama operasional PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	PT. Bumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																																
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																														
				<p>ditanam untuk mengurangi tingkat kebisingan.</p> <p>3. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: <math>L_{SM} = 10 \log 1/24 ( 16.10^{0.115} + \dots + 8.10^{0.115} ) \text{ dB (A)}</math></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIS-01</td> <td>110°44'48.70"</td> <td>6°279.80"</td> </tr> <tr> <td>BIS-02</td> <td>110°45'24.90"</td> <td>6°2657.50"</td> </tr> <tr> <td>BIS-03</td> <td>110°44'18.50"</td> <td>6°271.90"</td> </tr> <tr> <td>BIS-04</td> <td>110°44'34.20"</td> <td>6°271.50"</td> </tr> <tr> <td>BIS-05</td> <td>110°44'18.50"</td> <td>6°271.90"</td> </tr> <tr> <td>BIS-08</td> <td>110°46'0.60"</td> <td>6°2725.10"</td> </tr> <tr> <td>BIS-09</td> <td>110°43'43.30"</td> <td>6°276.00"</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Batas wilayah PLTU (pagar) yang dekat dengan pemukiman warga (Dukuh Sekuping, Dukuh Bayuran)</p>	KODE	BT	LS	BIS-01	110°44'48.70"	6°279.80"	BIS-02	110°45'24.90"	6°2657.50"	BIS-03	110°44'18.50"	6°271.90"	BIS-04	110°44'34.20"	6°271.50"	BIS-05	110°44'18.50"	6°271.90"	BIS-08	110°46'0.60"	6°2725.10"	BIS-09	110°43'43.30"	6°276.00"										
KODE	BT	LS																																					
BIS-01	110°44'48.70"	6°279.80"																																					
BIS-02	110°45'24.90"	6°2657.50"																																					
BIS-03	110°44'18.50"	6°271.90"																																					
BIS-04	110°44'34.20"	6°271.50"																																					
BIS-05	110°44'18.50"	6°271.90"																																					
BIS-08	110°46'0.60"	6°2725.10"																																					
BIS-09	110°43'43.30"	6°276.00"																																					
III.E.3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Kualitas Air Bahang meliputi temperatur dan Klorin bebas	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap	<p>1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan:</p> <p>a. Pengelolaan air bahang dari kondensor ke kolam aerasi</p> <p>b. Pemeliharaan berkala kolam aerasi dan Kanal</p> <p>2. Pengukuran air limbah/limbah bahang meliputi:</p> <p>a. Suhu air bahang menggunakan termometer SNI 06-6989.23-2005</p> <p>b. Klorin bebas</p>	<p>1. <i>Outlet Condensor</i>, Kolam Aerasi, dan Kanal</p> <p>2. Titik pengukuran kualitas air limbah/bahang pada</p> <p>a. Outlet kondensor</p> <p>b. Outfall</p> <p>3. Titik pengukuran kualitas air laut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LB-01</td> <td>110°45'3.17"</td> <td>6°2631.31"</td> </tr> <tr> <td>LB-02</td> <td>110°45'4.09"</td> <td>6°2623.59"</td> </tr> <tr> <td>LB-03</td> <td>110°44'53.42"</td> <td>6°2612.29"</td> </tr> <tr> <td>LB-04</td> <td>110°44'45.11"</td> <td>6°2558.47"</td> </tr> <tr> <td>LB-05</td> <td>110°45'16.72"</td> <td>6°2622.29"</td> </tr> <tr> <td>LB-06</td> <td>110°45'34.37"</td> <td>6°2610.62"</td> </tr> <tr> <td>LB-07</td> <td>110°44'49.72"</td> <td>6°2630.66"</td> </tr> <tr> <td>LB-08</td> <td>110°44'43.47"</td> <td>6°2626.51"</td> </tr> <tr> <td>LB-09</td> <td>110°44'36.42"</td> <td>6°2619.03"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	LB-01	110°45'3.17"	6°2631.31"	LB-02	110°45'4.09"	6°2623.59"	LB-03	110°44'53.42"	6°2612.29"	LB-04	110°44'45.11"	6°2558.47"	LB-05	110°45'16.72"	6°2622.29"	LB-06	110°45'34.37"	6°2610.62"	LB-07	110°44'49.72"	6°2630.66"	LB-08	110°44'43.47"	6°2626.51"	LB-09	110°44'36.42"	6°2619.03"	<p>1. Enam bulan sekali.</p> <p>2. Satu bulan sekali</p> <p>3. Enam bulan sekali</p>	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>4. BLH Provinsi Jawa Tengah</p> <p>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
KODE	BT	LS																																					
LB-01	110°45'3.17"	6°2631.31"																																					
LB-02	110°45'4.09"	6°2623.59"																																					
LB-03	110°44'53.42"	6°2612.29"																																					
LB-04	110°44'45.11"	6°2558.47"																																					
LB-05	110°45'16.72"	6°2622.29"																																					
LB-06	110°45'34.37"	6°2610.62"																																					
LB-07	110°44'49.72"	6°2630.66"																																					
LB-08	110°44'43.47"	6°2626.51"																																					
LB-09	110°44'36.42"	6°2619.03"																																					



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>menggunakan SNI 06-6989.17-2004</p> <p>3. Pengukuran kualitas air laut, meliputi:</p> <p>a. Suhu air bahang menggunakan Thermometer SNI 06-6989.23 2005</p> <p>b. Klorin bebas menggunakan SNI 06-6989.17-2004</p>					
III.E.4.	Peningkatan Kepadatan Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> <li>nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) dan tundaan simpang rata-rata.</li> <li>Jenis dan bentuk pemeliharaan infrastruktur jalan</li> <li>Jumlah kecelakaan akibat kesalahan sopir truk pengangkut</li> </ol>	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengatur kendaraan dan rambu-rambu</li> <li>Waktu pengangkutan alat berat dan pengangkutan material</li> <li>Pelaksanaan <i>Defensive Safety Driving</i></li> </ol> </li> <li>Pengukuran kepadatan lalu lintas: Metode :Survey <i>traffic counting</i> (pencacahan arus lalu lintas) Alat : <ol style="list-style-type: none"> <li>Form bentuk pengelolaan yang akan dilakukan</li> <li>Form survei <i>traffic counting</i></li> </ol> Teknik Sampling : Observasi dan pencatatan kendaraan pada jam-jam sibuk </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pengamatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Jalan akses keluar masuk PLTU</li> <li>Simpang Wedelan - PLTU)</li> <li>Kantor</li> </ol> </li> <li>Lokasi pengukuran kepadatan lalu lintas: <ol style="list-style-type: none"> <li>ruas Jalan Lokal Wedelan - Tubanan (PLTU)</li> <li>simpang tak bersinyal Kaliaman</li> <li>simpang tak bersinyal Tubanan</li> <li>simpang tak bersinyal Wedelan</li> </ol> </li> </ol>	Enam bulan sekali selama masa operasi	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Polres Jepara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				masyarakat Analisis Data :Hasil deskriptif dan kuantatif mengenai tingkat kepadatan lalu lintas dengan penentuan volume kendaraan dan kapasitas jalan					
III.E.5.	Terciptanya Peluang Usaha	jumlah usaha dari masyarakat terdampak di sekitar lokasi proyek paling sedikit satu usaha	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Metode : Metode pengamatan dan wawancara mendalam terhadap usaha baru Alat : Kamera dan panduan pertanyaan Teknik Sampling : Pendokumentasian Analisis Data : Data dianalisis deskriptif verbal	Desa Tubanan Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri,	Enam bulan sekali selama operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
III.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling	Kecamatan Kembang: Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan; Kecamatan Bangsri: Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, dan Kecamatan Mlonggo: Kedungleper Kabupaten Jepara	Enam bulan sekaliselama operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		dan pelengkap ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.		dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap					
III.E.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, dan pneumokoniosis yang tercatat di Puskesmas, dan jumlah kejadian pneumokoniosis yang tercatat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jepara.	Peningkatan TSP, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> akibat Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Metode : 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas, dan angka kematian (mortalitas). 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesener, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data TSP, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap 4. Pengamatan langsung terhadap:	1. Di puskesmas Kecamatan Kembang, Puskesmas Kecamatan Bangsri, Puskesmas Kecamatan Mlonggo 2. Masyarakat terkena dampak yang bermukim di dekat lokasi pembangkit utama dan pelengkap 3. Titik lokasi pengukuran pemantauan TSP, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub>	Enam bulan sekali selama operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				a) Pengoperasian secara optimal alat pengendali emisi, seperti ESP, FGD, dan Low NOx Burner. b) Minimuliasi penebangan vegetasi/pohon dengan mempertahankan pohon yang telah ada, khususnya di area yang tidak terkena bangunan c) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu d) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan deteksi dini dan pemeriksaan ISPA dan penyakit <i>pneumokinosis</i> akibat debu yang ditimbulkan oleh kegiatan pengoperasian					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap serta kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan</p> <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuesioner,</li> <li>2. Kamera</li> <li>3. Alat tulis</li> </ol> <p>Teknik Sampling : Purposive random sampling</p> <p>Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
<b>DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIPANTAU</b>																								
<b>(PENGELOLAAN LINGKUNGANNYA TELAH DIRENCANAKAN SEJAK AWAL SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA KEGIATAN ATAU MENGACU SOP, PANDUAN PEMERINTAH, DAN LAIN-LAIN)</b>																								
<b>I. KONSTRUKSI</b>																								
I.1.	Terciptanya Peluang Berusaha	Terdapat minimal 1 usaha baru di sekitar lokasi proyek yang difasilitasi yang melayani kegiatan konstruksi PLTU oleh PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi</li> <li>Penerimaan tenaga kerja operasi</li> </ol>	Metode : Metode pengamatan dan wawancara mendalam terhadap usaha baru Alat : Kamera dan panduan pertanyaan Teknik Sampling : Pendokumentasian Analisis Data : Data dianalisis deskriptif verbal	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama tahap konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>															
I.2.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Tinggi muka air tanah masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya</li> <li>Pembangunan bangunan non-teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan terhadap penggunaan air tanah dalam dengan kedalaman sumur 120 – 135 m</li> <li>Pengukuran langsung tinggi muka air tanah pada sumur warga dan sumur pantau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sumur warga di sekitar PLTU Tanjung Jati B Unit 5&amp;6</li> <li>Titik pengukuran kualitas air tanah:</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAT-1</td> <td>110° 45' 24"</td> <td>6° 26' 57"</td> </tr> <tr> <td>QAT-2</td> <td>110° 44' 54,77"</td> <td>6° 27' 0,7"</td> </tr> <tr> <td>QAT-3</td> <td>110° 45' 35"</td> <td>6° 26' 30"</td> </tr> <tr> <td>QAT-4</td> <td>110° 45' 56"</td> <td>6° 27' 8"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QAT-1	110° 45' 24"	6° 26' 57"	QAT-2	110° 44' 54,77"	6° 27' 0,7"	QAT-3	110° 45' 35"	6° 26' 30"	QAT-4	110° 45' 56"	6° 27' 8"	Enam bulan sekali selama konstruksi bangunan utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya dan Pembangunan Bangunan non-teknis	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan ESDM Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
KODE	BT	LS																						
QAT-1	110° 45' 24"	6° 26' 57"																						
QAT-2	110° 44' 54,77"	6° 27' 0,7"																						
QAT-3	110° 45' 35"	6° 26' 30"																						
QAT-4	110° 45' 56"	6° 27' 8"																						
I.3.	Kondisi Fisik Jalan (Kerusakan Jalan)	Jumlah kerusakan jalan akibat aktivitas mobilisasi pengangkutan alat dan material pembangunan PLTU unit 5 & 6	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan – Material</li> <li>Commis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi adanya pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas</li> </ol>	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	Enam bulan sekali saat kegiatan konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara</li> <li>Dinas Pekerjaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>															

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			<i>sioning</i>	maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut 2. Observasi adanya kendaraan yang melwati sesuai kelas jalan yang ditentukan dan sesuai hasil dari jembatan timbang				Umum, Pengairan dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. RIH Provinsi Jawa Tengah	
I.4.	Timbulan Limbah B3 a. Sumber tidak spesifik : - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) b. Sumber spesifik : - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sludge	1. Jumlah limbah B3 yang tidak terkelola. 2. Lama penyimpanan Limbah B3	Kegiatan <i>Commissioning</i>	1. Pengamatan langsung : a. Sumber tidak spesifik : 1) Tempat penyimpanan Limbah B3 2) Waktu penyimpanan Limbah B3 3) Fasilitas/sistem tanggap darurat 4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 b. Sumber Spesifik 1) Silo	1. Pengamatan langsung a. Tempat penyimpanan Limbah B3 b. Silo penyimpanan Fly Ash dan Bottom Ash c. <i>Sludge Bunker</i> 2. Titik Pantau : Tempat penyimpanan Limbah B3	Enam bulan sekali selama <i>Commissioning</i>	PT. Bumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)			<p>penyimpanan Fly Ash dan Bottom Ash, serta <i>sludge bunker</i></p> <p>2) Waktu penyimpanan Limbah B3</p> <p>3) Fasilitas/sistem tanggap darurat</p> <p>4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan :  Metode: Observasi dan pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log book limbah B3, dan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga  Analisa data: Membandingkan hasil pemantauan dengan kondisi awal.</p>					
I.5.	Gangguan	1. Masyarakat	Aktifitas	Metode :	Daerah perairan di sekitar	Enam bulan	PT. Bumi	1. Dinas Kelautan	1. Bupati Jepara

f.



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Alur Pelayaran Nelayan	<p>mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Jetty</p> <p>2. Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut karena pembangunan Jetty</p>	pembangunan jetty	<p>1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data kecelakaan nelayan di laut pada saat pembangunan Jetty</p> <p>Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana Aktifitas pembangunan jetty</p>	lokasi pembangunan Jetty	sekali selama kegiatan pembangunan jetty untuk memastikan bahwa SOP berjalan dengan baik	Jati Power	<p>dan Perikanan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara</p> <p>3. DLH Kabupaten Jepara</p> <p>4. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
I.6.	Persepsi dan sikap masyarakat	<p>4. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi terhadap akibat kegiatan :</p> <p>c) Pemanfaatan Lay Down Area</p> <p>d) Commissioning</p> <p>5. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat</p>	<p>1. Pemanfaatan Lay Down Area</p> <p>2. Commissioning</p>	<p>Metode :</p> <p>1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap:</p> <p>a) Pemanfaatan Lay Down Area</p> <p>b) Commissioning</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang</p>	Desa Tubanan, Desa Kancilan, Desa Balong Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo,	Enam bulan sekali selama: 1. Pemanfaatan Lay Down Area 2. Commissioning	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
								Tengah	
		terdampak kegiatan: c) Pemanfaatan Lay Down Area. d) Commissioning 6 Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan: c) Pemanfaatan Lay Down Area. d) Commissioning		masuk dalam kotak saran Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan : a) Pemanfaatan Lay Down Area b) Commissioning					
I.7.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja nol	1. Pemban gunan Jalan Akses 2. Pengeru kan (dredgin g) 3. Dumpin g 4. Pemban gunan Jetty 5. Pemban gunan Water Intake dan outfall 6. Pemban gunan Bangun an Utama PLTU dan	Metode: 1. Menghitung angka kecelakaan kerja dan kesehatan kerja/angka penyakit akibat kerja 2. Pengamatan langsung terhadap: a. adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan b. ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR c. Perawatan peralatan konstruksi	1. di kantor sementara selama konstruksi (poin 2 butir a, b, d, f, i, j dan k) Lokasi tapak proyek sesuai kegiatan	Enam bulan sekali selama konstruksi Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jcpara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			Fasilitas Pendukungnya 7. Pembangunan bangunan non-teknis 8. Pembangunan Ash Disposal Area 9. <i>Commissioning</i>	secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya d. ketersediaan fasilitas P3K kit e. ketersediaan pos kesehatan f. ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan g. pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) h. pelaksanaan safety induction bagi tamu sebelum memasuki area (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). i. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																																			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																	
				keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan j. pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan k. penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan Alat: Kamera Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif																																						
I.8.	Perubahan sedimentasi kawasan perairan Tanjung Jati terkait faktor oseanografi	Kondisi bathimetri perairan Tanjung Jati.	Kegiatan: 1. <i>Dredging</i> 2. <i>Dumpin g</i> 3. Pembangunan jetty 4. Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>outfall</i>	Metode: 1. Pengamatan langsung terhadap: a) proses dredging b) Penggunaan <i>hopper barge</i> tipe <i>bottom door</i> , dan pemasangan <i>screen</i> (jika diperlukan) pada radius 50 m dari area dredging c) Konstruksi	Kawasan Perairan Tanjung Jati: 5. Lokasi <i>Dredging</i> : a. Jetty: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B01</td> <td>110°43' 3,85"</td> <td>6° 26' 6,36"</td> </tr> <tr> <td>B02</td> <td>110°43' 55,73"</td> <td>6° 26' 32,02"</td> </tr> <tr> <td>B03</td> <td>110° 43' 57,74"</td> <td>6° 26' 31,62"</td> </tr> <tr> <td>B04</td> <td>110° 44' 2,96"</td> <td>6° 26' 38,26"</td> </tr> <tr> <td>B05</td> <td>110° 44' 3,74"</td> <td>6° 26' 36,81"</td> </tr> </tbody> </table> b. Selanjutnya tersaji pada Tabel 1.10. hal. I.17. 6. Lokasi <i>Dumping</i> : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>110° 43' 19"</td> <td>6° 23' 41"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>110° 43' 36"</td> <td>6° 24' 09"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>110° 44' 38"</td> <td>6° 23' 30"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>110° 44' 21"</td> <td>6° 23' 03"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	B01	110°43' 3,85"	6° 26' 6,36"	B02	110°43' 55,73"	6° 26' 32,02"	B03	110° 43' 57,74"	6° 26' 31,62"	B04	110° 44' 2,96"	6° 26' 38,26"	B05	110° 44' 3,74"	6° 26' 36,81"	KODE	BT	LS	A	110° 43' 19"	6° 23' 41"	B	110° 43' 36"	6° 24' 09"	C	110° 44' 38"	6° 23' 30"	D	110° 44' 21"	6° 23' 03"	Setahun sekali	PT. Bumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Kabupaten Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																																								
B01	110°43' 3,85"	6° 26' 6,36"																																								
B02	110°43' 55,73"	6° 26' 32,02"																																								
B03	110° 43' 57,74"	6° 26' 31,62"																																								
B04	110° 44' 2,96"	6° 26' 38,26"																																								
B05	110° 44' 3,74"	6° 26' 36,81"																																								
KODE	BT	LS																																								
A	110° 43' 19"	6° 23' 41"																																								
B	110° 43' 36"	6° 24' 09"																																								
C	110° 44' 38"	6° 23' 30"																																								
D	110° 44' 21"	6° 23' 03"																																								

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan														
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan												
				<p>jetty dengan open pile</p> <p>d) Metode pemasangan pipa intake menggunakan crane barge</p> <p>2. Metode survey bathimetri yang dilakukan secara langsung pada bagian dasar perairan.</p> <p>Alat: Echousounder, GPS, perahu survey.</p> <p>Teknik Sampling: Purposive random sampling</p> <p>Pengambilan Data: Pengambilan data primer kedalaman dasar perairan.</p> <p>Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.</p>	<p>7. Lokasi Pembangunan Jetty</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>110° 44' 25.18"</td> <td>6° 26' 58.7"</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selanjutnya tersaji pada Gambar 1.10</p> <p>8. Lokasi Pembangunan Water Intake dan Outfall Tersaji pada Gambar 1.13.</p>	KODE	BT	LS		110° 44' 25.18"	6° 26' 58.7"										
KODE	BT	LS																			
	110° 44' 25.18"	6° 26' 58.7"																			
<b>II. TAHAP OPERASI</b>																					
II.1.	Kualitas udara ambien	Parameter PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , Debu, NO <sub>2</sub> , CO	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	<p>1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan:</p> <p>a. Pemasangan <i>Water Cannon Suppression System</i></p> <p>b. Kelengkapan barrier pada <i>Coal Yard</i></p> <p>c. <i>Belt Conveyor</i> dilengkapi dengan cover</p>	<p>1. Lokasi <i>Coal Yard</i> dan sekitarnya</p> <p>2. Titik pengukuran kualitas udara ambien yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QU-2</td> <td>110° 44' 20,0"</td> <td>6° 27' 33,4"</td> </tr> <tr> <td>QU-11</td> <td>110° 43' 43,3"</td> <td>6° 27' 06,0"</td> </tr> <tr> <td>QU-12</td> <td>110° 44' 25,4"</td> <td>6° 27' 04,0"</td> </tr> </tbody> </table> <p>Persawahan di Desa Bondo</p>	KODE	BT	LS	QU-2	110° 44' 20,0"	6° 27' 33,4"	QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"	QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"	<p>1. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&amp;6</p> <p>2. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&amp;6</p>	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. BLH Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</p>
KODE	BT	LS																			
QU-2	110° 44' 20,0"	6° 27' 33,4"																			
QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"																			
QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"																			

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan														
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan												
				d. Tumpukan <i>Coal Yard</i> dengan <i>Sludge Coal Run Off</i> . e. Penanaman tanaman 2. Pengukuran dan analisa data kualitas udara ambien dengan metode SNI, yaitu Debu (SNI 19-7119.3-2005), PM 10 SNI 19-7119.6-2005, PM 2,5 SNI 19-7119.3-2005, NO <sub>2</sub> : SNI 19-7119.2-2005, CO: (SNI 19-7119.10-2011) 3. Teknik Sampling: 24 jam																	
II.2.	Meningkatnya kebauan	Kejadian <i>self combustion</i> yang menimbulkan bau	Pengoperasian Sistem Penanganan Dahan Dakar	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Pencegahan <i>Self Combution</i> b. Pembuatan SOP <i>Self Combution</i> c. Pengoperasian <i>Water Cannon Dust Suppresion system</i> 2. Pengukuran kualitas udara ambien dengan : Metode: Sampling kualitas udara ambien parameter kebauan Alat : 1) Gas	1. Pengamatan langsung di lokasi : a. <i>Coal Yard</i> . b. Kantor operasional PLTU TJB Unit 5&6 c. <i>Coal Yard</i> 2. Pengukuran kualitas udara di lokasi sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>IT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QU-2</td> <td>110° 44' 20,0"</td> <td>6° 27' 33,4"</td> </tr> <tr> <td>QU-11</td> <td>110° 43' 43,3"</td> <td>6° 27' 06,0"</td> </tr> <tr> <td>QU-12</td> <td>110° 44' 25,4"</td> <td>6° 27' 04,0"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	IT	LS	QU-2	110° 44' 20,0"	6° 27' 33,4"	QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"	QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"	1. Pengamatan dilakukan: a. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 b. Sekali sebelum operasional c. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jcpara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	IT	LS																			
QU-2	110° 44' 20,0"	6° 27' 33,4"																			
QU-11	110° 43' 43,3"	6° 27' 06,0"																			
QU-12	110° 44' 25,4"	6° 27' 04,0"																			

f

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan														
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan												
				kromatograf 2) Kamera 3) Alat tulis Teknik Sampling :Area Sampling Analisis Data : Data dianalisis di laboratorium dan dilakukan analisa deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan		Jati B Unit 5&6 2. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati H Unit 5&6															
II.3.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Parameter TDS, Kekeruhan, Cl, Kesadahan, pH, Fe dan Mn	Penanganan batubara yaitu pada saat penumpukan batubara	1. Pengamatan langsung terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>pengoperasian kolam penampungan</li> <li>Nilai permeabilitas lapisan dasar Coal Yard</li> <li>Sistem pembuangan leachate menuju WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i></li> <li>Perawatan pada tempat penimbunan, kolam penampungan dan saluran pembuangan</li> </ol> 2. Pengukuran langsung pada kualitas air tanah pada sumur pantau dengan menggunakan	1. Coal Yard dan WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i> 2. Titik pengukuran pada sumur pantau <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAT-2</td> <td>110°44'55"</td> <td>6°27'1"</td> </tr> <tr> <td>QAT-4</td> <td>110°43'44.01"</td> <td>6°27'9.32"</td> </tr> <tr> <td>QAT-5</td> <td>110°44'4.47"</td> <td>6°26'37.34"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	QAT-2	110°44'55"	6°27'1"	QAT-4	110°43'44.01"	6°27'9.32"	QAT-5	110°44'4.47"	6°26'37.34"	Enambulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan bahan bakar	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
KODE	BT	LS																			
QAT-2	110°44'55"	6°27'1"																			
QAT-4	110°43'44.01"	6°27'9.32"																			
QAT-5	110°44'4.47"	6°26'37.34"																			

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan															
				Metode Pengumpulan data dan analisa sesuai SNI 6989.58-2008																				
II.1.	Kualitas udara ambien	Debu, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub>	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat (Penimbunan Fly Ash dan Bottom Ash).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyiraman dan pepadatan limbah padat (Fly Ash dan Bottom Ash)</li> <li>Pembuatan pagar penutup Ash Yard</li> <li>Penanaman tanaman pengurang sebaran debu</li> </ol> </li> <li>Pengukuran kualitas udara ambien dengan Metode: Sampling kualitas udara ambien parameter Debu, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, sesuai dengan SNI, yaitu Debumengacu SNI 19-7119.3-2005, PM 10 SNI 19-7119.6-2005, PM 2,5 SNI 19.7119.3-2005 Teknik Sampling: 24 jam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ash Yard</li> <li>Titik Pemantauan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QU-1</td> <td>110°44'39.40"</td> <td>6°27'20.20"</td> </tr> <tr> <td>QU-6</td> <td>110°45'00.00"</td> <td>6°28'25.60"</td> </tr> <tr> <td>QU-7</td> <td>110°46'54.20"</td> <td>6°30'46.00"</td> </tr> <tr> <td>QU-9</td> <td>110°44'47.60"</td> <td>6°27'11.80"</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	KODE	BT	LS	QU-1	110°44'39.40"	6°27'20.20"	QU-6	110°45'00.00"	6°28'25.60"	QU-7	110°46'54.20"	6°30'46.00"	QU-9	110°44'47.60"	6°27'11.80"	Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
KODE	BT	LS																						
QU-1	110°44'39.40"	6°27'20.20"																						
QU-6	110°45'00.00"	6°28'25.60"																						
QU-7	110°46'54.20"	6°30'46.00"																						
QU-9	110°44'47.60"	6°27'11.80"																						
II.5.	Penurunan kualitas air tanah	Parameter TDS, Kekeruhan, Cl, Kesadahan, pH, Fc dan Mn	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Desain konstruksi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Area Landfill</li> <li>Titik pemantauan pada: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QAT-1</td> <td>110° 45' 24"</td> <td>6° 26' 57"</td> </tr> <tr> <td>QAT-2</td> <td>110° 44' 55"</td> <td>6° 27' 1"</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	KODE	BT	LS	QAT-1	110° 45' 24"	6° 26' 57"	QAT-2	110° 44' 55"	6° 27' 1"	Enambulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur</li> </ol>						
KODE	BT	LS																						
QAT-1	110° 45' 24"	6° 26' 57"																						
QAT-2	110° 44' 55"	6° 27' 1"																						

f



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				landfill b. Operasional Sumur Pantau 2. Pengukuran langsung pada kualitas air tanah dengan menggunakan metode Pengumpulan datadan Analisis sesuai SNI 6989.58-2008	QAT-3 110°45'35.02" 6°26'30.48"	limbah padat			Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.6.	Kondisi jalan (kerusakan jalan)	Jumlah dan/atau luas kerusakan jalan akibat aktivitas operasional PLTU unit 5 & 6	1. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu 2. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	1. Observasi adanya pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut 2. Observasi adanya kendaraan pengangkutan yang melewati sesuai kelas jalan yang ditentukan dan sesuai hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	Enam bulan sekali saat operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.7.	Timbulan	1. Tidak ada limbah B3	Pengoperasia	1. Pengamatan	1. Lokasi pengamatan	1. Enam bulan	PT. Bhumi	1. BLH Kabupaten	1. BupatiJeparaM

1

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Institusi Pemantauan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Limbah B3 a. Sumber tidak spesifik : - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) b. Sumber spesifik : - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sludge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	n dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	langsung : a. Sumber tidak spesifik : 1) Tempat penyimpanan Limbah B3 2) Waktu penyimpanan Limbah B3 3) Sistem tanggap darurat 4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 b. Sumber Spesifik 1) Silo penyimpanan Fly Ash dan Bottom Ash 2) Waktu penyimpanan Limbah B3 3) Sistem tanggap darurat	langsung: a. Tempat penyimpanan Limbah B3 b. Silo penyimpanan Fly Ash dan Bottom Ash c. <i>Sludge Bunker</i> penyimpanan sludge IPAL 2. Titik Pantau : Tempat penyimpanan Limbah B3	sekali selama pengoperasian sistem penanganan limbah padat 2. Enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Jati Power	Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	elalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui RI.H Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan : Metode: Observasi dan pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log book limbah B3, dan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga Analisa data: Membandingkan hasil pemantauan dengan kondisi awal.</p>					
II.8.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	<p>1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pengoperasian <i>Jetty</i></p> <p>2. Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut akibat pengoperasian <i>Jetty</i>.</p>	Pengoperasian <i>Jetty</i>	<p>1. Pengamatan langsung terhadap sosialisasi dan koordinasi dengan nelayan dan institusi terkait mengenai alur pelayaran</p> <p>2. Survei sosial dengan: Metode : 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan</p>	<p>1. Tapak proyek</p> <p>2. Pemukiman di sekitar tapak proyek.</p>	Enam bulan sekali saat kegiatan operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	<p>1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara</p> <p>2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi</p>	<p>1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung.</p> <p>2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data kecelakaan nelayan di laut pada saat pengoperasian Jetty.</p> <p>Alat : Kuesioner Teknik Sampling : Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana Aktifitas pembangunan jetty</p>				Jawa Tengah	
II.9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerjanol	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian Jetty</li> <li>Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu</li> <li>Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar</li> </ol>	<p>Metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghitung angka kecelakaan kerja dan kesehatan kerja/ angka penyakit akibat kerja</li> <li>Pengamatan langsung terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan</li> <li>ketersediaan Alat Pelindung</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Di kantor (poin 2 butir a, b, d, f, i, j dan k)</li> <li>Di semua unit (a-f dan i-k)</li> <li>Tamu yang memasuki area PLTU (poin h)</li> </ol>	Enam bulan sekali pada saat operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Kabupaten Jepara</li> <li>BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara</li> <li>Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>

f

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			<p>4. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair</p> <p>5. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat</p> <p>6. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap</p>	<p>Diri (APD) dan APAR</p> <p>c. Perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelangkaan operasionalnya</p> <p>d. ketersediaan fasilitas P3K kit</p> <p>e. ketersediaan pos kesehatan</p> <p>f. ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan</p> <p>g. pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan hari tua dan dana pensiun)</p> <p>h. pelaksanaan <i>safety induction</i> bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area (penjelasan tentang</p>					

f.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan																										
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																								
				keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). i. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan j. pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan k. penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan  Alat: Kamera Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif																													
II.10.	Perubahan garis pantai	1. Laju abrasi atau akresi 2. Perubahan Garis Pantai pada area yang belum terabrasi 3. Kondisi bangunan di tepi pantai 4. Kejadian erosi akibat refraksi energi muka	Kegiatan: Pengoperasian Jett y	Metode: Metode survey yang dilakukan secara langsung dengan pengukuran perubahan	Pemantauan perubahan garis pantai pada lokasi benchmark yang sudah ditetapkan <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th>BT</th> <th>LS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BM1</td> <td>110° 41' 15"</td> <td>-6° 29' 58"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110° 41' 46"</td> <td>-6° 28' 58"</td> </tr> <tr> <td>BM2</td> <td>110° 42' 29"</td> <td>-6° 28' 30"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110° 43' 50"</td> <td>-6° 26' 40"</td> </tr> <tr> <td>BM3</td> <td>110° 44' 0"</td> <td>-6° 26' 40"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110° 45' 41"</td> <td>-6° 26' 22"</td> </tr> <tr> <td>BM4</td> <td>110° 45' 51"</td> <td>-6° 26' 17"</td> </tr> </tbody> </table>	KODE	BT	LS	BM1	110° 41' 15"	-6° 29' 58"		110° 41' 46"	-6° 28' 58"	BM2	110° 42' 29"	-6° 28' 30"		110° 43' 50"	-6° 26' 40"	BM3	110° 44' 0"	-6° 26' 40"		110° 45' 41"	-6° 26' 22"	BM4	110° 45' 51"	-6° 26' 17"	Enam bulan sekali selama tahap operasi	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan	1. Bupati Kabupaten Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi
KODE	BT	LS																															
BM1	110° 41' 15"	-6° 29' 58"																															
	110° 41' 46"	-6° 28' 58"																															
BM2	110° 42' 29"	-6° 28' 30"																															
	110° 43' 50"	-6° 26' 40"																															
BM3	110° 44' 0"	-6° 26' 40"																															
	110° 45' 41"	-6° 26' 22"																															
BM4	110° 45' 51"	-6° 26' 17"																															

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		gelombang		<p>garis pantai. Alat: <i>Theodolit</i>, <i>Waterpass</i>. Teknik Sampling: Purposive random sampling Pengambilan Data:</p> <p>1. Pengambilan data primer garis pantai dengan membuat <i>cross section</i> pantai pada BM yang telah ditetapkan atau ditentukan.</p> <p>2. Pengambilan data primer pemantauan garis pantai dengan menggunakan citra satelit <i>Landsat</i> yang dilengkapi dengan <i>ground check</i>.</p> <p>Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.</p>	110° 47' 6" - 6° 25' 31"			<p>Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p>	Jawa Tengah


  
 GUBERNUR JAWA TENGAH,  
*Ganjar Pranowo*  
 GANJAR PRANOWO